



KELAS 8

PANCASILA

Pancasila dan Jati Diri Bangsa Indonesia:

Buku Pegangan Pancasila untuk Siswa Kelas 8

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya e-book Pancasila ini yang merupakan bagian dari upaya menghadirkan pembelajaran yang lebih mudah diakses oleh seluruh pelajar Indonesia. Pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran yang mempelajari nilai-nilai luhur Pancasila, identitas nasional, serta prinsip bernegara, yang bertujuan membentuk generasi yang berkarakter, cinta tanah air, dan berperan aktif dalam menjaga persatuan.

E-book ini disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran Pancasila Fase D (sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka). Konten e-book ini dirancang agar peserta didik dapat memahami materi Pancasila secara komprehensif, mengasah keterampilan berpikir kritis, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain materi utama, e-book ini juga dilengkapi dengan latihan soal, pembahasan, serta tautan ke sumber belajar tambahan seperti video pembelajaran interaktif.

E-book ini merupakan bagian dari platform [Fitri](#), sebuah platform pembelajaran digital yang menyediakan akses gratis ke berbagai materi belajar, termasuk e-book, latihan soal, dan video pembelajaran interaktif untuk seluruh anak Indonesia. Fitri hadir sebagai wujud kontribusi nyata dalam mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan inklusi, Fitri berkomitmen untuk membantu seluruh siswa, di mana pun berada, agar dapat belajar secara mandiri, efektif, dan menyenangkan. Hal ini selaras dengan tujuan besar pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersedianya e-book ini. Semoga kehadiran e-book Pancasila ini dapat memberikan manfaat nyata dalam proses belajar peserta didik dan turut berkontribusi dalam meningkatkan literasi bangsa.

Jakarta, Juni 2025

Tim Fitri

Daftar Isi

BAB 1: PANCASILA SEBAGAI LANDASAN KEHIDUPAN BERBANGSA	4
1. Pancasila sebagai Dasar Negara.....	6
2. Pancasila sebagai Falsafah Bangsa	11
3. Ideologi Negara yang Berlandaskan Pancasila	15
4. Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan.....	19
Rangkuman.....	23
Latihan Soal.....	24
Referensi	25
BAB 2: PANDUAN DASAR NEGARA KITA	26
1. Perumusan dan Penetapan UUD NRI Tahun 1945	28
2. Posisi dan Peran UUD NRI Tahun 1945	37
3. Mengamalkan Konstitusi dalam Kehidupan Sehari-hari.....	40
Rangkuman.....	43
Latihan Soal.....	44
Referensi	45
BAB 3: HUKUM DAN PERATURAN DI TANAH AIR KITA	46
1. Aturan di Lingkungan Rumah, Sekolah, Masyarakat, dan Negara	48
2. Pentingnya Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	54
3. Kriteria dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan	59
4. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.....	64
5. Komitmen terhadap Penegakan Hukum di Indonesia	67
Rangkuman.....	71
Latihan Soal.....	72
Referensi	73
BAB 4: UPAYA PELESTARIAN BUDAYA BANGSA	74
1. Menjaga Tradisi, Kearifan Lokal, dan Kebudayaan Nasional.....	76
2. Kebudayaan Nasional sebagai Penguat Solidaritas Bangsa.....	85
3. Budaya Nasional sebagai Karakteristik dan Identitas Bangsa	90
Rangkuman.....	94
Latihan Soal.....	95
Referensi	96
BAB 5: MENJAGA PERSATUAN BANGSA DAN NEGARA	97
1. Memelihara Persatuan Bangsa dengan Wawasan Nusantara.....	99
2. Perwujudan Wawasan Nusantara	108
Rangkuman.....	117
Latihan Soal.....	118
Referensi	119



BAB 1: PANCASILA SEBAGAI LANDASAN KEHIDUPAN BERBANGSA

Karakter Pelajar Pancasila

- ▷ **Bergotong royong**
Berkontribusi dengan nilai Pancasila untuk kebaikan bersama.
- ▷ **Bernalar kritis**
Mengkaji peran, makna, dan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa.
- ▷ **Kreatif**
Mengekspresikan gagasan dan tindakan sesuai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Pancasila, Dasar Negara, Ideologi, Pandangan Hidup, Nilai Sila, Implementasi

Tujuan Pembelajaran: Menelaah peran dan nilai Pancasila

- 1. Menguraikan peran dan posisi Pancasila sebagai landasan negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional**
 - ▷ Memahami Pancasila sebagai dasar sistem hukum dan pemerintahan.
 - ▷ Memahami Pancasila sebagai pedoman hidup bagi bangsa Indonesia.
 - ▷ Memahami Pancasila sebagai ideologi kehidupan berbangsa.
- 2. Menganalisis makna yang terkandung dalam setiap prinsip Pancasila**
 - ▷ Menjelaskan pengaruh nilai ketuhanan dalam kehidupan sosial dan bernegara.
 - ▷ Menganalisis pentingnya nilai kemanusiaan.
 - ▷ Menganalisis makna persatuan dalam konteks keberagaman bangsa Indonesia.
 - ▷ Menguraikan pemaknaan musyawarah.
 - ▷ Menjelaskan urgensi keadilan dalam setiap aspek kehidupan.

3. Menjelaskan peranan Pancasila sebagai landasan negara, pandangan hidup, dan ideologi dalam implementasi pemerintahan negara

- ▷ Mengurai implementasi Pancasila dalam landasan hukum dan kebijakan negara.
- ▷ Menjelaskan peran Pancasila dalam membentuk kehidupan sosial yang harmonis.
- ▷ Menjelaskan Pancasila sebagai solusi atas konflik masyarakat dan daerah.

4. Menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat

- ▷ Mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam hubungan antar anggota keluarga.
- ▷ Menguraikan Pancasila dalam mendukung iklim belajar yang positif.
- ▷ Mengimplementasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.



F I T R I



Pancasila sebagai salah satu Lambang Negara Indonesia - Shutterstock.com.2496217497



1. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila lahir sebagai hasil dari proses panjang yang melibatkan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Dalam sidang BPUPKI pada 1945, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soepomo berperan dalam merumuskan dasar negara. Soekarno, sebagai pemimpin, menyampaikan gagasan mengenai lima sila yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selain itu, kontribusi tokoh lain, seperti Muhammad Yamin, yang menekankan pada pentingnya dasar moral dan nilai luhur bangsa, turut membentuk Pancasila sebagai ideologi yang relevan untuk masa depan Indonesia. Pancasila merupakan perpaduan nilai-nilai tradisional dengan ide-ide modern, yang kemudian meletakkan dasar bagi ideologi Pancasila.

Dasar Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai landasan yuridis ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak segala bangsa, dan perjuangan kemerdekaan itu didasari atas Pancasila. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara mengandung prinsip-prinsip yang mendasari segala aturan hukum yang ada di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 memberikan penekanan pada cita-cita luhur bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Pancasila sebagai dasar negara yang tidak dapat dipisahkan dari ideologi dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila juga dijadikan dasar dalam segala kebijakan yang berlaku di Indonesia, baik dalam bidang politik, hukum, maupun sosial.

Selanjutnya, Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, yang merupakan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, memberikan penegasan tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tap ini menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi yang harus diinternalisasi dalam berbagai lapisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks hukum, Tap ini juga memberi panduan mengenai pentingnya Pancasila sebagai acuan bagi perubahan dan pembaruan

yang berlangsung di Indonesia setelah reformasi. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi fundamental dalam menjaga keberlanjutan dan konsistensi dalam tata kelola negara.

Kaelan (2018) dan Darji Darmodiharjo (2023) memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai kedudukan Pancasila dalam praktek ketatanegaraan Indonesia. Kaelan (2018) menekankan bahwa Pancasila bukan hanya simbol, tetapi merupakan dasar hidup berbangsa yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Sementara itu, Darmodiharjo (2023) menguraikan pentingnya implementasi Pancasila dalam penyelenggaraan negara, yang dapat dilihat dari berbagai kebijakan publik yang mengutamakan prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Mereka berdua bersepakat bahwa Pancasila bukan sekadar ideologi semata, tetapi juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang diharapkan dapat menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menurut Kaelan (2018), Pancasila memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam ketatanegaraan Indonesia. Di bawah ini adalah beberapa aspek kedudukan Pancasila:

- a. Pancasila adalah ideologi yang mendasari setiap langkah dan keputusan negara. Ideologi ini berfungsi untuk memandu Indonesia dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Kaelan menegaskan bahwa Pancasila mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan, yang menjadi pedoman dalam setiap kegiatan negara.
- b. Pancasila juga dianggap sebagai filosofi yang mendalam tentang kehidupan berbangsa. Kaelan menekankan bahwa filosofi ini menuntun bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan dalam keberagaman, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila.
- c. Sebagai sumber hukum negara, Pancasila menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap undang-undang yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- d. Pancasila juga berperan dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, rakyat Indonesia diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.
- e. Pancasila merupakan konsensus yang mengikat seluruh elemen bangsa Indonesia, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, dan budaya. Kaelan (2018) menekankan bahwa Pancasila adalah kesepakatan bersama yang harus dihormati oleh semua pihak sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam aspek hukum ketatanegaraan, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat vital, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Tap MPR No. III Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Selain itu, Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 juga menggarisbawahi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Ini menegaskan bahwa segala peraturan yang dibuat harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara merupakan landasan fundamental dalam setiap keputusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga negara, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada keadilan sosial dan kemanusiaan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dengan demikian, kedudukan Pancasila dalam aspek hukum ketatanegaraan menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi ideologi, tetapi juga menjadi hukum yang mengikat seluruh warga negara.

Lapisan Pancasila dalam Peranannya sebagai Dasar Negara

Pancasila dapat dipahami dalam tiga tingkatan menurut Ketut Rindjin (dalam Winarno, 2023), yang menggambarkan Pancasila sebagai ideologi yang bersifat mendalam dan memiliki peran yang lebih luas.

- a. Pancasila sebagai Prinsip Dasar Negara yang Memiliki Sifat Abstrak-Universal**

Pancasila memiliki peran sebagai ideologi dasar yang tidak terbatas pada satu waktu atau tempat tertentu, melainkan berlaku untuk seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Menurut beberapa pakar, seperti Soepomo, Pancasila memiliki nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua bangsa yang menginginkan kedamaian, keadilan, dan kemanusiaan. Pandangan ini sejalan dengan gagasan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memberikan arah umum yang mengakomodasi keberagaman sosial dan budaya bangsa Indonesia, serta berfungsi untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa di bawah satu ideologi.

Para ahli tata negara, seperti Satjipto Rahardjo (2005), menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat abstrak-untiversal ini harus dipahami sebagai suatu dasar yang tidak bisa dipisahkan dari filosofi kehidupan bangsa Indonesia, yang mengedepankan asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi yang mengikat, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang abadi yang menuntun bangsa Indonesia dalam setiap langkah perjuangannya.

b. Pancasila sebagai Acuan Pelaksanaan Negara yang Memiliki Sifat Umum dan Kolektif

Pancasila mengarahkan seluruh aspek kehidupan negara, baik dalam bidang pemerintahan, hukum, dan kebijakan publik. Dalam UUD 1945, secara eksplisit tercantum bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dengan Pancasila sebagai dasar filosofis dan dasar negara. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas negara, penyelenggara negara harus terus berpedoman pada Pancasila sebagai pedoman yang sifatnya kolektif, yang mencakup seluruh lapisan masyarakat dan tidak terbatas pada individu atau kelompok tertentu.



*Pancasila tidak terbatas pada individu -
Shutterstock.com.238479399*

Salah satu kutipan dari UUD 1945 yang mempertegas hal ini adalah dalam Pasal 1 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang berlandaskan pada Pancasila. Ini menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pedoman bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengarah pada pencapaian tujuan negara Indonesia yang adil dan makmur. Sehingga, Pancasila tidak hanya berfungsi secara formal dalam struktur negara, tetapi juga mengikat dalam seluruh proses politik dan sosial negara.

c. Pancasila sebagai Pedoman Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Negara yang Khusus dan Konkret

Pancasila sebagai petunjuk kebijakan penyelenggaraan negara yang khusus dan konkret mengarah pada penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dalam bentuk kebijakan yang lebih terperinci dan praktis. Pemerintah dan lembaga negara diharapkan untuk merumuskan kebijakan yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila untuk memastikan keselarasan antara ideologi dasar negara dan tindakan yang diambil dalam penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, Pancasila menjadi pedoman dalam proses pembuatan keputusan yang diambil dalam situasi dan konteks tertentu, guna mencapai tujuan negara yang lebih spesifik, seperti kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Karakteristik Pancasila sebagai Dasar Negara

Sifat Pancasila sebagai dasar negara sangatlah penting untuk dipahami dalam konteks negara Indonesia yang plural. Menurut Notonegoro, Pancasila adalah satu kesatuan organis yang terdiri dari nilai-nilai yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam hal ini, Pancasila memiliki sifat integratif yang menyatukan berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, politik, maupun hukum. Pancasila, sebagai dasar negara, harus dipahami sebagai suatu ideologi yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kehidupan bernegara itu sendiri.

Jirzah (2020) menjelaskan dalam artikelnya bahwa Pancasila tidak hanya mengatur kehidupan ketatanegaraan, tetapi juga memengaruhi pola pikir dan nilai-nilai dalam masyarakat. Pancasila, sebagai dasar negara yang bersifat organik, menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara prinsip-prinsip Pancasila dengan kondisi sosial dan politik yang ada di Indonesia. Setiap perubahan dalam kehidupan negara harus mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, menjadikannya sebagai landasan hidup berbangsa yang selalu relevan.

Pancasila memiliki sifat yang fleksibel, dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi tetap menjaga prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam setiap sila. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila bersifat dinamis dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi, tanpa kehilangan esensinya sebagai dasar negara. Selain sifat organik, Pancasila juga dapat dipahami dalam bentuk susunan hierarkis, di mana setiap sila memiliki kedudukan yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Struktur Pancasila berbentuk piramida, dengan sila pertama yang merupakan dasar utama yang mendasari sila-sila berikutnya. Sila pertama, yang berbicara tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah fondasi utama yang mengarahkan seluruh prinsip dalam Pancasila. Sila-sila lainnya, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial, mengalir secara hierarkis untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa. Konsep ini menunjukkan bahwa setiap sila memiliki hubungan yang tidak terpisahkan, membentuk suatu kesatuan yang utuh dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.



Patung Ikatan dan Pancasila, simbol unsur saling berkaitan - Shutterstock.com.2329775851

Peran Pancasila sebagai Prinsip Dasar Negara

Pengesahan normatif Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dimulai dengan perumusan dalam Sidang BPUPKI pada 1945, yang kemudian disahkan dalam PPKI pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara yang menjadi landasan hukum bagi seluruh penyelenggaraan negara Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga terintegrasi dalam setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berikut beberapa peran Pancasila:

- a. Sebagai dasar berdiri dan terbentuknya Negara Indonesia.
- b. Sebagai dasar arahan untuk mengatur pelaksanaan negara.
- c. Sebagai dasar keikutsertaan warga negara.
- d. Sebagai dasar interaksi antarwarga negara.
- e. Sebagai dasar dan sumber landasan hukum negara.

Selanjutnya, pemaknaan atas sila-sila Pancasila dalam pelaksanaan negara dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa", mengandung makna bahwa negara Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, yang menjadi dasar moral dan spiritual kehidupan bangsa. Dalam penyelenggaraan negara, sila ini tercermin dalam kebijakan yang mendukung kebebasan beragama dan perlindungan hak-hak agama.
- b. Sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab", mengajarkan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan yang adil terhadap sesama. Dalam konteks negara, sila ini mendorong penerapan kebijakan yang mendukung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Sila "Persatuan Indonesia", mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan negara, sila ini diwujudkan melalui kebijakan yang mendukung kerukunan antar suku, agama, dan budaya di Indonesia.
- d. Sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan negara, keputusan harus dibuat berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini tercermin dalam sistem politik Indonesia yang mengutamakan sistem perwakilan rakyat melalui DPR dan DPD.
- e. Sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", menekankan pentingnya pemerataan keadilan sosial. Dalam kebijakan negara, sila ini diterjemahkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan sosial.

Contoh Soal

Dalam konteks negara Indonesia, Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar negara. Jelaskan dua fungsi utama dari Pancasila yang menjadikannya sebagai dasar negara!

Pembahasan:

1. Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara: Pancasila menjadi dasar yang mengarahkan seluruh pembuatan hukum dan kebijakan negara. Semua undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang ada di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
2. Sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara: Pancasila berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan negara, baik dalam hal sosial, ekonomi, politik, maupun budaya, harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi landasan dalam menyelesaikan setiap permasalahan negara dan masyarakat, serta untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang majemuk.

Fakta Unik Seputar Pancasila

Sultan Hamid II, Penggagas Lambang Garuda



Lambang Garuda -
Shutterstock.com.2404041539

Lambang Garuda Pancasila diciptakan oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, seorang bangsawan dan perwira militer. Ia merancang lambang negara dengan menggabungkan nilai-nilai Pancasila dan inspirasi dari burung Garuda dalam epos Hindu-Buddha. Meskipun desain awalnya mengalami beberapa revisi, termasuk perubahan posisi kepala Garuda dan penghapusan rantai leher, lambang ini akhirnya diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 11 Februari 1950. Sempat ada kekhawatiran bahwa lambang ini mirip lambang burung Elang dari Amerika Serikat, sehingga dilakukan revisi agar lebih mencerminkan karakter Indonesia.



2. Pancasila sebagai Falsafah Bangsa

Pandangan Hidup Bangsa

Pandangan hidup bangsa merupakan cara pandang atau *worldview* yang diterima dan dijalankan oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Indonesia, pandangan hidup ini terbentuk dari nilai-nilai yang diwariskan dan dipelihara sepanjang sejarah negara. Pancasila berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dalam memahami makna hidup berbangsa dan bernegara, serta sebagai dasar untuk menjalani kehidupan dalam keberagaman. Setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan prinsip dasar yang mengatur kehidupan sosial, moral, politik, dan ekonomi.



Pandangan hidup dibutuhkan sebagai arah menuju tujuan - mymynd.co.uk

Kaelan (2018) berpendapat bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tidak hanya terbentuk dari satu sumber saja, tetapi melalui integrasi berbagai nilai budaya, sejarah, dan tradisi bangsa. Padmo Wahyono dalam pandangannya tentang iman, cipta, rasa, dan karsa mengungkapkan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia mencakup empat dimensi dasar: keyakinan terhadap Tuhan (iman), pemikiran dan inovasi (cipta), perasaan sosial yang mendalam (rasa), serta kemauan untuk bertindak dan berkreasi (karsa). Keempat dimensi ini saling melengkapi dan menjadi dasar dari kebijakan dan norma sosial yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa.

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Masyarakat

Pancasila telah menjadi cara hidup atau *way of life* yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah melekat dalam budaya bangsa. Nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Pada tahun 1928, dalam Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia menegaskan persatuan dan tekad untuk hidup berdampingan dalam keberagaman yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, dalam proses perumusan dasar negara melalui BPUPKI dan PPKI, Pancasila dipilih sebagai ideologi yang akan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang diharapkan dapat mengakomodasi seluruh nilai tersebut.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia semakin memperlihatkan relevansinya dengan keberadaan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Pancasila memberikan landasan yang kokoh bagi kelestarian bangsa Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suyahmi (2020) dan Herdiawanto (2019), Pancasila menjadi pedoman utama dalam menjaga keharmonisan sosial dan politik di Indonesia. Kedua penulis ini menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar ideologi negara, tetapi juga prinsip hidup yang harus dihidupi oleh setiap individu dalam masyarakat untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai pandangan hidup menjadi alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pancasila juga digunakan oleh Soekarno dengan istilah *Weltanschauung* yang menggambarkan pandangan dunia bangsa Indonesia. Soekarno menyatakan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi, tetapi juga sebuah pandangan hidup yang mencakup seluruh dimensi kehidupan bangsa Indonesia.

Weltanschauung menurut Soekarno adalah cara pandang dunia yang bersifat kolektif, yang mencakup cara-cara bangsa Indonesia dalam melihat dan menanggapi permasalahan dunia secara utuh. Dalam pandangan ini, Pancasila menjadi panduan utama yang menciptakan harmoni antara individu dengan negara, dan antar sesama warga negara. Pakar-pakar tata negara seperti M. Mochtar (2017) mengemukakan bahwa istilah *Weltanschauung* digunakan oleh Soekarno untuk menunjukkan bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang mencakup seluruh aspek kehidupan, dari sosial, budaya, politik, hingga ekonomi. Melalui pandangan ini, Soekarno ingin menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya untuk dipahami secara teori, tetapi harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Norma Bangsa

Nilai merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang dijadikan pegangan dalam menentukan sikap dan perilaku. Nilai adalah sesuatu yang dianggap penting dan dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks negara, nilai-nilai ini tidak hanya bersifat individu tetapi juga mengatur hubungan antar warga negara, masyarakat, dan negara itu sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah panduan hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nilai-nilai tersebut diharapkan mampu menumbuhkan rasa persatuan dan keharmonisan antar sesama serta mengarahkan setiap kebijakan negara untuk mencapai tujuan negara yang mulia.

Pancasila mengandung nilai luhur yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang luhur dan mulia. Kaelan (2018) mengungkapkan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam, yang berfungsi untuk menciptakan keharmonisan dalam hubungan sosial dan politik. Selain itu, Pancasila juga mengajarkan pentingnya nilai gotong royong dan kebersamaan, yang menjadikan bangsa Indonesia lebih bersatu dalam keberagaman. Winarno (2023) menambahkan bahwa nilai-nilai Pancasila juga mengajarkan tentang pentingnya toleransi antar kelompok, menghargai perbedaan, serta mengedepankan kebajikan bersama. Nilai luhur bangsa ini tercermin dalam setiap sila Pancasila yang tidak hanya berlaku dalam konteks formal pemerintahan, tetapi juga sebagai pedoman kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia.



Gotong royong adalah cerminan nilai-nilai Pancasila - Shutterstock.com. 1886491735

Wasitaatmadja (2018) menyatakan bahwa Pancasila adalah nilai yang mendalam dan sarat dengan kebijaksanaan. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila mendorong terwujudnya negara yang adil dan makmur, berdasarkan pada prinsip keadilan sosial. Pancasila mengajarkan kita bahwa bangsa Indonesia harus menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya relevan dalam konteks ideologi negara, tetapi juga dalam membentuk karakter dan moralitas bangsa yang bersatu dalam keberagaman.

Adapun penjelasan tentang nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, mengandung nilai dasar tentang penghormatan terhadap agama dan kepercayaan. Nilai yang terkandung dalam sila ini mengajarkan bahwa kehidupan berbangsa harus didasarkan pada rasa hormat terhadap Tuhan dan agama yang diyakini oleh setiap individu. Sila ini mengedepankan pentingnya kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati oleh seluruh warga negara.
- b. Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, mengandung nilai tentang kemanusiaan yang mendalam, yang mendorong rasa keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai ini menuntut setiap individu untuk mengakui hak asasi manusia dan memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat, tanpa diskriminasi. Dalam kehidupan sosial, sila ini menjadi dasar bagi upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab, dengan menghargai hak-hak setiap orang.
- c. Sila ketiga “Persatuan Indonesia”, mengandung nilai persatuan, yang mengajarkan bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, seluruh elemen bangsa harus bersatu dalam satu kesatuan negara Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan dalam menghadapi perbedaan, serta mewujudkan solidaritas nasional demi kesejahteraan bersama.
- d. Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, mengandung nilai demokrasi, yang menuntut penerapan prinsip musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Nilai ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan berbangsa, keputusan harus diambil dengan melibatkan partisipasi aktif dari rakyat melalui lembaga perwakilan, yang dijalankan dengan kebijaksanaan dan tanggung jawab.
- e. Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ini mengajak kita untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, mengurangi ketimpangan sosial, dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang setara dalam segala aspek kehidupan.

Pancasila harus dihayati dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar dan arah dari segala aktivitas dalam segala bidang kehidupan manusia. Implementasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya terbatas pada tingkat formal pemerintahan, tetapi harus diterapkan dalam interaksi sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia diharapkan dapat hidup lebih harmonis, menghargai perbedaan, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan negara yang adil dan sejahtera. Pancasila sebagai pandangan hidup harus menjadi pedoman dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh individu, keluarga, masyarakat, dan negara.

Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa yang mengarahkan segala kebijakan dan tindakan dalam kehidupan bernegara. Wasitaatmadja (2018) mengungkapkan bahwa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mencakup dua peran utama:

- a. Pancasila berfungsi sebagai kerangka acuan yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Kerangka acuan ini memberikan dasar bagi penyelenggaraan negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila yang universal dan luhur.
- b. Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan potensi kemanusiaan, seperti kreativitas, rasa tanggung jawab sosial, dan semangat gotong royong. Pancasila mengajarkan bahwa setiap individu harus mengembangkan potensi diri dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama, demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Di sisi lain, Pitoyo (2012) mengungkapkan bahwa Pancasila memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kehidupan berbangsa. Berikut adalah peran dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa:

- a. Pancasila berfungsi sebagai ideologi negara yang menjadi dasar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia.
- b. Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa yang mengatasi perbedaan dan menjaga kerukunan antar sesama.
- c. Pancasila menjadi pedoman dalam mencari solusi damai terhadap konflik yang terjadi dalam masyarakat.
- d. Pancasila memberikan dasar moral dan etika bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan sosial.
- e. Pancasila mengarahkan bangsa Indonesia untuk selalu memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
- f. Pancasila berfungsi sebagai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengutamakan keadilan dan kemanusiaan.



Berperilaku santun merupakan implikasi dari penerapan Pancasila -Shutterstock.com.1778667248

Contoh Soal

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jelaskan dalam satu paragraf bagaimana Pancasila berperan sebagai pandangan hidup bagi setiap individu dan masyarakat Indonesia, dan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari!

Pembahasan:

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya berlaku dalam konteks politik dan hukum, tetapi juga sebagai pedoman dalam bertindak dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus dijadikan dasar dalam setiap perilaku dan keputusan pribadi. Misalnya, dalam keluarga, seseorang mengajarkan anak-anak untuk saling menghormati dan bekerja sama, yang mencerminkan nilai persatuan dan kemanusiaan. Dalam masyarakat, Pancasila mengajarkan pentingnya toleransi terhadap perbedaan dan menghargai hak setiap individu. Pancasila, dengan demikian, tidak hanya menjadi teori, tetapi pedoman yang memandu setiap tindakan dalam kehidupan sosial.

Fakta Unik Seputar Pancasila

Lambang Negara; Bendera Merah Putih

Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan pada 17 Agustus 1945, merupakan hasil karya Soegondo Djodjoespito dan anggota BPUPKI. Bendera ini dijahit oleh ibu-ibu anggota BPUPKI, termasuk istri Mohammad Hatta, di rumah Laksamana Maeda. Warna merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Bendera ini menjadi simbol kemerdekaan Indonesia setelah digunakan pada Proklamasi Kemerdekaan.



Bendera Merah Putih - Shutterstock.com.2404041539



3. Ideologi Negara yang Berlandaskan Pancasila

Definisi Ideologi

Ideologi berasal dari dua kata, yaitu "idea" yang berarti gagasan atau pemikiran, dan "logos" yang berarti ilmu atau ajaran. Secara terminologi, ideologi dapat dipahami sebagai suatu sistem gagasan atau ajaran yang berfungsi sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi berperan penting dalam membentuk pandangan dunia suatu bangsa dan negara, serta memberikan petunjuk dalam menentukan arah kebijakan dan tindakan yang harus diambil. Secara etimologis, ideologi adalah ilmu yang mempelajari ide atau gagasan yang memiliki peran dalam kehidupan manusia sebagai panduan atau pedoman dalam bertindak dan berinteraksi.

Antonie Destutt de Tracy, seorang filsuf asal Prancis, adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah "ideologi" pada abad ke-18. Menurut de Tracy, ideologi adalah ilmu tentang ide, yang bertujuan untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar dari sistem pemikiran yang membentuk masyarakat. Destutt de Tracy melihat ideologi sebagai upaya untuk mengembangkan cara berpikir yang rasional dan sistematis dalam memahami dan mengatur kehidupan sosial dan politik suatu bangsa. Dalam pengertian ini, ideologi berfungsi sebagai alat untuk membimbing keputusan-keputusan politik dan sosial.

a. Definisi ideologi berdasarkan para tokoh

Nurwandani (2016) dan Serevina (2016) menguraikan berbagai definisi ideologi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh.

- ▷ Karl Marx memandang ideologi sebagai sistem pemikiran yang digunakan oleh kelas penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya, yang menciptakan kesadaran palsu di kalangan rakyat.
- ▷ Louis Althusser melihat ideologi sebagai cara yang digunakan oleh negara untuk mempengaruhi dan membentuk pikiran individu dalam rangka melanggengkan sistem sosial.
- ▷ Herbert Marcuse berpendapat bahwa ideologi berfungsi sebagai sarana penindasan dengan mengalihkan perhatian rakyat dari masalah-masalah nyata.
- ▷ John Locke memandang ideologi sebagai sistem nilai yang mendasari hak-hak individu dan kebebasan yang menjadi dasar negara.
- ▷ Michel Foucault melihat ideologi sebagai struktur kekuasaan yang mempengaruhi cara individu berpikir dan bertindak dalam masyarakat.
- ▷ Antonio Gramsci mengemukakan bahwa ideologi berfungsi sebagai hegemoni budaya yang mendominasi pemikiran rakyat, yang kemudian mengarah pada perubahan sosial.

b. Definisi ideologi berdasarkan perannya

Selanjutnya, ideologi menurut Kaelan yang tertuang dalam Meliala (2022) dapat dijelaskan dalam empat poin sebagai berikut:

- ▷ Ideologi sebagai cita-cita negara yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat dalam kehidupan berbangsa.



Lambang sekaligus Ideologi Negara Indonesia (Pancasila)- Shutterstock.com.2464079535

- ▷ Ideologi sebagai alat penggerak dalam mengarahkan kebijakan negara dan kehidupan sosial untuk mencapai tujuan bersama.
- ▷ Ideologi bersifat futuristik yang menjadi gambaran ideal masa depan yang hendak dituju, sehingga menjadi gagasan yang mengakar serta diperjuangkan dalam kehidupan berbangsa.
- ▷ Ideologi memiliki kecenderungan untuk menentukan karakteristik kelompok masyarakat sehingga ideologi menjadi penentu identitas suatu bangsa.

Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Setelah disahkan, Pancasila bukan hanya berfungsi sebagai simbol, tetapi juga sebagai ideologi yang mengatur seluruh sistem ketatanegaraan dan kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara mencakup nilai-nilai universal yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan menciptakan inklusi sosial, yang menyatukan keberagaman dalam satu kesatuan bangsa. Oleh karena itu, Pancasila berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk, dengan memanfaatkan keberagaman untuk memperkaya kehidupan bersama.

Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memandu setiap kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan negara. Ketetapan ini menggarisbawahi kedudukan Pancasila sebagai ideologi yang menyatukan seluruh komponen bangsa dan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan negara. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya menjadi fondasi hukum tetapi juga ideologi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.



*Ir. Muhammad Hatta menegaskan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang orisinal -
wikimedia.com*

Pancasila sebagai dasar negara yang diatur dalam Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 juga mengandung makna bahwa Pancasila merupakan ideologi nasional. Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan arah dalam setiap kebijakan negara dan menjamin keberlangsungan nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi pedoman hukum, tetapi juga pedoman hidup bagi setiap warga negara Indonesia, yang menjadikan negara ini sebagai negara yang berdaulat, berkeadilan sosial, dan menciptakan kesejahteraan rakyat.

Dalam pendekatan akademis, Pancasila sebagai ideologi negara telah banyak dibahas oleh para ilmuwan, seperti Pranarka (1985) dan Muhammad Hatta (1960). Pranarka menjelaskan bahwa Pancasila adalah ideologi yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia dan berkembang melalui proses panjang yang berakar pada sejarah, tradisi, dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Muhammad Hatta mengemukakan bahwa Pancasila adalah ideologi yang orisinal dan tidak mengadopsi ideologi dari luar, karena Pancasila lahir dari pemikiran bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan budaya yang ada di masyarakat.

a. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila dapat dipahami sebagai ideologi terbuka yang memiliki ciri utama berikut:

- ▷ **Kemampuan untuk menerima perubahan.** Pancasila dapat berkembang seiring dengan perubahan zaman, namun tetap menjaga prinsip-prinsip dasarnya.
- ▷ **Memfasilitasi partisipasi rakyat.** Pancasila mendorong partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan negara.

- ▷ **Mengakomodasi keberagaman.** Pancasila memberikan ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan negara dengan prinsip kesatuan.
- ▷ **Bersifat adaptif.** Pancasila dapat beradaptasi dengan perkembangan globalisasi dan tantangan zaman, tanpa kehilangan nilai dasarnya.
- ▷ **Menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.** Pancasila tetap mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam setiap kebijakan negara.

Franz Magnis-Suseno (2001) menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka, yang tidak kaku, tetapi fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Pancasila mengajarkan bahwa suatu ideologi harus mampu menyelaraskan nilai-nilai dasar dengan kebutuhan zaman tanpa mengorbankan esensi ideologi itu sendiri.

Pancasila bukan diciptakan, melainkan dirumuskan melalui proses panjang penghayatan hidup yang berbasis pada kearifan budaya masyarakat Indonesia. Proses ini sejalan dengan ciri-ciri ideologi terbuka, yang memberikan ruang bagi perkembangan nilai-nilai baru dalam kerangka ideologi yang ada. Nilai-nilai dalam Pancasila bersifat abstrak dan mendasar, sehingga Pancasila bersifat universal dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Nilai dasar Pancasila mengandung asas-asas yang bersifat mutlak, yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, yang tidak dapat diubah begitu saja oleh kondisi apapun.

Pancasila juga memiliki nilai instrumental, yang berarti bahwa nilai-nilai Pancasila diterjemahkan dalam bentuk kebijakan, hukum, dan tindakan yang praktis dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai instrumental ini memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila tidak hanya berada dalam wacana teoritis, tetapi juga tercermin dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.

b. Sifat Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

- ▷ **Pancasila memiliki dimensi realitas** yang mengharuskan ideologi ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila berfungsi sebagai alat untuk melihat dan mengatasi berbagai masalah sosial dan politik yang dihadapi bangsa Indonesia.
- ▷ **Pancasila juga memiliki dimensi idealitas** yang memberikan visi dan harapan bagi bangsa Indonesia, di mana cita-cita luhur bangsa dapat diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai Pancasila.
- ▷ **Pancasila menunjukkan fleksibilitas** dalam menanggapi tantangan zaman, memungkinkan untuk penyesuaian dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik tanpa mengubah prinsip-prinsip dasarnya.

Contoh Soal

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki ciri-ciri yang membedakannya dari ideologi lain. Sebutkan dua ciri utama Pancasila sebagai ideologi nasional dan jelaskan bagaimana kedua ciri tersebut mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia!

Pembahasan:

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki dua ciri utama yang mendalam, yaitu:

1. Pancasila sebagai ideologi terbuka

Pancasila memiliki karakteristik terbuka karena ia dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Pancasila mengakomodasi kebutuhan zaman dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip pokok yang tidak bisa diubah, seperti ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk menghadapi tantangan zaman, seperti globalisasi, sambil tetap menjaga identitas nasionalnya.

2. Pancasila sebagai ideologi yang orisinal

Pancasila adalah ideologi yang lahir dari pemikiran dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri, yang dihasilkan melalui proses panjang yang mempertimbangkan kearifan budaya, sejarah, dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila bukan hasil adopsi dari ideologi luar negeri, melainkan ideologi yang terbentuk dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila menjadi ideologi yang benar-benar mencerminkan identitas dan cita-cita bangsa Indonesia, serta dapat dipertahankan dan dikembangkan sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia.

Fakta Unik Seputar Pancasila

Teks Pidato Sukarno 1 Juni 1945 (Sidang BPUPKI)

Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan lima prinsip yang harus menjadi dasar negara Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Berikut adalah kutipan penting dari pidato tersebut:

"Saudara-saudara sekalian, kita sekarang ini, sedang membicarakan dasar negara kita. Apa dasar negara Indonesia merdeka ini? Saya mengajukan lima pokok pikiran, yang saya sebut sebagai Pancasila. Lima pokok pikiran itu adalah:

Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bahwa bangsa Indonesia yang merdeka ini haruslah mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, kita menginginkan sebuah negara yang mengutamakan kemanusiaan, menghargai hak asasi setiap manusia, dan berlaku adil bagi semua.

Persatuan Indonesia, yang menegaskan pentingnya persatuan seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, untuk memperkuat negara ini.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimana sistem pemerintahan yang kita inginkan adalah demokrasi yang dijalankan melalui musyawarah untuk mufakat.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mencerminkan pentingnya kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa ada yang tertinggal atau terpinggirkan."

Pidato ini menggugah semangat nasionalisme dan menjadi tonggak awal pembentukan negara Indonesia dengan Pancasila sebagai dasarnya. Pada akhir pidato, Soekarno menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar yang dapat diterima oleh semua golongan di Indonesia, yang mencerminkan semangat kebersamaan dan toleransi.



4. Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan

Pengamalan Pancasila dapat dilihat dari dua perspektif utama, yaitu sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan pedoman dalam penyelenggaraan negara, memastikan bahwa segala keputusan yang diambil pemerintah tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pemerhati tata negara, seperti Kaelan (2018), menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah fondasi yang mengarahkan semua kebijakan negara ke arah keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Melalui Pancasila, negara Indonesia diharapkan dapat menciptakan sistem yang adil dan sejahtera, menghargai keberagaman, dan memelihara persatuan bangsa.

Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan arah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam bidang politik dan hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila mengajarkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan, yang harus dijadikan acuan dalam setiap tindakan sosial. Menurut Winarno (2023), Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai yang memandu perilaku dan interaksi antar individu dan kelompok, serta memberikan arah yang jelas bagi pengembangan masyarakat Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera. Pancasila sebagai pandangan hidup berperan dalam mempererat hubungan sosial, menjaga solidaritas, dan mewujudkan tujuan bersama untuk kesejahteraan.

Selain itu, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga berfungsi sebagai dasar untuk membangun karakter bangsa. Nilai-nilai Pancasila harus diinternalisasi sejak dini, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pancasila tidak hanya mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, tetapi juga memberikan pedoman tentang cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Darji Darmodiharjo (2023), pengamalan Pancasila dalam kehidupan pribadi dan sosial adalah langkah utama untuk membentuk individu yang bertanggung jawab dan beretika dalam kehidupan sosial, yang pada gilirannya dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Pengamalan Pancasila dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memegang peranan penting dalam proses pembentukan karakter anak. Keluarga adalah tempat pertama di mana nilai-nilai Pancasila ditanamkan dan dipraktikkan. Dalam keluarga, anak belajar tentang nilai ketuhanan, keadilan, kemanusiaan, dan persatuan yang akan membimbing mereka dalam menjalani kehidupan sosial. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila dalam keluarga sangat penting untuk menciptakan generasi yang memahami dan menghargai nilai-nilai luhur bangsa.

Di sisi lain, sekolah juga merupakan tempat yang sangat strategis untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendidikan, pembimbingan, dan pembentukan karakter, sekolah membentuk pribadi-pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam nilai moral dan sosial. Sekolah merupakan tempat yang baik untuk membiasakan budaya positif, seperti kerja sama dan saling menghormati. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kegiatan sekolah, siswa akan lebih mudah menginternalisasi nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.



Terowongan Silaturrahim menjadi simbol kerukunan antar umat beragama - Shutterstock.com.2576282195

Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah unit sosial yang paling kecil dalam masyarakat, yang juga berfungsi sebagai cermin dari kehidupan berbangsa. Menurut J. Locke (1963), keluarga merupakan tempat pertama bagi individu untuk belajar mengenai kehidupan sosial dan politik. Al-Mawardi juga menyatakan bahwa keluarga adalah sebuah miniatur negara, di mana terdapat hubungan timbal balik antar anggota yang berperan dalam pembentukan karakter anak. Keluarga, sebagai subsistem kehidupan negara, memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam diri anak sejak usia dini. Keluarga adalah tempat yang tepat untuk memulai pengamalan nilai Pancasila karena anak-anak pertama kali mengenal dunia sosialnya di sini.

Anak-anak akan tumbuh berkembang, baik secara fisik maupun kepribadian, di dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, keluarga adalah tempat yang baik untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Melalui tindakan-tindakan sehari-hari, seperti kasih sayang, perhatian, dan pengajaran nilai moral, orang tua dapat memberikan contoh nyata dari nilai-nilai Pancasila. Ini memberikan kesempatan yang sangat baik bagi anak untuk membentuk karakter dan sikap positif yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh integrasi nilai-nilai Pancasila yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga:

- a. Menyampaikan ajaran agama dengan penuh kasih sayang dan tanpa paksaan
- b. Menghargai pendapat setiap anggota keluarga
- c. Menjaga keharmonisan dalam keluarga melalui komunikasi yang baik
- d. Mengajarkan nilai kerjasama dalam menyelesaikan tugas keluarga
- e. Mendidik anak untuk berperilaku jujur dan adil
- f. Menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui cerita sejarah keluarga
- g. Membimbing anak untuk selalu mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama
- h. Mengajak anggota keluarga untuk melakukan kegiatan sosial di masyarakat
- i. Menghormati perbedaan dalam keluarga, baik suku, agama, dan pendapat
- j. Memberikan teladan dalam berperilaku adil dan bertanggung jawab

Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Sekolah

Sekolah adalah tempat yang strategis untuk pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila karena sekolah merupakan institusi yang membentuk karakter siswa selain di rumah. Pendidikan di sekolah tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan akademik, tetapi juga untuk membentuk kepribadian siswa yang berkualitas dan berlandaskan pada nilai-nilai moral. Dalam proses pendidikan ini, pengamalan Pancasila dilakukan melalui pembelajaran yang mengajarkan tentang pentingnya persatuan, keadilan, dan toleransi, serta melalui pembimbingan yang dilakukan oleh para guru. Sekolah juga membentuk sikap-sikap baik, seperti kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan siswa sehari-hari.

Sekolah adalah tempat yang baik untuk membiasakan budaya positif, yang nantinya dapat membawa dampak baik bagi masyarakat. Misalnya, melalui kegiatan gotong royong, kerja sama, dan penghargaan terhadap perbedaan, sekolah memberikan contoh nyata dari pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sosial.



Interaksi di sekolah menjadi wadah pembentukan kepribadian siswa - Shutterstock.com.2510213829

Manfaat dari kegiatan ini adalah terbentuknya karakter siswa yang lebih peduli terhadap sesama, menghargai keragaman, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dengan adanya pengamalan Pancasila di sekolah, siswa diharapkan dapat menjadi individu yang tidak hanya berkompeten secara akademik, tetapi juga berintegritas tinggi dalam kehidupan sosial.

Contoh integrasi nilai-nilai Pancasila yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah:

- a. Menumbuhkan rasa persatuan melalui kegiatan olahraga dan seni
- b. Mengajarkan keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa
- c. Mengadakan kegiatan sosial bersama untuk menumbuhkan rasa kepedulian
- d. Membiasakan siswa untuk menghargai pendapat dan perbedaan
- e. Menanamkan nilai disiplin dengan menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah
- f. Menumbuhkan rasa saling menghormati antara guru dan siswa
- g. Menyusun kegiatan yang mendorong siswa untuk bekerja sama dalam tim
- h. Melakukan diskusi kelas tentang nilai-nilai kebangsaan
- i. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan
- j. Menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua siswa merasa diterima

Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, masyarakat merupakan tempat di mana pengamalan nilai-nilai Pancasila juga harus dilaksanakan. Pengamalan nilai Pancasila dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada hubungan antar individu, tetapi juga mencakup bagaimana masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, nilai Pancasila mengajarkan pentingnya persatuan, kerjasama, dan saling menghormati antar individu dalam masyarakat. Masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila akan menciptakan lingkungan yang adil, makmur, dan harmonis.

Contoh integrasi nilai Pancasila yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat:

- a. Mengadakan kegiatan gotong royong untuk kepentingan bersama
- b. Menghargai perbedaan agama dan budaya di lingkungan sekitar
- c. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan masalah bersama
- d. Membantu sesama dalam kebutuhan sosial, seperti bencana alam atau kesulitan ekonomi
- e. Menumbuhkan semangat nasionalisme melalui kegiatan yang melibatkan semua warga negara
- f. Menerima dan menghargai keberagaman dalam setiap interaksi sosial
- g. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan bersama-sama
- h. Mengutamakan keadilan dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat
- i. Mendorong pembentukan komunitas yang mendukung kesejahteraan bersama
- j. Menumbuhkan kepedulian sosial dengan melakukan kegiatan amal atau bakti sosial

Contoh Soal

Pengamalan Pancasila tidak hanya terjadi dalam konteks kenegaraan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang warga negara Indonesia, bagaimana Anda mengamalkan nilai-nilai

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkret penerapan dua nilai utama Pancasila, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial!

Pembahasan:

Sebagai seorang warga negara Indonesia, saya dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan cara:

1. Mengamalkan nilai persatuan dan kerakyatan di lingkungan keluarga

Dalam keluarga, saya mengajarkan pentingnya bekerja sama, saling menghargai, dan mendengarkan pendapat anggota keluarga lainnya, yang mencerminkan nilai sila ketiga dan keempat dalam Pancasila. Ini membantu membangun hubungan yang harmonis dan memperkuat ikatan keluarga.

2. Menghargai perbedaan dan menciptakan keadilan di masyarakat

Di lingkungan masyarakat, saya mengamalkan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan dengan ikut serta dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, membantu sesama, dan memperjuangkan hak-hak yang adil bagi semua warga. Hal ini mencerminkan nilai sila kedua dan kelima dalam Pancasila, yang berfokus pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Fakta Unik Seputar Pancasila

Panitia Sembilan

Panitia Sembilan adalah kelompok yang dibentuk oleh BPUPKI pada 22 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Mereka menghasilkan Piagam Jakarta, yang menjadi cikal bakal Pancasila. Anggota Panitia Sembilan terdiri dari sembilan tokoh penting, termasuk Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Piagam Jakarta, meskipun mengalami perubahan, menjadi dasar dari Pancasila yang kini dikenal sebagai ideologi negara Indonesia.



Panitia Sembilan terdiri dari sembilan tokoh penting yang mewakili berbagai golongan:

1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
3. Mr. Muhammad Yamin
4. A.A. Maramis
5. Achmad Soebarjo
6. H. Agus Salim
7. K.H. Wahid Hasyim
8. Abdul Kahar Muzakir
9. R. Abikusno Tjokrosjojoso

- [wikimedia.com](https://id.wikipedia.org/wiki/Panitia_Sembilan)

Rangkuman

1. Pancasila sebagai Dasar Negara

- ▷ Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI.
- ▷ Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945.
- ▷ Fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara: sebagai sumber hukum negara dan pedoman hidup berbangsa.
- ▷ Pancasila menjamin keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara.

2. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

- ▷ Pancasila menjadi pandangan hidup yang membimbing kehidupan pribadi dan sosial bangsa Indonesia.
- ▷ Pancasila mengajarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
- ▷ Pancasila tidak hanya berlaku dalam konteks politik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pancasila sebagai Ideologi Negara

- ▷ Pancasila sebagai ideologi negara memiliki ciri ideologi terbuka dan orisinal.
- ▷ Pancasila dapat berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya.
- ▷ Pancasila adalah ideologi yang terlahir dari budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia.
- ▷ Pancasila menjadi landasan bagi UUD 1945 dan seluruh sistem hukum negara Indonesia.

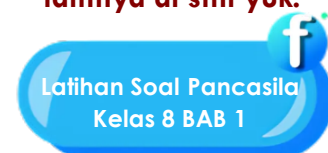
4. Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan

- ▷ Pengamalan Pancasila dapat dilakukan dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
- ▷ Dalam keluarga, Pancasila diajarkan melalui tindakan saling menghormati, keadilan, dan kebersamaan.
- ▷ Sekolah sebagai tempat untuk membentuk karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
- ▷ Masyarakat menjadi tempat pengamalan Pancasila dengan menjaga persatuan, keadilan sosial, dan gotong royong.

Latihan Soal

1. Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal...
 - A. 17 Agustus 1945
 - B. 1 Juni 1945
 - C. 18 Agustus 1945
 - D. 28 Oktober 1928
2. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang memberikan arah dan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi ini dikenal dengan istilah...
 - A. Sumber hukum negara
 - B. Pandangan hidup bangsa
 - C. Ideologi terbuka
 - D. Pedoman hidup
3. Pancasila menjadi dasar negara yang disahkan pada tanggal...
 - A. 17 Agustus 1945
 - B. 18 Agustus 1945
 - C. 1 Juni 1945
 - D. 28 Oktober 1928
4. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki ciri-ciri salah satunya, yaitu...
 - A. Ideologi yang dapat berkembang tanpa mengubah nilai dasarnya
 - B. Ideologi yang berasal dari luar negeri
 - C. Ideologi yang bersifat tertutup
 - D. Ideologi yang tidak dapat disesuaikan dengan perubahan zaman
5. Dalam konteks pengamalan Pancasila, yang dimaksud dengan "Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa" adalah...
 - A. Pancasila hanya diterapkan dalam pemerintahan
 - B. Pancasila hanya sebagai simbol negara
 - C. Pancasila mengatur hubungan antar negara
 - D. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari
6. Pancasila pertama kali dirumuskan dengan lima prinsip, salah satunya adalah nilai ketuhanan yang tercermin dalam sila...
 - A. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - C. Persatuan Indonesia
 - D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
7. Pengamalan Pancasila dalam keluarga dapat dilakukan dengan cara...
 - A. Mengutamakan kekuasaan orang tua
 - B. Mengajarkan kerja sama, saling menghormati, dan keadilan di dalam rumah tangga
 - C. Menjaga jarak antara anggota keluarga
 - D. Menghindari diskusi antar anggota keluarga

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

- Darmodiharjo, D. (2023). Pancasila sebagai ideologi negara: Perspektif ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Pustaka Cendekia.
- Kaelan, J. (2018). Pancasila: Filosofi dan ideologi bangsa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Krisnayuda, A. (2017). Pancasila dalam konteks globalisasi. Surabaya: Pustaka Ilmu.
- Meliala, A. (2022). Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Mochtar, M. (2017). Pancasila dan pluralisme: Menjaga persatuan dalam keberagaman. Bandung: Mizan.
- Nurwandani, T. (2016). Pengertian ideologi menurut para tokoh. *Jurnal Ilmu Sosial*, 12(3), 25-32.
- Serevina, S. (2016). Ideologi dan negara: Sebuah kajian teori. *Jurnal Tata Negara*, 15(2), 101-110.
- Suseno, F. M. (2001). Pancasila sebagai ideologi terbuka: Refleksi atas masa depan Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Winarno, D. (2023). Pancasila dan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa. Jakarta: Kompas.



BAB 2: PANDUAN DASAR NEGARA KITA

Karakter Pelajar Pancasila

- ▷ **Bergotong royong**
Mampu bekerja sama memahami proses lahirnya UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
- ▷ **Bernalar kritis**
Menganalisis fungsi dan kedudukan UUD 1945 dalam menjaga persatuan bangsa.
- ▷ **Kreatif**
Mengembangkan sikap sesuai nilai UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Konstitusi, UUD NRI Tahun 1945, Dasar Hukum, Sejarah Perumusan, Fungsi UUD, Persatuan Bangsa, Nilai-Nilai UUD, Aktivitas Sehari-hari.

Tujuan Pembelajaran: Menelaah peran dan nilai Pancasila

- 1. Menguraikan makna UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia**
 - ▷ Memahami kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi.
 - ▷ Menyadari pentingnya UUD NRI Tahun 1945 sebagai pedoman negara.
- 2. Menjelaskan tahapan perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia oleh para tokoh pendiri bangsa**
 - ▷ Mengurai latar belakang sejarah pembentukan UUD NRI tahun 1945.
 - ▷ Memahami tahapan penting dalam proses pembentukan UUD NRI tahun 1945.
- 3. Memahami peran UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara**
 - ▷ Menganalisis fungsi UUD NRI tahun 1945 sebagai landasan pelaksanaan negara.
 - ▷ Mengidentifikasi kedudukan UUD NRI tahun 1945 dalam menjaga persatuan.

4. Memahami dan menerapkan perilaku berdasarkan pemahaman UUD NRI tahun 1945 dalam aktivitas sehari-hari

- ▷ Mengintegrasikan nilai-nilai UUD NRI tahun 1945 dalam aktivitas sehari-hari.
- ▷ Mengembangkan perilaku yang sesuai dengan nilai UUD NRI tahun 1945.



F I T R I



1. Perumusan dan Penetapan UUD NRI Tahun 1945

Definisi Konstitusi

Konstitusi, dalam konteks sejarah, berasal dari bahasa latin *constitutio*, yang berarti penetapan atau keputusan yang mengatur suatu sistem pemerintahan. Pengertian konstitusi telah berkembang seiring waktu dan teori. Menurut **Carl J. Friedrich**, konstitusi adalah sebuah dokumen yang menyusun struktur dan prosedur yang mendasari pemerintahan. Sementara itu, dalam pandangan ahli hukum Yunani kuno, konstitusi dipahami sebagai prinsip-prinsip dasar yang mengatur cara pemerintahan berjalan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini mencerminkan adanya ketetapan yang mengatur hak-hak dasar serta hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Lebih lanjut, konstitusi dalam ilmu hukum merupakan seperangkat aturan atau dokumen hukum yang merancang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Dalam konstitusionalisme, konstitusi memiliki peran penting sebagai dasar hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana dijelaskan oleh Sulaiman (2019), konstitusionalisme bukan hanya mengenai dokumen tertulis, tetapi juga mengenai prinsip bahwa segala tindakan pemerintah harus sesuai dengan aturan dasar yang ada dalam konstitusi. Pendapat Herdiwanto (2019) juga mendukung pemahaman bahwa konstitusionalisme menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui aturan-aturan dalam konstitusi.

Penggunaan istilah "konstitusi" sering kali identik dengan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai hukum dasar yang menyusun kerangka negara. **K. C. Wheare** dalam pandangannya, seperti yang dikutip oleh Harman (2013), menegaskan bahwa konstitusi merupakan dokumen atau kumpulan aturan yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak dasar warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dalam hal ini, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia menjadi pedoman yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam ketatanegaraan, terdapat dua jenis konstitusi yang perlu dipahami, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Kedua jenis konstitusi ini memainkan peran penting dalam pembentukan sistem pemerintahan dan pengaturan hak-hak dasar dalam negara.

a. Hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar (UUD)

Hukum dasar tertulis, seperti UUD, adalah dokumen yang secara eksplisit mengatur dan merinci hak-hak dasar serta struktur pemerintahan negara. UUD ini menjadi dasar hukum yang mengikat seluruh elemen pemerintahan dan warga negara, serta memberikan aturan yang jelas tentang bagaimana negara dan pemerintah harus dijalankan.

b. Hukum dasar tidak tertulis atau konvensi (*convention*)



Pidato Kenegaraan Presiden RI termasuk hukum dasar tidak tertulis - gusdurian.net

Berbeda dengan hukum dasar tertulis, hukum dasar tidak tertulis atau konvensi merujuk pada kebiasaan atau praktik yang telah diterima oleh masyarakat dan pemerintahan sebagai bagian dari tata kelola negara. Meskipun tidak tercatat dalam dokumen hukum formal, konvensi ini memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan.

Ferdinand Lassalle menyatakan bahwa konstitusi lebih dari sekadar undang-undang dasar atau UUD. Konstitusi, menurutnya, mencerminkan kenyataan sosial dan politik yang hidup dalam masyarakat, yang mencakup nilai, kebiasaan, dan norma yang ada. Pandangan ini menguatkan pemahaman bahwa konstitusi tidak hanya berupa teks tertulis, tetapi juga mencakup realitas sosial yang berlaku dalam masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyarto (2020), Lassalle menekankan bahwa konstitusi adalah gambaran dari hubungan kekuasaan yang terjadi di dalam masyarakat, dan hal ini melampaui sekadar aturan formal dalam UUD.

Sementara itu, terdapat tiga arti konstitusi menurut **Herman Heller**, yaitu:

a. Konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan

Heller melihat konstitusi sebagai representasi dari kondisi politik yang nyata dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa konstitusi seharusnya mencerminkan keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang ada, dan bukan hanya sebagai dokumen yang bersifat teoritis.

b. Konstitusi adalah kumpulan aturan dasar masyarakat

Heller juga berpendapat bahwa konstitusi merupakan kumpulan aturan dasar yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi memberikan pedoman bagi individu maupun kelompok dalam berinteraksi dalam negara.

c. Konstitusi merupakan kesepakatan yang ditulis dalam suatu naskah

Selain itu, Heller menganggap konstitusi juga sebagai dokumen yang merumuskan kesepakatan dasar antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan negara, yang dituangkan dalam suatu naskah hukum yang resmi.



Magna Carta 1215, naskah konstitusi negara-negara modern - Shutterstock.com.185480369

Menurut **James Bryce** dan **C. F. Strong**, konstitusi adalah suatu sistem hukum yang terdiri dari aturan yang mengatur negara dan masyarakat secara keseluruhan. Definisi ini menunjukkan bahwa konstitusi adalah sistem yang menyatukan berbagai elemen dalam negara untuk mencapai tujuan bersama. Bagi mereka, konstitusi mencakup peraturan yang merumuskan struktur pemerintahan dan hak-hak individu, sehingga menciptakan keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan warga negara.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tentang konstitusi menurut **Herman Heller**, **Ferdinand Lassalle**, **C. F. Strong**, dan **James Bryce** adalah bahwa meskipun ada perbedaan pandangan mengenai definisi konstitusi, secara umum konstitusi dapat dipahami sebagai dasar hukum yang mengatur negara dan masyarakat. Heller dan Lassalle memandang konstitusi sebagai lebih dari sekadar teks tertulis, tetapi juga sebagai cerminan realitas politik dan sosial dalam masyarakat. Sebaliknya, Strong dan Bryce melihat konstitusi sebagai sistem hukum yang menyusun negara dan hak-hak individu.

Konstitusi diurai dalam 3 unsur merujuk **Savornim Lohman**, yakni sebagai berikut:

a. Konstitusi sebagai perjanjian masyarakat

Konstitusi berfungsi sebagai kesepakatan antara warga negara untuk membentuk dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, konstitusi berperan sebagai perjanjian sosial yang mengikat seluruh elemen masyarakat.

b. Konstitusi sebagai jaminan HAM

Konstitusi juga bertindak sebagai jaminan bagi hak asasi manusia, dengan menjamin kebebasan dan perlindungan hak-hak dasar individu dalam masyarakat. Hal ini menjadikan konstitusi sebagai instrumen penting untuk memastikan hak-hak setiap warga negara terlindungi.

c. Konstitusi sebagai kerangka pemerintahan

Konstitusi memberikan struktur dan aturan dasar mengenai bagaimana pemerintahan negara dijalankan, serta membagi kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Ini berfungsi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang stabil dan teratur.

Menurut **Jimly Asshiddiqie** (2010), tujuan utama konstitusi adalah untuk menyediakan tingkatan hukum tertinggi yang dapat menjaga keberlanjutan negara. Tujuan utama konstitusi diwujudkan dalam beberapa hal, seperti:

a. Menghadirkan keadilan (*justice*)

Konstitusi bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat dengan menjamin hak-hak mereka dan memastikan pemerintahan yang adil.

b. Memberi ketertiban (*order*)

Konstitusi berfungsi untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat dan negara, dengan memberikan aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap pihak.

c. Mewujudkan nilai-nilai yang diharapkan

Konstitusi juga bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara, seperti persatuan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Adapun tujuan konstitusi menurut **Maurice Hauriou** adalah untuk menciptakan sistem hukum yang dapat menjaga stabilitas dan keberlanjutan negara, serta menciptakan tatanan yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Penyusunan UUD NRI Tahun 1945

Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dimulai pada masa penjajahan Jepang, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945, dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) oleh pemerintah Jepang. BPUPKI berperan penting dalam merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah melalui berbagai pertemuan dan diskusi, BPUPKI akhirnya berhasil merumuskan rancangan UUD yang akan menjadi dasar hukum bagi negara Indonesia yang baru merdeka. Proses tersebut melibatkan tiga kelompok panitia penting yang memiliki peran strategis dalam merumuskan UUD 1945, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembelaan Tanah Air, dan Panitia Keuangan dan Ekonomi.



*Radjiman Wedyodiningrat,
Ketua BPUPKI Indonesia -
IKPNI.or.id*

a. Panitia Hukum Dasar

Panitia Hukum Dasar adalah panitia yang memiliki tugas utama merumuskan dasar hukum negara Indonesia yang baru merdeka.

Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam panitia ini antara lain Soekarno, Mohammad Hatta, Radjiman Wedyodiningrat, dan Soepomo. Mereka adalah tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan UUD, dengan Soekarno dan Hatta sebagai dua tokoh utama yang memimpin jalannya perumusan. Panitia ini juga menyusun pembukaan UUD yang sangat penting sebagai bagian pertama dari konstitusi Indonesia, yang menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia.

b. Panitia Pembelaan Tanah Air

Panitia Pembelaan Tanah Air memiliki tugas untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pertahanan dan pembelaan negara Indonesia yang baru merdeka. Beberapa tokoh yang terlibat dalam panitia ini antara lain A. W. S. Mallarangeng, Soetardjo Kartohadikusumo, dan M. S. Palar. Mereka mengusahakan agar negara Indonesia bisa berdiri kokoh dan mempertahankan kemerdekaannya. Pada rapat-rapatnya, panitia ini banyak membahas tentang perlunya pembentukan sistem pertahanan yang kuat dan mekanisme yang dapat melindungi negara dari ancaman eksternal.

c. Panitia Keuangan dan Ekonomi

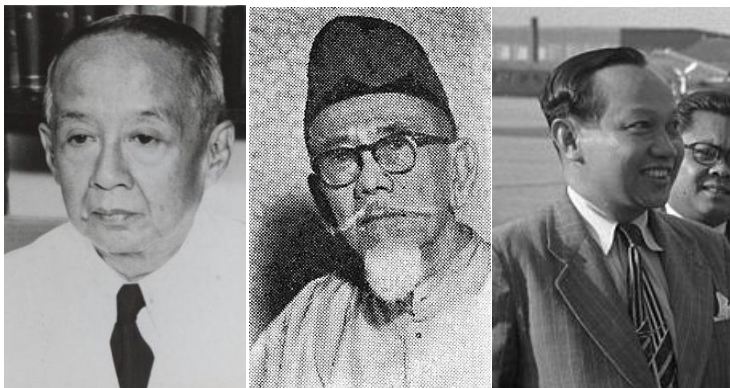
Panitia Keuangan dan Ekonomi bertugas untuk menyusun dan merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara dan kebijakan ekonomi dalam negara yang baru merdeka. Di antara tokoh yang terlibat dalam panitia ini adalah Mohammad Hatta, yang berperan besar dalam mempersiapkan aspek ekonomi negara. Mereka merancang sistem perekonomian yang akan mengatur keuangan negara dan memastikan kelangsungan ekonomi Indonesia pada masa depan. Salah satu hasil dari panitia ini adalah pengusulan sistem ekonomi yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan keadilan sosial.

Pada petang hari tanggal 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar menghasilkan dua keputusan penting yang sangat berpengaruh terhadap jalannya perumusan UUD 1945.

- a. Pengesahan Pembukaan UUD: Pembukaan UUD 1945 disepakati sebagai landasan ideologis bagi negara Indonesia, yang menekankan pada cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti kemerdekaan, keadilan sosial, dan persatuan.
- b. Penentuan Sistem Negara: Panitia memutuskan bahwa Indonesia akan memiliki sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip kekeluargaan dan musyawarah, yang dikenal dengan istilah "Sistem Negara Kekeluargaan".

Soepomo, dalam rapat-rapat Panitia Hukum Dasar, mengusulkan sistem negara yang berdasarkan pada prinsip kekeluargaan, yang dikenal dengan sebutan "Sistem Negara Kekeluargaan". Menurutnya, negara Indonesia harus memiliki suatu sistem pemerintahan yang menekankan pada musyawarah dan mufakat, dengan tujuan untuk menjaga kesatuan dan keharmonisan antara rakyat dan negara. Hal ini dianggap sebagai wujud kebudayaan Indonesia yang mengutamakan kebersamaan dan keadilan sosial.

Setelahnya, pada 13 Juli 1945, dibentuk Panitia Penghalus Bahasa yang bertugas untuk memeriksa dan menyempurnakan penggunaan bahasa dalam rancangan UUD 1945. Tujuan dari pembentukan panitia ini adalah untuk memastikan agar bahasa yang digunakan dalam dokumen UUD jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan semangat kemerdekaan Indonesia. Panitia ini terdiri dari tokoh-tokoh seperti Hoesein Djajadiningrat, H. Agoes Salim, dan Soepomo yang berperan dalam memperhalus redaksi dan kata-kata dalam rancangan konstitusi.



Panitia Penghalus Bahasa: (dari kiri ke kanan) Hoesein Djajadiningrat, H. Agoes Salim, dan Dr. Soepomo - Wikimedia.com

Laporan hasil kerja Panitia Hukum Dasar disampaikan pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, yang mencakup tiga hal utama:

a. Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan)

Pembacaan deklarasi kemerdekaan yang menegaskan kemerdekaan Indonesia yang tidak tergantung pada penjajah.

b. Rancangan Pembukaan UUD

Pembukaan UUD 1945 yang disusun berdasarkan cita-cita bangsa Indonesia, yang menekankan pada kemerdekaan dan keadilan sosial.

c. Rancangan Batang Tubuh UUD

Rancangan batang tubuh UUD yang terdiri dari 42 pasal yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, serta pembagian kekuasaan antara lembaga negara.

Pada 15 Juli 1945, sidang BPUPKI membahas lebih lanjut mengenai rancangan UUD yang sudah disusun. Proses sidang ini diwarnai oleh diskusi-diskusi mendalam mengenai bentuk dan struktur negara Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Muhshi (2015), sidang pada tanggal ini menunjukkan adanya konsensus yang semakin kuat di antara anggota BPUPKI tentang bentuk negara dan pemerintahan Indonesia yang diinginkan. Pada akhir sidang, Soekarno menyampaikan pernyataan yang menegaskan pentingnya konstitusi sebagai dasar negara yang akan menuntun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

“Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Kita rancangkan undang-undang dasar dengan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan individu. Kedaulatan rakyat sekali lagi, dan bukan kedaulatan individu. Inilah menurut paham Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, satu-satunya jaminan bahwa bangsa Indonesia seluruhnya akan selamat di kemudian hari. Jikalau paham kita ini pun dipakai oleh bangsa-bangsa lain, itu akan memberi jaminan akan perdamaian dunia yang kekal dan abadi.”

Pada sidang tanggal 16 Juli 1945, dilakukan beberapa perubahan terhadap rancangan UUD yang telah dibahas sebelumnya. Setelah beberapa penyesuaian, akhirnya oleh ketua sidang, Radjiman Wedyodiningrat, rancangan tersebut disetujui. Radjiman mengungkapkan dalam sidangnya bahwa meskipun ada beberapa perbedaan pendapat, namun pada akhirnya, seluruh anggota BPUPKI dapat sepakat mengenai isi rancangan tersebut sebagai dasar hukum negara Indonesia yang merdeka.

“Jadi ini sudah diterima semuanya. Jadi saya ulangi lagi, undang-undang dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Buat selesainya saya juga minta yang setuju, yang menerima, saya minta dengan hormat berdiri. Dengan suara terbanyak diterima undang-undang dasar ini. Terima kasih tuan-tuan.”

Selanjutnya, pada sidang kedua BPUPKI, terdapat tiga putusan penting yang dihasilkan, yaitu:

- a. Rancangan pembukaan hukum dasar negara, yakni pembukaan UUD 1945 yang menjadi bagian pertama dari konstitusi Indonesia, yang berisi cita-cita dasar negara.
- b. Rancangan Hukum Dasar Negara yang Berisi Pasal-Pasal Mengenai Aturan Bernegara: Pasal-pasal yang mengatur mekanisme pemerintahan dan hak-hak warga negara.
- c. Rumusan Tentang Pernyataan Indonesia Merdeka: Pernyataan yang menegaskan kemerdekaan Indonesia dan pembentukan negara yang merdeka, berdaulat, dan berkeadilan.

Setelah tugas BPUPKI selesai, lembaga tersebut dibubarkan dan digantikan dengan pembentukan Dokuritu Zyunbi Inkai pada 7 Agustus 1945. Dokuritu Zyunbi Inkai bertugas untuk melanjutkan proses perumusan dan pengesahan UUD 1945 serta mempersiapkan segala aspek administrasi untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pembentukan badan ini menandakan langkah final dalam mempersiapkan Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat.

Penetapan UUD NRI Tahun 1945

Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dilakukan berdasarkan keputusan Marsekal Medan Hisaichi Terauchi, Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Keputusan ini dikeluarkan setelah Jepang mengalami kekalahan di medan perang, dan untuk mempersiapkan Indonesia menuju kemerdekaan yang sudah lama diperjuangkan. Jepang mengizinkan pembentukan badan yang berfungsi untuk mempersiapkan segala hal yang terkait dengan kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah perumusan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang merdeka.

Tugas PPKI dibagi menjadi dua tugas utama:

a. Meresmikan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945

PPKI memiliki tugas penting untuk meresmikan UUD 1945 yang sudah disusun oleh BPUPKI. Pembukaan UUD 1945 yang berisi dasar negara Indonesia disahkan, bersama dengan batang tubuh yang memuat pasal-pasal yang mengatur pembagian kekuasaan, hak asasi warga negara, serta mekanisme pemerintahan negara.

b. Melanjutkan Hasil Kerja BPUPKI

Selain meresmikan UUD, PPKI juga melanjutkan hasil kerja BPUPKI dalam merumuskan negara Indonesia yang merdeka. Hal ini termasuk pembahasan dan pengesahan beberapa ketentuan hukum dan administratif yang belum selesai pada masa BPUPKI, serta penyesuaian dengan kondisi Indonesia pasca-perang dan pasca-penyerahan Jepang.

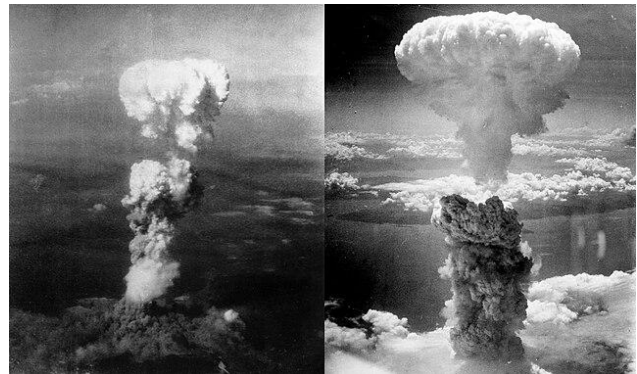
Setelah pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, sebuah peristiwa penting terjadi pada 9 Agustus 1945, yaitu Jepang menyatakan kesediaannya untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, meskipun pada waktu itu Indonesia belum memperoleh kemerdekaan penuh. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah kepada Sekutu, yang membuka jalan bagi Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya.

Pada saat itu, PPKI dibentuk dengan 21 anggota yang terdiri dari tokoh-tokoh penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Anggota PPKI

tersebut adalah: Soekarno, Mohammad Hatta, Radjiman Wedyodiningrat, Oto Iskandar Di Nata, KH. Abdoel Wachid Hasyim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetarjo Kartohadikoesoemo, Soepomo, R. P. Soeroso, Abdoel Kadir, Pangeran Poeroebojo, Mohammad Amir, Teuku Mohammad Hasan, Abdoel Abbas, G. S. S. J. Ratulangi, Andi Pangerang, A. A. Hamidhan, I Goesti Ketoet Poedja, Johannes Latuharhary, dan Yap Tjwan Bing.

Marsekal Terouchi pada sebuah pertemuan di Dalat yang berlangsung pada bulan Juni 1945 menyatakan dengan tegas bahwa PPKI diperbolehkan melaksanakan kegiatannya secara bebas dan mandiri. Namun dalam pelaksanaannya, tetap harus memperhatikan dua poin penting:

- Pihak Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia setelah perang dunia kedua berakhir. Hal ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan penuh.
- Jepang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi bagian dari lingkungan kemakmuran Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang. Namun, hal ini bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan sejati Indonesia.



*Bom Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang menyerah -
Wikimedia.com*

Menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, menyebabkan Jepang kehilangan kekuasaan atas wilayah Indonesia. Saat itulah, Indonesia memanfaatkan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta, yang dilakukan oleh Soekarno dan Hatta, atas nama seluruh bangsa Indonesia. Keputusan ini diambil untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang timbul akibat kekalahan Jepang.

Setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, para tokoh bangsa melangsungkan sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Sidang ini menjadi titik penting dalam sejarah perumusan UUD NRI Tahun 1945, Sidang ini juga melibatkan penambahan enam anggota baru dalam PPKI, yaitu Ki Hadjar Dewantara, R. A. A. Wiranatakoesoema, Kasman Singodimedjo, Sajoeti Melik, Iwa Koesoemasoemantri, dan A. Soebardjo.

Sidang ini juga berisi diskusi panjang tentang pemilihan kalimat dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu isu yang dibahas adalah perubahan kalimat dalam Preambul, yang akhirnya disepakati menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam setiap proses sidang, para pendiri bangsa sangat mementingkan nasib dan persatuan bangsa Indonesia.

Terlihat dalam berbagai perubahan dan penyesuaian dalam rancangan UUD 1945, seperti dalam perumusan kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang menggambarkan nilai dasar negara Indonesia. Sebagai contoh, dalam diskusi mengenai sistem negara dan pemerintahan, para tokoh berfokus pada prinsip dasar yang tidak hanya mengutamakan persatuan bangsa tetapi juga keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan tiga keputusan penting:

a. Pengesahan Pembukaan dan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 yang telah disusun dan diperbaiki disahkan dalam sidang ini sebagai landasan ideologi dan dasar hukum negara Indonesia. Batang tubuh UUD 1945 yang terdiri dari 42 pasal juga disahkan dalam sidang ini untuk mengatur jalannya pemerintahan Indonesia.

b. Penetapan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Soekarno dan Hatta resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia, dan ini menjadi simbol awal berdirinya negara Indonesia merdeka.

c. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Komite ini dibentuk untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.



Suasana sidang PPKI 18 Agustus 1945 - Tempo.co

Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 juga menghasilkan enam perubahan dalam UUD 1945, yang meliputi perubahan dalam pasal-pasal tertentu untuk menyesuaikan dengan kondisi negara yang baru merdeka:

- a. Penggunaan istilah "hukum dasar" diubah menjadi "undang-undang dasar".
- b. Kata "*Mukaddimah*" dalam Piagam Jakarta diubah menjadi "Pembukaan".
- c. Penggunaan kalimat "dalam suatu hukum dasar" disesuaikan menjadi "dalam suatu undang-undang dasar".
- d. Sila pertama Pancasila yang tercantum dalam alenia keempat Piagam Jakarta yang berbunyi "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" disesuaikan menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".
- e. Terdapat juga beberapa perubahan yang dilakukan pada bagian batang tubuh undang-undang dasar, yaitu sebagai berikut:
 - ▷ Pasal 6 Ayat (1) yang mengatur mengenai syarat-syarat menjadi Presiden, dimana syarat "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam" diubah menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli".
 - ▷ Pasal 29 Ayat (1) yang mengatur tentang dasar negara Indonesia, yang diperjelas dengan penambahan pengaturan tentang agama, yang awalnya berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" akhirnya disepakati menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Tahapan penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI dilalui dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Proses Pengesahan

PPKI mengesahkan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 dalam sidang pada 18 Agustus 1945, yang menandai langkah pertama dalam penetapan konstitusi.

b. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Setelah pengesahan, PPKI melantik Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia, sehingga UUD 1945 mulai diterapkan sebagai konstitusi negara.

Sampai pada akhirnya, pada tanggal 15 Februari 1946, Berita Republik Indonesia memuat informasi penting mengenai pengesahan UUD 1945 dan pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia. Artikel tersebut menjelaskan bahwa UUD 1945 merupakan landasan hukum yang sah bagi negara Indonesia, yang harus diterima dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Contoh Soal

Jelaskan bagaimana proses perumusan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI, serta sebutkan peran penting yang dimainkan oleh masing-masing panitia.

Pembahasan:

Proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 dimulai dengan pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 28 Mei 1945, yang memiliki tugas merumuskan dasar negara Indonesia. BPUPKI merumuskan berbagai konsep dasar yang akan menjadi landasan negara Indonesia, termasuk pembukaan UUD yang memuat cita-cita bangsa. Setelah BPUPKI selesai dengan tugasnya, pada 7 Agustus 1945, Marsekal Medan Hisaichi Terauchi membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI, termasuk meresmikan dan mengesahkan pembukaan serta batang tubuh UUD 1945. PPKI juga memilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Fakta Unik Seputar Pancasila

Peran Mohammad Natsir dalam Perumusan Dasar Negara

Beliau tergabung dalam Panitia Sembilan, yang dibentuk pada 22 Juni 1945 oleh BPUPKI untuk merumuskan dasar negara. Salah satu hasil penting dari Panitia Sembilan adalah rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila disepakati dalam rapat BPUPKI pada 1 Juni 1945. Soekarno, Natsir, dan tokoh-tokoh lainnya, berperan dalam penyempurnaan dan pengokohan prinsip-prinsip tersebut dalam konstitusi negara yang akhirnya diabadikan dalam Pembukaan UUD 1945.

Sebagai tokoh yang dikenal dengan kedalaman pemikiran Islam, Mohammad Natsir juga mempengaruhi perdebatan tentang dasar negara Indonesia. Natsir berusaha menekankan pentingnya nilai-nilai Islam dalam pembentukan negara. Meskipun konsep negara berdasarkan agama tidak diterima secara eksplisit dalam UUD 1945, Natsir memperjuangkan agar nilai-nilai Islam menjadi bagian dari kehidupan bernegara. Beliau mendukung integrasi agama dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi tetap menghargai keberagaman dan prinsip dasar negara yang inklusif.

Dalam perjalanan sejarah, Natsir dikenal sebagai tokoh yang sangat mendalami hubungan antara agama dan negara, terutama dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.



2. Posisi dan Peran UUD NRI Tahun 1945

Peran UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sudut pandang Satjipto Rahardjo (2009), UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur struktur dan tata cara pemerintahan negara Indonesia. UUD ini tidak hanya memberikan aturan dasar mengenai pembagian kekuasaan, tetapi juga menetapkan hak-hak dasar warga negara. Rahardjo menegaskan bahwa konstitusi juga mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dan moral yang menjadi dasar bagi tata pemerintahan negara, menciptakan legitimasi bagi pemerintah untuk menjalankan wewenangnya dengan dasar hukum yang sah.

Selanjutnya, dalam perspektif teori jenjang norma, UUD NRI Tahun 1945 menempati posisi yang sangat strategis sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Dalam teori ini, UUD adalah norma yang paling fundamental yang mengatur kehidupan bernegara. Normanya mencakup ketentuan mengenai hak asasi manusia, struktur pemerintahan, serta hubungan antar lembaga negara. Dengan demikian, UUD menjadi dasar dari segala hukum yang ada di Indonesia, baik itu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dibuat oleh negara.

Sebagai hukum dasar yang tertulis, UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum utama dalam negara Indonesia. Sebagai hukum tertulis, UUD ini mengikat semua warga negara, lembaga negara, serta pihak lainnya yang ada di dalam wilayah hukum Indonesia. Ketentuan dalam UUD memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan lainnya, sehingga setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat harus merujuk dan tidak bertentangan dengan UUD. UUD ini menjadi pedoman yang tidak bisa digantikan atau diubah dengan mudah, perubahannya harus melalui prosedur amandemen yang ketat.

UUD NRI Tahun 1945 juga berfungsi sebagai tata cara bernegara yang mengatur bagaimana negara dan pemerintahan dijalankan. Fungsi ini meliputi pengaturan tentang siapa yang memiliki kekuasaan, bagaimana kekuasaan tersebut dibagi, serta bagaimana negara bertanggung jawab kepada rakyatnya. Dengan demikian, UUD tidak hanya mengatur hubungan antar lembaga negara, tetapi juga memetakan hak dan kewajiban warga negara dalam sistem pemerintahan.

Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai alat penentu yang menetapkan arah dan tujuan negara. Sebagai dokumen dasar negara, UUD memandu segala kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, mengarahkan tindakan negara dalam mencapai cita-cita nasional, seperti menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Fungsi ini sangat vital dalam menjaga konsistensi negara terhadap prinsip-prinsip yang tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh UUD.



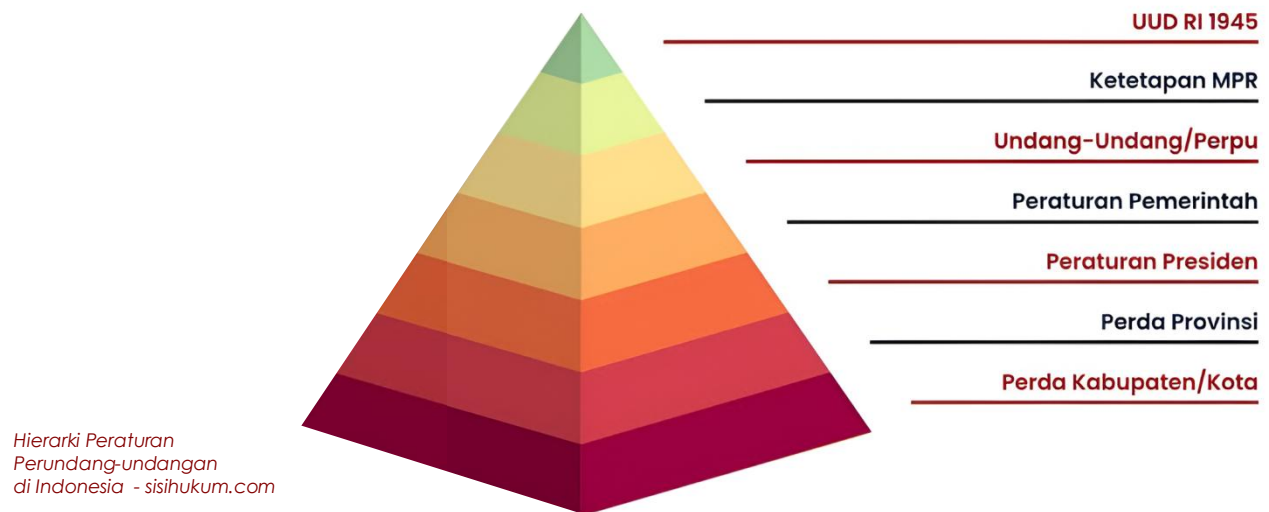
Gedung Mahkamah Konstitusi. Sarana melakukan uji materi terhadap peraturan pemerintah - Shutterstock.com.2489801685

UUD NRI Tahun 1945 juga berperan dalam mengawasi tindakan pemerintah dan lembaga negara. Segala kebijakan dan keputusan pemerintah dapat dievaluasi dan diawasi apakah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konstitusi. Proses uji materi dan uji produk hukum merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif atau pemerintah. Uji materi ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Posisi UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, karena merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya harus berpedoman pada ketentuan yang ada dalam UUD 1945, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD tersebut. Dalam hal ini, UUD tidak hanya berfungsi sebagai konstitusi, tetapi juga sebagai sumber hukum yang memandu semua kebijakan dan tindakan pemerintah Indonesia.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan ilustrasi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menggambarkan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum Indonesia:



UUD NRI Tahun 1945 bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, lembaga negara, serta individu di Indonesia. Hal ini karena UUD merupakan dasar hukum yang mendasari seluruh tata pemerintahan negara Indonesia. Sejak pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945, UUD ini tidak hanya mengikat pemerintah, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar warga negara, menjamin kebebasan individu, dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan-perubahan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Penggunaan istilah "UUD 1945" sendiri mengalami perubahan sejak pertama kali diterapkan pada tahun 1945, dan telah menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia yang terus berkembang. Dalam perjalanannya, UUD 1945 mengalami beberapa amandemen untuk menyesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman dan kebutuhan negara. Amandemen yang terjadi adalah respons terhadap keinginan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan-perubahan dalam UUD NRI Tahun 1945 terjadi pada beberapa periode, yaitu:

a. Amandemen pertama (19 Oktober 1999)

Amandemen pertama ini dilakukan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya dengan memberikan penekanan pada prinsip-prinsip demokrasi.

b. Amandemen kedua (18 Agustus 2000)

Amandemen kedua ini berfokus pada penguatan lembaga negara dan pengaturan lebih rinci mengenai pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

c. Amandemen ketiga (10 November 2001)

Amandemen ketiga menekankan pada pengaturan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, serta menguatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

d. Amandemen keempat (10 Agustus 2002)

Amandemen keempat memberikan penegasan lebih lanjut tentang otonomi daerah, memperkuat demokrasi lokal, serta memberikan ruang bagi pemerintahan daerah untuk mengatur urusan lokalnya.

Dalam sidang MPR 1999, terjadi beberapa kesepakatan penting terkait arah perubahan UUD 1945. Azis dan Izlindawati (2018) mencatat lima kesepakatan yang tercapai, yaitu:

- a. Penegasan tentang demokrasi Pancasila, dimana MPR menyepakati bahwa Indonesia akan tetap berpegang pada prinsip demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara.
- b. Pemilihan Presiden langsung, dengan adanya kesepakatan ini memungkinkan rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung dalam pemilu.
- c. Pemisahan kekuasaan, dimana MPR setuju untuk memperjelas dan memisahkan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- d. Penguatan peran MPR, yang mana MPR menyetujui bahwa MPR memiliki peran yang lebih penting dalam pengawasan terhadap lembaga eksekutif.
- e. Peningkatan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, yang dalam pelaksanaannya mendorong peningkatan partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan dalam negara.

Contoh Soal

Apa saja fungsi utama UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem pemerintahan Indonesia, dan bagaimana UUD ini mempengaruhi pembagian kekuasaan antara lembaga negara?

Pembahasan:

UUD NRI Tahun 1945 memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, sebagai hukum dasar negara, UUD 1945 mengatur struktur pemerintahan dan membagi kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsi kedua adalah sebagai tata cara bernegara yang memberikan pedoman bagi bagaimana negara dijalankan, seperti mekanisme pemilihan umum, pembentukan undang-undang, dan pengawasan terhadap lembaga negara. Selain itu, UUD 1945 berfungsi sebagai alat kontrol yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan produk hukum yang dibuat oleh lembaga negara sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi.

Fakta Unik Seputar Pancasila

Lambang Negara; Bendera Merah Putih

Semboyan "NKRI Harga Mati" muncul pertama kali setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945, saat Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi dari dalam dan luar negeri. Meskipun semboyan ini lebih dikenal setelah Reformasi 1998, prinsip menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan. Pada masa-masa sulit seperti pemberontakan daerah, para pemimpin dan rakyat Indonesia menegaskan bahwa NKRI harus dipertahankan dengan segala cara. Semboyan ini kini menjadi simbol kekuatan nasional Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan, meskipun negara terus berkembang.



Mural NKRI harga mati -
iendelahukum.com



3. Mengamalkan Konstitusi dalam Kehidupan Sehari-hari

Amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai pasal, tetapi satu hal yang tetap tidak berubah adalah Pembukaan UUD 1945. Pembukaan ini memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh isi pasal-pasal dalam konstitusi, yang menegaskan tujuan negara Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, meskipun ada perubahan dalam batang tubuh UUD, Pembukaan UUD 1945 tetap menjadi pedoman dan landasan dasar negara yang tidak dapat diubah.

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pembukaan UUD 1945 mencakup pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan dan dasar hukum di Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut setidaknya meliputi hal-hal berikut:

a. Kemerdekaan sebagai Hak Asasi Manusia

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Hal ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan mengakhiri penjajahan di tanah air.

b. Persatuan Indonesia

Pokok pikiran kedua dalam Pembukaan UUD 1945 adalah pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang mengutamakan kerukunan antar suku, agama, ras, dan golongan. Persatuan ini menjadi landasan dalam membangun Indonesia sebagai negara yang pluralistik namun tetap bersatu dalam satu cita-cita kemerdekaan.

c. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pembukaan UUD 1945 juga menekankan tujuan negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yang mencakup kesejahteraan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

d. Kedaulatan Rakyat

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Negara hadir untuk melayani rakyat dan bukan sebaliknya, dengan memberikan hak suara dalam pemilihan umum serta melibatkan rakyat dalam berbagai proses politik dan keputusan negara.



Pemilihan umum adalah salah satu saluran suara rakyat - Shutterstock.com. 2400193727

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebenarnya adalah rangkuman dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung prinsip-prinsip yang sangat sesuai dengan tujuan dan semangat pembukaan tersebut, yaitu mewujudkan kemerdekaan, persatuan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Pancasila menjadi landasan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

a. Di Lingkungan Keluarga

Menjalankan UUD NRI Tahun 1945 dalam lingkungan keluarga adalah langkah pertama yang dapat diambil dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa cara untuk menjalankan UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan keluarga:

- ▷ Mengajarkan kepada anak-anak dan anggota keluarga tentang Pancasila sebagai dasar negara, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- ▷ Mengajarkan dan mempraktekkan penghormatan terhadap hak-hak setiap anggota keluarga, seperti hak untuk berbicara, hak untuk bebas memilih agama, dan hak untuk dihargai.
- ▷ Mengajarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan di keluarga, seperti dalam hal menentukan kegiatan keluarga atau menyelesaikan perbedaan pendapat.
- ▷ Memupuk rasa persatuan dalam keluarga, menghargai perbedaan, dan menjaga keharmonisan antar anggota keluarga.
- ▷ Menanamkan rasa tanggung jawab sosial kepada anggota keluarga untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

b. Di Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan tempat yang sangat penting dalam membentuk karakter dan pemahaman terhadap UUD NRI Tahun 1945. Berikut adalah beberapa cara menjalankan UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan sekolah:

- ▷ Memberikan pendidikan kewarganegaraan yang mendalam tentang UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila agar siswa memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- ▷ Mengajarkan nilai-nilai kebangsaan yang menekankan pada rasa cinta tanah air, penghargaan terhadap kebudayaan lokal, dan persatuan Indonesia.
- ▷ Mengajarkan kepada siswa untuk menghargai hak orang lain di sekolah, baik dalam berpendapat, beragama, maupun dalam berinteraksi sosial.
- ▷ Melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan di sekolah, seperti pemilihan ketua kelas atau dalam kegiatan organisasi sekolah yang bersifat demokratis.
- ▷ Menanamkan nilai keadilan sosial di sekolah dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk berkembang dan meraih prestasi tanpa diskriminasi.



*Siswa dibangun rasa cintanya kepada tanah air -
Shutterstock.com.2174561979*

c. Di Lingkungan Masyarakat

Di lingkungan masyarakat, penerapan UUD NRI Tahun 1945 dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan dan kemajuan negara. Berikut adalah beberapa cara menjalankan UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan masyarakat:

- ▷ Menggunakan hak pilih dengan bijak dalam pemilihan umum sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.
- ▷ Berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial dengan membantu masyarakat yang kurang mampu, baik dalam bentuk material, pendidikan, atau pelatihan.
- ▷ Berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan untuk menciptakan keadilan sosial.
- ▷ Menerapkan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan masyarakat, sehingga tercipta keputusan yang adil dan diterima semua pihak.
- ▷ Menjaga keharmonisan dan persatuan dengan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, serta berusaha hidup berdampingan dalam kerukunan dan damai.

Dengan menerapkan UUD NRI Tahun 1945 dalam ketiga skala lingkungan tersebut (keluarga, sekolah, dan masyarakat), kita turut serta dalam membangun Indonesia yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar konstitusi negara, yaitu kemerdekaan, persatuan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.

Contoh Soal

Sebutkan dan jelaskan cara-cara yang dapat dilakukan oleh keluarga untuk menjalankan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari!

Pembahasan:

Dalam lingkungan keluarga, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjalankan UUD NRI Tahun 1945, antara lain:

- 1) Mengajarkan Nilai Pancasila: Mengajarkan kepada anak-anak dan anggota keluarga tentang Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Menghargai Hak Asasi Manusia: Setiap anggota keluarga dihargai hak-haknya, misalnya hak untuk berbicara, hak untuk diperlakukan dengan adil, dan hak untuk memilih keyakinan masing-masing.
- 3) Melaksanakan Musyawarah: Mengedepankan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, baik itu keputusan kecil seperti memilih kegiatan bersama atau keputusan besar seperti perencanaan masa depan.
- 4) Menjaga Persatuan dan Kesatuan: Memupuk rasa kebersamaan dan persatuan antar anggota keluarga, menghargai perbedaan pendapat, dan menyelesaikan masalah dengan cara damai.
- 5) Menumbuhkan Kesadaran Sosial: Mengajarkan pentingnya berkontribusi kepada masyarakat, misalnya dengan mengikuti kegiatan sosial atau membantu sesama yang membutuhkan.

Fakta Unik Seputar Pancasila



Pancajiwa Pondok Modern Darussalam, Gontor

Pancajiwa adalah lima nilai dasar yang diajarkan di Pesantren Gontor, yaitu **Keikhlasan**, **Kemandirian**, **Kedisiplinan**, **Keberanian**, dan **Ketulusan**. Nilai-nilai ini mengajarkan santri untuk memiliki karakter yang kuat, mandiri, dan penuh integritas. Menariknya, nilai-nilai Pancajiwa ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam hal Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial.

Logo HUT 100 tahun Gontor - gontor.ac.id

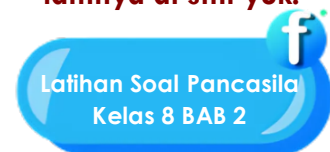
Rangkuman

1. UUD NRI Tahun 1945 dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka. Proses perumusan melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, dan Soepomo. Setelah BPUPKI selesai merumuskan rancangan, pada 7 Agustus 1945, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan mengesahkan UUD pada 18 Agustus 1945, serta memilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia.
2. UUD NRI Tahun 1945 memiliki beberapa fungsi utama:
 - ▷ Sebagai hukum dasar yang mengatur struktur negara, hak-hak dasar warga negara, dan pembagian kekuasaan antara lembaga negara.
 - ▷ Sebagai tata cara bernegara, memberikan pedoman tentang mekanisme pemerintahan, pemilihan umum, dan pembentukan undang-undang.
 - ▷ Sebagai alat kontrol, memastikan bahwa kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam UUD. Fungsi utama UUD adalah untuk mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan yang adil, serta menciptakan keseimbangan kekuasaan dalam negara.
3. UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai dasar hukum tertinggi dalam negara Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus berpedoman pada UUD dan tidak boleh bertentangan dengannya. UUD ini mengikat semua lembaga negara dan seluruh rakyat Indonesia. Sejak pertama kali disahkan, UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami beberapa perubahan (amandemen) untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, di antaranya amandemen pertama pada 19 Oktober 1999, amandemen kedua pada 18 Agustus 2000, amandemen ketiga pada 10 November 2001, dan amandemen keempat pada 10 Agustus 2002. Amandemen ini mencakup perubahan dalam berbagai aspek ketatanegaraan, termasuk penguatan demokrasi, pemisahan kekuasaan, dan hak asasi manusia.
4. Untuk menjalankan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting.
 - ▷ Di lingkungan keluarga, UUD dapat dijalankan dengan mengajarkan nilai Pancasila, menghargai hak asasi manusia, serta melaksanakan musyawarah untuk mufakat.
 - ▷ Di lingkungan sekolah, UUD dapat diterapkan melalui pendidikan kewarganegaraan, menumbuhkan rasa nasionalisme, dan menghargai hak orang lain.
 - ▷ Di masyarakat, UUD dapat dijalankan dengan berpartisipasi dalam pemilu, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengimplementasikan prinsip keadilan sosial.

Latihan Soal

1. Siapakah yang pertama kali memimpin BPUPKI yang dibentuk pada 28 Mei 1945?
 - A. Soepomo
 - B. Mohammad Hatta
 - C. Soekarno
 - D. Radjiman Wedyodiningrat
2. Pada tanggal berapakah PPKI resmi dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI?
 - A. 1 Agustus 1945
 - B. 7 Agustus 1945
 - C. 18 Agustus 1945
 - D. 9 Agustus 1945
3. Apa yang menjadi pokok pikiran pertama dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945?
 - A. Persatuan Indonesia
 - B. Kedaulatan Rakyat
 - C. Kemerdekaan sebagai hak asasi manusia
 - D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
4. Mengapa UUD NRI Tahun 1945 dianggap sebagai hukum dasar tertulis?
 - A. Karena mengatur lembaga negara
 - B. Karena tertulis dan mengikat seluruh peraturan yang lebih rendah
 - C. Karena disahkan oleh PPKI
 - D. Karena merupakan hasil dari musyawarah antara rakyat Indonesia
5. Fungsi utama UUD NRI Tahun 1945 sebagai tata cara bernegara adalah untuk...
 - A. Menjamin kemerdekaan rakyat
 - B. Menentukan arah kebijakan luar negeri
 - C. Mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga negara
 - D. Memberikan ruang bagi partisipasi rakyat dalam pemilu
6. Apa yang menjadi tujuan utama dari amandemen pertama UUD NRI Tahun 1945 pada 19 Oktober 1999?
 - A. Penguatan demokrasi dan desentralisasi
 - B. Menegaskan kedaulatan rakyat
 - C. Membatasi kewenangan presiden
 - D. Menambah pasal tentang kebebasan berpendapat
7. Di mana tempat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diumumkan pada 17 Agustus 1945?
 - A. Gedung DPR
 - B. Jalan Pegangsaan Timur No. 56
 - C. Istana Merdeka
 - D. Gedung BPUPKI

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

- Azis, M., & Izlindawati, R. (2018). Kesepakatan MPR 1999 terkait perubahan UUD 1945. Jakarta: Penerbit Indonesia.
- Harman, G. (2013). The philosophy of law and its implications in the modern era. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhshi, A. (2015). Perkembangan ketatanegaraan Indonesia pasca-perang. Bandung: Pustaka Cendekia.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum dan masyarakat: Sebuah analisis struktural. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaiman, M. (2019). Konstitusionalisme dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyarto, T. (2020). Ferdinand Lassalle dan pandangan konstitusinya. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Thian, K. (2022). Pembukaan UUD 1945 dan pokok-pokok pikiran dalam konstitusi negara. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.



BAB 3: HUKUM DAN PERATURAN DI TANAH AIR KITA

Karakter Pelajar Pancasila

▷ Bergotong royong

Bekerja sama menciptakan ketertiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat.

▷ Bernalar kritis

Mengkaji perbedaan jenis dan tingkatan peraturan dalam sistem hukum Indonesia.

▷ Kreatif

Menyusun gagasan untuk mendukung kepatuhan terhadap hukum di kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Peraturan, Ketertiban, Hierarki Hukum, Undang-Undang, Lembaga Negara, Penegakan Hukum, Kepatuhan, Kehidupan Bermasyarakat

Tujuan Pembelajaran: Menganalisis Peraturan dan Hierarki Hukum Indonesia

1. Membahas berbagai peraturan yang berlaku di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, dan negara

- ▷ Menjelaskan peraturan yang berlaku di rumah, sekolah, dan masyarakat.
- ▷ Mengidentifikasi peran peraturan dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan.

2. Menguraikan jenis peraturan dan struktur hierarki peraturan di Indonesia

- ▷ Menjelaskan perbedaan antara undang-undang dan peraturan lainnya.
- ▷ Mengidentifikasi urutan atau tingkatan peraturan dalam sistem hukum Indonesia.

3. Menganalisis peran lembaga negara dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bernegara

- ▷ Menelaah tugas dan fungsi lembaga negara dalam pembuatan peraturan.
- ▷ Mengkaji implementasi kebijakan hukum negara.

4. Mendeskripsikan arti penting hierarki peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum di Indonesia

- ▷ Menjelaskan hierarki peraturan dalam penerapan hukum.
- ▷ Menguraikan hubungan antara peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah dalam proses penegakan hukum di Indonesia.



F I T R I



1. Aturan di Lingkungan Rumah, Sekolah, Masyarakat, dan Negara

Definisi Peraturan

Sejarah peraturan berakar pada kebutuhan dasar manusia untuk hidup bersama dalam suatu kelompok sosial yang harmonis. Sejak zaman purba, manusia telah mengembangkan aturan-aturan yang bertujuan untuk menjaga kedamaian dan mencegah terjadinya konflik antar individu. Dalam kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin kompleks, dan aturan-aturan ini pun berkembang menjadi sistem hukum dan norma yang lebih terstruktur untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peraturan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk mengatur atau memberi pedoman tentang suatu hal. Peraturan ini berfungsi untuk memberi batasan yang jelas mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak, serta memberikan petunjuk tentang cara bertindak yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peraturan berperan penting sebagai pedoman yang mengatur segala tindakan dan keputusan dalam suatu komunitas.

E.B. Hurlock menjelaskan bahwa peraturan dalam konteks sosial adalah pola perilaku yang disepakati oleh kelompok sosial untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas. Menurutnya, peraturan bukan hanya berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu, tetapi juga untuk membentuk karakter sosial yang sesuai dengan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat. Dalam pandangan Hurlock, peraturan berperan dalam mengembangkan disiplin pada individu, yang sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara anggota kelompok.

Peraturan dalam kehidupan sehari-hari sering kali diistilahkan dengan "tata tertib." Istilah ini mengacu pada aturan-aturan yang lebih rinci dan operasional yang mengatur aspek-aspek praktis dalam kehidupan sosial, seperti di sekolah, tempat kerja, atau dalam rumah tangga. Tata tertib bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat bertindak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan untuk menjaga



Aturan diperlukan untuk menjadikan kehidupan tertib - istock.com

kelancaran aktivitas bersama. Dengan adanya tata tertib, kehidupan bersama akan berjalan lebih lancar, dan menciptakan suasana yang kondusif.

Peraturan dan tata tertib bertujuan untuk menciptakan kondisi kehidupan yang tertib dan teratur. Kata "tertib" mengandung makna bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya gangguan atau pelanggaran. Sementara itu, "teratur" berarti bahwa segala sesuatunya diatur dengan sistem yang jelas dan terstruktur. Keduanya saling terkait dan saling mendukung dalam menciptakan tatanan sosial yang baik.

Aturan di Rumah

Menurut *World Health Organization* (WHO), rumah adalah tempat yang memberikan perlindungan bagi individu, serta menyediakan ruang untuk interaksi sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Rumah bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga berfungsi sebagai pusat aktivitas keluarga, tempat di mana hubungan antar anggota keluarga berkembang. Dalam Kamus Tata Ruang Indonesia, rumah juga diartikan sebagai ruang pribadi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional penghuninya.

Peraturan dalam rumah merupakan norma sosial yang mengatur bagaimana anggota keluarga berinteraksi dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Norma sosial ini menetapkan apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota keluarga, serta apa yang tidak boleh dilakukan. Aturan ini penting untuk menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan penuh kasih, serta untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan antar anggota keluarga.

Peraturan dalam keluarga setidaknya memiliki tujuan-tujuan berikut, yaitu:

- a. Peraturan keluarga membantu setiap anggota memahami tanggung jawabnya, baik dalam hal tugas rumah tangga maupun dalam mendukung anggota keluarga lainnya.
- b. Peraturan memberikan batasan tentang perilaku yang tidak dapat diterima dalam keluarga, seperti larangan melakukan kekerasan fisik atau verbal antar anggota keluarga.
- c. Dengan adanya peraturan, keluarga dapat mengelola sumber daya, seperti waktu, uang, dan tenaga, dengan lebih efisien, sehingga tujuan bersama dapat tercapai lebih mudah.
- d. Peraturan juga membantu dalam pembagian tugas rumah tangga dan tanggung jawab lainnya, memastikan bahwa setiap anggota keluarga berkontribusi sesuai dengan kemampuannya.
- e. Peraturan keluarga berfungsi untuk memberi arahan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai bersama sebagai keluarga.

Peraturan eksplisit adalah aturan yang jelas dan tegas tertulis atau diucapkan. Peraturan ini mudah dipahami dan diikuti karena sudah dinyatakan dengan jelas. Sementara itu, peraturan implisit adalah aturan yang tidak tertulis tetapi tetap ada dan dipahami oleh anggota keluarga. Meskipun tidak diucapkan atau ditulis secara khusus, peraturan implisit ini tetap mempengaruhi cara keluarga berinteraksi satu sama lain. Contoh peraturan eksplisit bisa ditemukan dalam daftar tugas rumah yang harus dikerjakan oleh anak-anak, sedangkan peraturan implisit lebih terlihat dalam cara orang tua mendidik anak-anak mereka dengan memberi contoh tentang bagaimana berbicara sopan.

Dari sisi fungsi dan manfaat, peraturan dalam keluarga memiliki dua fungsi utama dalam menanamkan nilai moral pada anak. Pertama, peraturan membantu anak memahami apa yang benar dan salah, serta konsekuensi dari tindakan mereka. Kedua, peraturan mendidik anak untuk memahami pentingnya menghargai orang lain dan menghormati norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pembelajaran tentang tanggung jawab, disiplin, dan nilai-nilai moral melalui aturan yang diterapkan akan membentuk mereka menjadi individu yang baik dan beretika dalam kehidupan sosial mereka.



Aturan di rumah, sarana menanamkan rasa tanggung jawab - shutterstock.com.1774603502

Aturan di Lingkungan Sekolah

Sekolah berperan sebagai institusi yang menyediakan ruang bagi perkembangan intelektual peserta didik melalui sistem pengajaran yang terstruktur dan berkelanjutan. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah memiliki kurikulum yang disusun untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik dalam menghadapi dunia yang semakin kompleks. Oleh karena itu, sekolah tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter yang seimbang antara kecerdasan intelektual dan moral.

Sekolah memiliki tujuan yang sangat penting dalam membantu orang tua dalam pembentukan karakter anak. Sebagai lembaga pendidikan yang mendidik anak-anak, sekolah berfungsi sebagai mitra orang tua untuk membentuk generasi yang berkualitas tidak hanya dari segi pengetahuan, tetapi juga dari segi sikap

dan perilaku. Pendidikan di sekolah tidak hanya mengajarkan materi pelajaran akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama.

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal, sekolah perlu menjaga mutu pendidikan dengan membudayakan disiplin di kalangan peserta didik. Disiplin adalah salah satu elemen penting yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Dengan kedisiplinan, siswa dapat belajar untuk menghargai waktu, menghormati orang lain, dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan bahwa disiplin dapat dijalankan dengan baik, sekolah membutuhkan peraturan atau tata tertib yang mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik. Dengan adanya peraturan yang jelas, siswa akan memahami batasan perilaku yang diharapkan dan konsekuensi yang akan dihadapi jika melanggar aturan. Peraturan ini mencakup berbagai aspek kehidupan di sekolah, seperti peraturan tentang kedisiplinan waktu, tata cara berpakaian, penggunaan fasilitas sekolah, dan interaksi sosial antar siswa dan guru.

Peraturan ini memberikan rasa keadilan dan ketertiban bagi seluruh warga sekolah, karena setiap orang tahu apa yang diharapkan dan konsekuensi dari tindakan mereka. Sekolah yang memiliki peraturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua siswa untuk belajar dan berkembang. Selain itu, peraturan yang baik juga dapat mengembangkan sikap hidup yang positif, yang akan berguna bagi kehidupan mereka di masa depan.

Penyusunan peraturan sekolah tidak bisa dilakukan sembarangan, tetapi harus didasarkan pada pemahaman mendalam mengenai kebutuhan, kondisi, dan potensi warga sekolah, termasuk siswa, guru, dan staf. Widodo (2019) menjelaskan bahwa proses ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terkait untuk memastikan peraturan yang dihasilkan relevan dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, peraturan sekolah harus sesuai dengan perkembangan zaman serta mampu menyesuaikan dengan perubahan kondisi sosial dan teknologi di masyarakat.

Sebagai contoh nyata dari peraturan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah, banyak sekolah yang menetapkan aturan tentang penggunaan ponsel selama jam pelajaran. Aturan ini didasarkan pada kondisi di mana ponsel seringkali menjadi sumber distraksi bagi siswa. Dengan membatasi penggunaan ponsel, sekolah berusaha menjaga konsentrasi siswa dalam belajar dan menghindari gangguan yang dapat mengurangi kualitas pembelajaran.

Di samping peraturan yang berlaku secara umum di tingkat sekolah, setiap kelas juga perlu memiliki peraturan yang spesifik dan lebih mendetail. Peraturan kelas biasanya disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Proses ini penting agar setiap anggota kelas merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap peraturan yang ada. Keterlibatan siswa dalam merumuskan aturan, diharapkan mendorong kepatuhan pada aturan yang telah disepakati karena merasa dihargai dan terlibat.



Upacara jadi sarana menanamkan kedisiplinan pada murid - shutterstock.com.2082241579

Dengan adanya peraturan sekolah dan peraturan kelas yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan bersama, siswa memiliki pandangan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Peraturan sekolah memberikan gambaran umum tentang aturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Sementara itu, peraturan kelas memberikan pedoman lebih rinci mengenai perilaku yang

diharapkan di dalam ruang kelas. Pada akhirnya peraturan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih teratur dan mendukung proses pembelajaran yang efektif.

Aturan di Lingkungan dan Masyarakat

Paul B. Horton mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, berinteraksi satu sama lain, dan memiliki norma serta nilai-nilai yang diterima bersama. Masyarakat bukan hanya sekumpulan orang yang tinggal berdampingan, tetapi juga mereka yang saling berhubungan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ciri-ciri masyarakat antara lain sebagai berikut:

- a. **Hidup bersama;** masyarakat terdiri dari individu-individu yang tinggal bersama dalam satu wilayah tertentu, di mana mereka saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain.
- b. **Bergaul;** dalam masyarakat, individu-individu saling bergaul dan membentuk hubungan sosial yang lebih luas. Proses bergaul ini memungkinkan pertukaran informasi, ide, dan kebiasaan yang memperkaya pengalaman hidup setiap anggota masyarakat.
- c. **Sadar kesatuan;** anggota masyarakat memiliki kesadaran kolektif bahwa meskipun berbeda-beda, mereka memiliki tujuan bersama dan harus saling bekerja sama untuk mencapai keharmonisan dan kesejahteraan bersama.
- d. **Menimbulkan kebudayaan;** masyarakat sebagai wadah bagi berkembangnya kebudayaan. Nilai-nilai, tradisi, bahasa, dan kebiasaan masyarakat berkembang seiring dengan interaksi sosial yang ada, membentuk identitas sosial yang khas.



Keja bakti adalah perwujudan aturan di masyarakat - shutterstock.com.2530698697

Norma dan aturan di lingkungan masyarakat sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan antar individu. Aturan ini ada dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Aturan tertulis, seperti yang diterapkan oleh RT dan RW, bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bersama, termasuk keamanan, kebersihan, dan pembagian tugas di tingkat lingkungan. Aturan tertulis ini biasanya ditetapkan dalam musyawarah warga dan disosialisasikan untuk dipatuhi oleh semua pihak di lingkungan tersebut.

Di sisi lain, terdapat pula aturan yang tidak tertulis dalam masyarakat, yang lebih bersifat pada norma sosial dan adat. Aturan ini lebih bersifat moral dan

budaya, seperti tata krama dalam berinteraksi antar warga atau kewajiban untuk saling menghormati antar tetangga. Meskipun demikian, aturan tidak tertulis ini tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam menjaga hubungan antar individu dalam masyarakat. Kedua jenis aturan ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, saling melengkapi dan membentuk dasar bagi kehidupan sosial yang tertib dan harmonis.

Aturan dalam Bernegara

George Jellinek menekankan bahwa negara tidak hanya sebagai entitas politik, tetapi juga sebagai sistem hukum yang sah yang memiliki otoritas untuk mengatur segala aspek kehidupan warganya. Berbeda dengan Jellinek, Roger H. Soltau menyatakan bahwa negara adalah suatu entitas yang tidak hanya memiliki kewenangan hukum, tetapi juga memiliki legitimasi untuk mengatur dan memaksa warga negara untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Di sisi lain, Miriam Budiardjo menekankan pentingnya kedaulatan negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya.

Negara memiliki tiga sifat khusus yang membedakannya dari entitas lainnya: memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Ketiga sifat ini menjadi dasar bagi negara untuk menjalankan fungsinya sebagai pengatur dan penjaga ketertiban sosial.

a. Memaksa

Sifat memaksa negara menunjukkan bahwa negara memiliki kekuasaan yang sah untuk mewajibkan warganya mematuhi hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Kekuasaan ini didasarkan pada legitimasi yang diberikan oleh sistem hukum dan pemerintahan yang sah. Negara memiliki kemampuan untuk memberikan sanksi atau hukuman bagi individu atau kelompok yang melanggar aturan. Sifat memaksa ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, memastikan hak-hak dasar setiap warga negara terlindungi, dan memastikan setiap individu bertanggung jawab atas perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Monopoli

Sifat monopoli negara merujuk pada hak eksklusif yang dimiliki negara untuk menggunakan kekerasan yang sah, terutama dalam hal penegakan hukum dan keamanan. Negara adalah satu-satunya entitas yang diizinkan untuk menggunakan kekuatan fisik dalam situasi tertentu, seperti dalam tugas kepolisian, militer, atau pengadilan. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada pihak luar yang dapat menggunakan kekerasan atau kekuasaan secara sepihak.

c. Mencakup Semua

Sifat mencakup semua menjelaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan warganya. Tidak hanya dalam urusan pemerintahan, tetapi juga dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua sektor dalam masyarakat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan bersama.

Dalam kehidupan bernegara, ada dua jenis aturan yang berlaku, yaitu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Aturan tertulis mencakup semua peraturan yang secara resmi ditetapkan dan disahkan oleh lembaga yang berwenang, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Peraturan tertulis memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diharapkan untuk diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Di sisi lain, aturan tidak tertulis merujuk pada norma-norma sosial, kesopanan, dan kesusilaan yang tidak ditulis secara resmi tetapi tetap memiliki kekuatan dalam mengatur perilaku individu di masyarakat. Norma merupakan aturan yang menjelaskan bagaimana cara kita menghormati tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu budaya atau komunitas. Meskipun tidak tertulis dalam undang-undang, norma-norma ini tetap berfungsi untuk menjaga keharmonisan sosial di antara individu dalam masyarakat.

Pentingnya mematuhi setiap aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang teratur dan damai. Aturan tertulis memberikan panduan yang jelas tentang hak dan kewajiban warga negara, sementara aturan tidak tertulis membentuk karakter dan membangun kesadaran sosial yang mendalam di masyarakat. Mematuhi kedua jenis aturan ini membantu memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial di antara anggota masyarakat, serta ikut serta berkontribusi pada terciptanya kehidupan yang harmonis, tertib, dan berkeadilan.

Contoh Soal:

Jelaskan perbedaan aturan yang berlaku di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat, dan negara! Sebutkan contoh peraturan masing-masing dan tujuannya.

Pembahasan:

Aturan di rumah mengatur kehidupan sehari-hari dalam keluarga, seperti pembagian tugas dan kedisiplinan. Misalnya, pembagian tugas dalam menjaga kebersihan rumah.

Aturan di sekolah bertujuan menjaga ketertiban dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Salah satu contohnya adalah larangan membawa ponsel saat pelajaran, dengan maksud untuk mendisiplinkan siswa dan memastikan fokus dalam belajar.

Aturan di lingkungan masyarakat mengatur interaksi antar warga, seperti jadwal pemungutan sampah rumah tangga. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan.

Aturan di negara mencakup hukum dan undang-undang yang mengatur kehidupan berbangsa. Misalnya, UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, diciptakan undang-undang tersebut untuk menjaga keamanan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.

Fakta Unik Seputar Pancasila

Kepatuhan terhadap Peraturan Tidak Tertulis

Banyak masyarakat Indonesia yang sebenarnya mematuhi norma sosial tidak tertulis, yang di luar peraturan resmi, namun tetap menjaga ketertiban dan keharmonisan. Misalnya, meski tidak ada hukum yang mengharuskan orang untuk memberi tempat duduk kepada orang yang lebih tua di transportasi umum, hampir seluruh masyarakat Indonesia secara sukarela akan melakukan hal tersebut, mencerminkan asas kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari.



Adab kesopanan adalah ceminan kepatuhan - almuhtada.org



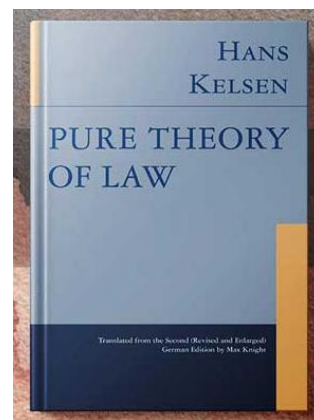
2. Pentingnya Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Teori Hierarki Norma

Teori hierarki norma yang dikembangkan oleh Hans Kelsen melalui konsep *the hierarchy of law* yang terdapat dalam karyanya, *The Pure Theory of Law*, berpendapat bahwa hukum adalah sistem norma yang bersifat murni dan terpisah dari faktor eksternal seperti moral atau politik. Dalam teori ini, Kelsen menekankan bahwa setiap norma hukum memiliki kedudukan tertentu dalam hirarki tersebut, dan norma yang lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Kelsen mengembangkan konsep *Grundnorm* atau norma dasar yang ditempatkan di puncak piramida hukum atau *Stufenbau* (struktur bertingkat). *Grundnorm* ini merupakan norma yang mendasari keseluruhan sistem hukum, yang menjadi dasar dari validitas seluruh peraturan hukum yang ada. Menurut Kelsen, setiap norma yang ada dalam sistem hukum berakar pada *Grundnorm* yang menjadi sumber sahnya seluruh aturan hukum.

Dengan adanya struktur bertingkat dalam teori ini, hukum memiliki kejelasan mengenai kedudukan norma satu dengan yang lainnya. Setiap norma harus mengacu pada norma yang lebih tinggi dalam hierarki. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah seperti peraturan daerah (Perda) harus tunduk pada undang-undang nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum bersifat terstruktur dan terorganisir secara vertikal, di mana norma yang lebih tinggi memiliki kekuatan hukum yang lebih besar daripada yang lebih rendah.



Buku *Pure Theory of Law* -
wikimedia.com

Dalam teori Kelsen, disebutkan bahwa setiap norma hukum berhubungan dengan norma lainnya dalam struktur hierarki, dan aturan yang lebih tinggi memberikan validitas pada aturan yang lebih rendah. Dengan demikian, sistem hukum bukanlah sekumpulan norma yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang saling terkait dan membentuk tatanan hukum yang konsisten dan logis. Hukum berlaku secara universal, dan struktur hukum yang ada harus dilihat sebagai sistem yang utuh.

Selanjutnya, teori *Zoran Jeliae*, yang disampaikan oleh Adolf Merkl melalui konsep *Das Doppelte Rechtantlizt* (dua kali legitimasi hukum), menekankan pentingnya pengakuan sosial terhadap norma hukum. Menurut Jeliae, hukum tidak hanya harus sah secara formal, tetapi juga harus diterima dan diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, keberlakuan norma hukum tidak hanya bergantung pada legitimasi formal, tetapi juga pada penerimaan dan pengakuan oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa norma harus mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan sosial.

Teori jenjang hukum menurut Hans Nawiasky memperkaya pemahaman tentang sistem hukum dengan memasukkan pengelompokan norma dalam berbagai jenjang yang lebih detail. Nawiasky berfokus pada pembentukan norma yang berfungsi untuk mengatur hubungan antar norma dalam sistem hukum secara lebih eksplisit dan sistematis. Nawiasky memperkenalkan pembagian norma berdasarkan tingkatannya, mulai dari norma dasar yang paling fundamental hingga norma yang lebih terperinci. Norma hukum dikelompokkan dalam empat jenjang utama, yaitu:

a. Staats Fundamental Norm (Norma Fundamental Negara)

Norma ini menjadi dasar dari segala peraturan yang ada dalam negara dan tidak bisa diubah tanpa mengubah sistem hukum secara keseluruhan.

b. Staats Grundgesetz (Undang-Undang Dasar Negara)

Konstitusi atau undang-undang dasar yang mengatur struktur negara, hak-hak dasar warga negara, serta pembagian kekuasaan antar lembaga negara.

c. Formell Gesetz (Undang-Undang Formal)

Undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif yang sah dan memiliki kekuatan hukum untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

d. Verordnung en autonome Satzung (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Otonom)

Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga negara tertentu untuk mengatur aspek administratif yang lebih rinci. Peraturan ini bisa bersifat lokal dan memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas, namun tetap harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi.

Menurut Attamimi, hierarki tata hukum di Indonesia dapat dijelaskan dengan merujuk pada teori Nawiasky. Dalam sistem hukum Indonesia, tata hukum negara tersusun dalam beberapa tingkatan, yaitu:

- a. **Staats Fundamental Norm (Norma Fundamental Negara)**, dimana dasar dari seluruh sistem hukum Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi norma tertinggi serta menjadi sumber utama bagi peraturan lainnya.
- b. **Staats Grundgesetz (Undang-Undang Dasar Negara)**, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang mengatur dasar-dasar sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan negara.
- c. **Formell Gesetz (Undang-Undang Formal)**, yakni undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Pemerintah. Memiliki kedudukan lebih rendah dari UUD 1945 namun lebih tinggi dari peraturan lainnya.
- d. **Verordnung en Autonome Satzung (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah)**, adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan lain yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola masalah yang lebih spesifik dan bersifat lokal, seperti Peraturan Daerah (Perda).

Sementara itu, Hans Kelsen mengembangkan teori hukum dengan konsep *Stufenbau*, yaitu sistem hukum yang memiliki struktur bertingkat, di mana setiap norma hukum berada dalam suatu hierarki dan mengacu pada norma yang lebih tinggi. *Grundnorm* (norma dasar) berada di puncak piramida dan memberikan validitas pada norma-norma yang lebih rendah. Setiap norma lebih rendah harus sejalan dengan norma yang lebih tinggi untuk menjaga sistem hukum yang konsisten.

Konsep Nawiasky terkait pembagian norma dalam beberapa tingkatan yang lebih terstruktur memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan konsep Kelsen. Konsep Nawiasky lebih detail dalam pembagian norma, termasuk dalam peraturan yang lebih administratif dan spesifik. Nawiasky melihat bahwa sistem hukum harus mengatur hubungan antar norma yang lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai jenis peraturan yang saling melengkapi.



Perbedaan teori Kelsen dan Nawiasky terkait jenjang norma hukum - Karya Asli Penulis

Ilustrasi di atas mendeskripsikan bahwa masing-masing konsep, baik Kelsen maupun Nawiasky, keduanya meletakkan norma hukum secara berjenjang dari hukum yang paling dasar atau dari hukum yang paling tinggi hingga yang paling rendah.

Perwujudan Hierarki Peraturan di Indonesia

Menurut Bagir Manan, prinsip penerapan hierarki peraturan di Indonesia mengacu pada sistem di mana peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar atau landasan bagi peraturan yang lebih rendah. Hierarki ini memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem hukum Indonesia tetap konsisten dan tidak saling bertentangan. Dengan sistem ini, setiap peraturan yang lebih rendah harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi, dan setiap peraturan yang ada memiliki fungsi yang jelas sesuai dengan kedudukannya dalam struktur hukum yang berlaku.

- a. Peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dijadikan dasar atau landasan hukum perundang-undangan yang lebih rendah

Peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar (UUD) atau Undang-Undang, menjadi dasar atau landasan bagi peraturan yang lebih rendah, seperti peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Artinya, seluruh peraturan yang lebih rendah harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

- b. Perundang-undangan yang lebih rendah bersumber dari perundang-undangan yang lebih tinggi

Setiap perundang-undangan yang lebih rendah di Indonesia harus bersumber dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan-peraturan ini dibuat untuk mewujudkan, mengatur lebih lanjut, atau memberikan rincian dari peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, seluruh peraturan yang ada di Indonesia harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi.

- c. Tidak boleh berlawanan dengan perundang-undangan yang berada di atasnya

Dalam sistem hierarki hukum, jika terdapat peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah tersebut dianggap tidak sah atau tidak berlaku. Prinsip ini menjamin bahwa sistem hukum tetap konsisten dan adil, serta menghindari adanya ketidakpastian hukum.

- d. Dapat diubah hanya dengan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat

Peraturan yang lebih rendah dapat diubah atau dicabut hanya melalui peraturan yang lebih tinggi atau sederajat. Hal ini menegaskan bahwa perubahan dalam suatu peraturan tidak bisa dilakukan sembarangan, tetapi harus berdasarkan prosedur yang sah dan sesuai dengan tingkatannya.

Prinsip *lex posterior derogat legi priori* berarti bahwa peraturan yang lebih baru (*lex posterior*) mengesampingkan peraturan yang lebih lama (*lex priori*). Ini berarti jika ada peraturan yang baru dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan yang lama, maka peraturan yang baru akan lebih berlaku. Sementara itu, prinsip *lex specialis derogat legi generali* berarti bahwa peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*) mengesampingkan peraturan yang lebih umum (*lex generali*). Sehingga, peraturan yang lebih spesifik atas sektor tertentu akan lebih diutamakan daripada peraturan umum yang berlaku untuk semua bidang.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengatur urutan dan prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, memberikan pedoman yang jelas tentang hierarki norma hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa setiap peraturan yang lebih rendah tetap sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan 7 poin penjelasan dari UU No. 12 Tahun 2011, yaitu:

- a. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945** sebagai norma dasar negara yang menjadi landasan hukum bagi seluruh peraturan lainnya di Indonesia.
- b. **Undang-Undang** adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif (DPR) yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dari peraturan lainnya, kecuali Undang-Undang Dasar.

- c. **Peraturan Pemerintah (PP)** adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang yang lebih tinggi dan biasanya lebih rinci serta lebih teknis.
- d. **Peraturan Presiden (Perpres)** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk mengatur hal-hal tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang atau PP.
- e. **Peraturan Daerah (Perda)** adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial dan administrasi di tingkat daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
- f. **Peraturan Menteri (Permen)** adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri untuk menindaklanjuti atau mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di sektor masing-masing.
- g. **Peraturan Kepala Lembaga atau Badan** adalah peraturan yang dibuat oleh kepala lembaga atau badan yang memiliki kewenangan tertentu dan berfungsi untuk mengatur hal-hal yang spesifik dalam lingkup lembaga atau badan tersebut.

Asas Perumusan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 memberikan penekanan pada asas-asas yang harus diterapkan dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas ini dimaksud ialah sebagai berikut:

a. Memiliki Tujuan yang Jelas

Tujuan peraturan harus dijelaskan dengan tegas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di masyarakat. Kejelasan ini penting untuk memberikan arahan yang tepat bagi pelaksanaan dan pengawasan peraturan tersebut.

b. Terstruktur dan Sesuai dengan Kewenangan

Peraturan perundang-undangan hanya boleh dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pejabat atau lembaga yang tepat akan membuat peraturan yang sesuai dengan tanggung jawab dan tugas mereka, serta memiliki kapasitas untuk menyusun peraturan yang relevan dan efektif.

c. Berkesinambungan dan Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Substansi

Asas kesinambungan antara jenis, hierarki, dan materi muatan mengharuskan bahwa peraturan yang dibentuk harus sesuai dengan jenis dan tingkatan hierarki yang telah ditentukan. Materi yang diatur dalam peraturan tersebut juga harus sesuai dengan lingkup dan cakupan peraturan tersebut, agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.



DPR memiliki kewenangan merumuskan undang-undang di Indoensia - wikimedia.com

d. Realistis untuk Dilaksanakan

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus realistis dan bisa dilaksanakan dengan baik di lapangan. Peraturan yang baik adalah peraturan yang tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

e. Manfaat dan Kemaslahatan

Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memberikan manfaat yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Peraturan tersebut harus berfungsi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

f. Jelas dan Dapat Dipahami

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Rumusan yang jelas akan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dan memudahkan dalam pelaksanaan serta penegakan hukum.

g. Transparansi

Proses yang terbuka akan memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap peraturan yang sedang disusun, sehingga peraturan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keterbukaan juga memastikan bahwa pembuatan peraturan tidak bersifat sewenang-wenang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh Soal:

Jelaskan konsep hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan berikan contoh bagaimana suatu peraturan yang lebih rendah dapat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jelaskan juga apa yang seharusnya dilakukan jika terjadi pertentangan tersebut.

Pembahasan:

Konsep hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mengacu pada struktur bertingkat di mana setiap peraturan yang lebih rendah harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menempatkan UUD 1945 sebagai norma tertinggi, diikuti UU, PP, Perpres, dan Perda. Peraturan yang lebih rendah wajib selaras dengan yang lebih tinggi. Jika terjadi pertentangan, misalnya Perda bertentangan dengan UU, maka Perda harus direvisi atau dibatalkan agar sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.

Fakta Unik Seputar Pancasila

Lex Superior Derogat Lex Inferiori

Di Indonesia, prinsip *lex superior derogat lex inferiori* yang mengatur peraturan yang lebih tinggi bisa mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, memiliki dampak nyata. Misalnya, peraturan daerah (Perda) yang bertentangan dengan Undang-Undang atau Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibatalkan atau disesuaikan untuk mencocokkan dengan hukum yang lebih tinggi. Salah satu contohnya adalah ketika Perda tentang pengelolaan sampah di daerah tertentu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup.



Hierarki perundang-undangan - shutterstock.com.1115079419



3. Kriteria dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) merupakan konstitusi yang menjadi dasar utama dari seluruh sistem hukum di Indonesia. UUD 1945 mengatur pokok-pokok kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mencakup prinsip-prinsip dasar yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan, hak-hak dasar warga negara, serta pembagian kekuasaan antara lembaga negara.

Seiring berjalannya waktu, UUD 1945 telah mengalami beberapa perubahan atau amandemen. Perubahan ini dilakukan untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dengan tantangan zaman. Meskipun demikian, perubahan tetap mempertahankan posisi UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, yang menjadi acuan bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.



Pendidikan budaya tari Indonesia adalah perwujudan konstitusi UUD NRI Tahun 1945-nya.

Ketetapan MPR (Tap MPR)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) adalah keputusan atau ketetapan yang dihasilkan oleh MPR yang memiliki kedudukan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, Tap MPR lebih rendah dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, tetapi lebih tinggi dari undang-undang dan peraturan lainnya.

Sejak amandemen UUD 1945, ketetapan MPR tidak lagi mengatur tentang hal-hal yang bersifat konstitusional atau pokok negara secara langsung. Namun, ketetapan MPR masih memiliki kedudukan yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pembentukan lembaga negara dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketetapan MPR merupakan hasil dari konsensus bersama antara anggota MPR yang mencakup representasi dari berbagai partai politik di Indonesia. Berikut beberapa hal yang diatur melalui Tap MPR, antara lain:

a. Penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Sebelum amandemen UUD 1945, Tap MPR mengatur Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan pedoman bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan negara. Setelah amandemen,

keberadaan Tap MPR terkait GBHN tetap memberikan panduan mengenai arah pembangunan dan visi jangka panjang negara meskipun tidak berkedudukan seperti sebelum masa amandemen.

b. Penetapan tentang *Impeachment* Presiden

Tap MPR juga mengatur ketentuan tentang *impeachment* (pemakzulan) presiden. Hal ini berkaitan dengan prosedur dan mekanisme yang harus diikuti jika terjadi pelanggaran hukum atau ketidakmampuan presiden dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam konstitusi.

c. Penyusunan atau Pembentukan Lembaga Negara

Tap MPR juga mengatur pembentukan dan penyusunan lembaga negara yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya struktur organisasi dan wewenang lembaga-lembaga tersebut. Pembentukan dan penyusunan lembaga negara ini diatur untuk memastikan sistem ketatanegaraan yang jelas dan terstruktur sesuai dengan UUD 1945.

Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Undang-Undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden, yang memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada peraturan lainnya, seperti peraturan pemerintah atau peraturan daerah. UU bertujuan untuk mengatur dan mengatur hal-hal yang bersifat lebih umum dan mendasar, serta memberikan pedoman yang jelas bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah aturan yang diterbitkan oleh Presiden dalam keadaan tertentu yang sangat mendesak dan tidak dapat menunggu proses pembuatan undang-undang yang memakan waktu. Perpu memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang dan harus disahkan oleh DPR dalam waktu tertentu setelah diterbitkan.

Dalam ketentuan yang telah diatur, undang-undang harus mencakup beberapa hal berikut:

- a. Perwujudan lebih kongkrit dari ketetapan yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945.
- b. Pelaksanaan amanat undang-undang melalui aturan yang mengaturnya melalui undang-undang.
- c. Penetapan dan pengesahan atas perjanjian internasional.
- d. Tindakan lebih lanjut atas keputusan Mahkamah Konstitusi.
- e. Perwujudan hukum yang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu contoh undang-undang di Indonesia adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini mengatur tentang pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. UU ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat peran desa dalam pembangunan nasional. Dengan adanya UU ini, pemerintah desa memiliki landasan hukum yang jelas untuk menjalankan tugasnya.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) dan Undang-Undang (UU) memiliki kesamaan dalam hal kedudukannya yang setara dalam sistem hukum Indonesia, namun berbeda dalam hal proses pembentukannya. UU dibentuk melalui prosedur yang lebih panjang dan melibatkan DPR dan Presiden, sedangkan Perpu diterbitkan langsung oleh Presiden dalam keadaan mendesak. Melalui Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, Perpu dapat dijelaskan melalui beberapa poin, diantaranya:

- a. **Perpu diterbitkan oleh Presiden:** Dalam kondisi yang memerlukan keputusan cepat, Presiden dapat mengeluarkan Perpu yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan UU.
- b. **Perpu harus disahkan oleh DPR:** Perpu harus diajukan ke DPR dalam waktu paling lambat 30 hari setelah diterbitkan. Jika tidak disetujui, maka Perpu tersebut dianggap tidak berlaku.

- c. **Perpu sebagai solusi atas kegentingan:** Perpu merupakan respons cepat terhadap situasi yang mendesak dan tidak dapat menunggu proses legislasi yang lama.

Istilah "kegentingan yang memaksa" merujuk pada situasi di mana negara atau pemerintah membutuhkan suatu tindakan hukum segera untuk menangani keadaan darurat atau peristiwa yang tidak terduga yang mempengaruhi kepentingan umum. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, kegentingan yang memaksa diartikan dalam tiga hal, yaitu:

- Keadaan darurat yang mendesak seperti adanya bencana alam atau pandemi, Perpu dapat diterbitkan untuk menanggulangi dan mencegah dampak kerusakan yang lebih luas.
- Dalam keadaan darurat, kekosongan hukum sering terjadi karena peraturan yang ada tidak mencakup situasi tersebut, sehingga perlu adanya peraturan baru yang segera berlaku.
- Proses pembuatan undang-undang memerlukan waktu yang panjang, sementara situasi mendesak membutuhkan solusi cepat, sehingga Perpu dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah segera.



Salah satu contoh Perpu di Indonesia adalah Perpu No. 1 Tahun 2020 yang dikeluarkan untuk menangani masalah kesehatan masyarakat akibat pandemi COVID-19. Perpu ini mengatur tentang kebijakan keuangan negara, termasuk alokasi anggaran untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Perpu ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum untuk penanganan krisis yang mendesak dan membutuhkan respons cepat dari pemerintah.

Covid 19 adalah contoh kegentingan yang memaksa - shutterstock.com.1077886856

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang yang lebih tinggi. PP sering kali digunakan untuk mengatur hal-hal yang lebih teknis atau spesifik yang perlu diatur untuk memastikan implementasi undang-undang berjalan dengan baik. PP bertujuan untuk memberikan rincian, prosedur, atau aturan lebih lanjut tentang hal-hal yang lebih umum yang telah diatur dalam undang-undang.

Misalnya, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP ini memberikan pedoman mengenai tata cara pengelolaan keuangan di tingkat daerah, mulai dari penyusunan anggaran hingga pelaporan keuangan. Peraturan ini penting karena memberikan pedoman teknis yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Jika diurai, landasan Hukum dari PP No. 47 Tahun 2008 berasal dari dua hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bagaimana keuangan negara, termasuk yang digunakan untuk keperluan daerah, harus dikelola secara efisien dan bertanggung jawab.

Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden (Perpres) adalah peraturan yang diterbitkan oleh Presiden untuk mengatur hal-hal yang lebih spesifik atau terkait langsung dengan kewenangan Presiden dalam menjalankan tugasnya. Perpres memiliki kedudukan lebih rendah daripada undang-undang dan peraturan pemerintah, tetapi tetap merupakan instrumen hukum yang mengikat. Perpres sering kali digunakan untuk mengatur hal-hal yang

berkaitan dengan kebijakan pemerintah, lembaga negara, aspek teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan detail operasional dalam pelaksanaan kebijakan.

Salah satu contoh Perpres yang ada di Indonesia adalah Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2020 tentang Penanganan Pandemi COVID-19. Perpres ini diterbitkan sebagai pedoman operasional bagi pemerintah dalam menangani pandemi, termasuk alokasi anggaran, koordinasi antar lembaga, serta langkah-langkah yang harus diambil dalam pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19. Perpres ini memberi petunjuk lebih rinci tentang bagaimana kebijakan penanggulangan COVID-19, serta memberikan dasar hukum bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola krisis kesehatan.

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) untuk mengatur masalah-masalah yang ada di daerahnya, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan peraturan yang lebih tinggi. Perda berfungsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan memberikan landasan hukum untuk kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Perda memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada undang-undang atau peraturan pemerintah, tetapi tetap mengikat di wilayah daerah tersebut.

a. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah provinsi dengan DPRD provinsi. Perda Provinsi memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada Perda Kabupaten/Kota karena mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan kepentingan provinsi sebagai kesatuan administratif yang lebih besar. Jika merujuk pada Permendagri No. 120 Tahun 2018, terdapat lima kewenangan yang menjadi cakupan muatan materi Perda Provinsi:

- ▷ Mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan di tingkat provinsi, termasuk pengorganisasian administrasi pemerintahan.
- ▷ Meliputi pembangunan fisik dan non-fisik yang mendukung kemajuan wilayah provinsi.
- ▷ Menyusun peraturan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah, serta menciptakan iklim investasi.
- ▷ Menetapkan kebijakan di sektor pendidikan, pelatihan, dan kebudayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat provinsi.
- ▷ Mengatur tentang kebijakan kesehatan yang terkait dengan pelaksanaan program kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat provinsi.

Fakta Unik Seputar Pancasila



DPRD Kota merumuskan Perda - wikimedia.com

Keunikan Peraturan Daerah (Perda)

Beberapa Perda di Indonesia memiliki ketentuan yang sangat unik dan terkadang nyentrik. Salah satunya adalah Perda di Yogyakarta yang mengatur kewajiban warga untuk menjaga kesopanan dalam berpakaian dan bertingkah laku di tempat umum. Peraturan ini mengarah pada penciptaan etika budaya yang tidak hanya menekankan pada aspek hukum, tetapi juga keselarasan sosial di tengah masyarakat dengan kearifan lokal.

b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota) adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota bersama dengan DPRD kabupaten/kota. Perda Kabupaten/Kota lebih

fokus pada kebutuhan langsung masyarakat setempat, termasuk pengelolaan sumber daya alam, kebijakan sosial, dan pelayanan dasar di tingkat lokal. Setiap Perda Kabupaten/Kota disusun untuk menanggapi tantangan dan kebutuhan daerah tersebut. Terdapat lima kewenangan yang menjadi cakupan muatan materi Perda Kabupaten/Kota merujuk Permendagri No. 120 tahun 2018:

- ▷ Mengatur tentang penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk masyarakat setempat.
- ▷ Mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kabupaten/kota untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk pertanian, perikanan, dan pengelolaan lingkungan.
- ▷ Mengatur tentang kebijakan sosial, seperti adat istiadat, dan budaya lokal.
- ▷ Mengatur kebijakan yang mendorong perkembangan ekonomi di tingkat kabupaten/kota, termasuk perencanaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah.
- ▷ Menetapkan aturan yang mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah kabupaten/kota, seperti pengaturan ketertiban umum, lalu lintas, dan pengelolaan bencana.

Contoh Soal:

Jelaskan pengertian Peraturan Daerah Provinsi dan sebutkan 5 kewenangan yang menjadi cakupan muatan materi Perda Provinsi menurut Permendagri No. 120 Tahun 2018!

Pembahasan:

Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi bersama dengan DPRD Provinsi untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di tingkat provinsi. Perda Provinsi memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota karena ruang lingkupnya yang lebih luas, mencakup kebijakan dan pengelolaan sektor-sektor yang berdampak pada seluruh wilayah provinsi.

5 Kewenangan yang menjadi cakupan muatan materi Perda Provinsi (merujuk pada Permendagri No. 120 Tahun 2018):

1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah: Mengatur tentang pengorganisasian administrasi pemerintahan di tingkat provinsi dan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Pembangunan infrastruktur: Menetapkan kebijakan tentang pembangunan fisik yang mendukung kemajuan wilayah provinsi, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
3. Kebijakan ekonomi daerah: Menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi daerah, pengembangan sektor-sektor ekonomi strategis, serta menarik investasi ke wilayah provinsi.
4. Pendidikan dan kebudayaan: Mengatur kebijakan terkait pendidikan, pelatihan, dan kebudayaan di tingkat provinsi, serta menetapkan program-program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
5. Kesehatan masyarakat: Menetapkan kebijakan untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi, termasuk program-program pencegahan penyakit, fasilitas kesehatan, dan pengelolaan bencana kesehatan.



4. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan merupakan tahap penting setelah peraturan tersebut ditetapkan. Pelaksanaan ini mengacu pada upaya untuk menjalankan dan menerapkan aturan yang sudah dibentuk agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan dalam masyarakat. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh lembaga yang berwenang harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum.

Menurut Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011, setiap peraturan yang diterbitkan harus dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal, seperti pemenuhan anggaran, sumber daya manusia, serta fasilitas yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan perundang-undangan juga bergantung pada kesiapan dan kapasitas lembaga pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Tak lupa, evaluasi berkala serta penyesuaian terhadap perubahan masyarakat dan lingkungan yang relevan harus dilakukan.

Pengawasan Pelaksanaan Peraturan

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif dijalankan dengan tepat, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa pengawasan yang baik, peraturan yang telah ada berisiko tidak efektif atau bahkan disalahgunakan. Oleh karena itu, pengawasan bukan hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah, tetapi juga oleh berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pengawasan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari fungsi legislasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal 22D Ayat (3) dalam UUD NRI Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan undang-undang yang telah disahkan.

Selain pengawasan oleh DPR, masyarakat (*civil society*) juga dapat melakukan pengawasan melalui berbagai saluran, seperti partisipasi dalam forum-forum publik, penggunaan hak asasi untuk berpendapat, serta membentuk organisasi non-pemerintah yang fokus pada pemantauan dan advokasi kebijakan. Dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan, transparansi dalam pelaksanaan peraturan semakin terjamin, dan pemerintah dapat lebih responsif terhadap aspirasi publik.

Bentuk pengawasan dari masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti protes publik, kampanye kesadaran, serta partisipasi dalam forum pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga legislatif. *Non-governmental Organization* (NGO) juga memainkan peran besar dalam mengawasi kebijakan publik, dengan melakukan penelitian, menerbitkan laporan independen, serta melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.

Pada tingkat pemerintahan, pengawasan dilakukan oleh lembaga pengawas internal seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan. Pengawasan ini memastikan bahwa penggunaan anggaran dan sumber daya negara dalam pelaksanaan peraturan dilakukan dengan transparan, efisien, dan akuntabel.



Rapat Dengar Pendapat DPR sebagai bentuk pengawasan - setneg.go.id

Produk hukum yang dibuat harus melalui proses yang jelas dan mendapat pengawasan yang ketat. Pengawasan terhadap kedua produk hukum ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap konstitusi dan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Secara keseluruhan, pengawasan terhadap implementasi peraturan merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa peraturan yang ada tidak hanya bersifat simbolik tetapi dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya pengawasan dari DPR, pemerintah, dan masyarakat, pelaksanaan peraturan akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi kemajuan negara.

Efektivitas Penegakan Hukum dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan

Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24A UUD NRI 1945 mengatur bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga peradilan lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang.

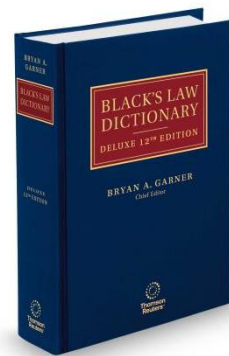
Selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang memiliki fungsi kekuasaan kehakiman dalam lingkup yang lebih spesifik, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bea Cukai, dan Imigrasi. Semua lembaga ini mendukung implementasi peraturan perundang-undangan di bidangnya masing-masing, guna memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Unsur Hukum dari sudut pandang positivisme hukum mengacu pada pandangan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, dan keberlakuannya tergantung pada pengakuan dan penerimaan aturan tersebut oleh masyarakat dan negara. Menurut positivisme hukum, hukum tidak bergantung pada moralitas atau keadilan yang bersifat subjektif, melainkan pada apakah aturan tersebut diterapkan dan diakui oleh sistem hukum yang berlaku.

Black's Law Dictionary mendefinisikan hukum sebagai "sistem aturan yang ditetapkan dan diterima oleh suatu lembaga berwenang untuk mengatur perilaku individu atau kelompok dalam suatu masyarakat." Dengan demikian, penegakan hukum terkait implementasi peraturan harus berlandaskan pada peraturan yang sah dan sistem yang sudah ditetapkan, tanpa melibatkan penilaian moral atau nilai-nilai yang bersifat subjektif.

Dalam konteks penegakan hukum, penting untuk memahami bahwa hukum harus memiliki pembuktian yang sah dan prosedur yang tepat untuk memastikan bahwa setiap individu yang melanggar peraturan dihadapkan pada proses hukum yang adil. Sistem hukum positif di Indonesia menekankan pada pengadilan yang transparan, independen, dan berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

Wujud-wujud sanksi dalam penegakan hukum dapat berupa sanksi administratif, pidana, atau perdata. Sanksi administratif adalah hukuman yang diberikan oleh lembaga pemerintah terhadap individu atau badan hukum yang melanggar peraturan, seperti denda, pencabutan izin usaha, atau penangguhan layanan tertentu. Adapun sanksi pidana merujuk pada hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana, seperti penjara, denda, atau hukuman mati. Sementara itu, sanksi perdata lebih mengarah pada ganti rugi.



Black Law's Dictionary - legal.thomsonreuters.com

Contoh Soal:

Jelaskan pengertian positivisme hukum dan berikan contoh penerapan positivisme hukum dalam praktik penegakan hukum di Indonesia!

Pembahasan:

Positivisme hukum adalah pandangan yang menyatakan bahwa hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, tanpa mempertimbangkan nilai moral atau keadilan subjektif. Dalam pandangan ini, hukum dianggap sah sepanjang diakui dan diterapkan oleh lembaga yang berwenang.

Contoh penerapan positivisme hukum dalam penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Jika seseorang melanggar undang-undang ini, ia akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ada, tanpa memandang apakah pelanggaran tersebut dianggap moral atau etis. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, meskipun ada perdebatan moral di luar itu.

Fakta Unik Seputar Pancasila

Catatan Pengawasan di Indonesia; Reformasi 1998

Salah satu faktor utama yang memicu Reformasi 1998 adalah gelombang protes besar-besaran dari mahasiswa. Demonstrasi yang dimulai pada awal 1998, dengan fokus utama pada penurunan harga barang, pemberantasan korupsi, dan tuntutan terhadap sistem pemerintahan Orde Baru, akhirnya memunculkan gerakan besar yang memaksa Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa.



Peristiwa Reformasi 1998 -
sigapnews.com



5. Komitmen terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Prinsip-Prinsip dalam Peraturan Perundang-undangan

a. Prinsip dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mengacu pada prinsip bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip ini berfungsi untuk memastikan adanya keteraturan dan kesinambungan dalam penerapan hukum. Jika terjadi pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah dianggap tidak sah atau tidak berlaku.

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap peraturan yang lebih rendah harus selalu merujuk pada peraturan yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang konsisten dan terstruktur, di mana peraturan yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih kuat dan mengatur prinsip-prinsip dasar.

Setiap peraturan yang lebih rendah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah, harus menghormati prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam peraturan yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, ketika lembaga legislatif atau eksekutif menyusun peraturan baru, mereka harus memastikan bahwa peraturan tersebut tidak melanggar peraturan yang sudah ada di tingkat yang lebih tinggi.

Jika terjadi peraturan yang bertentangan, pengadilan atau lembaga yang berwenang akan melakukan evaluasi dan memberikan sanksi atau pembatalan terhadap peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjaga keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

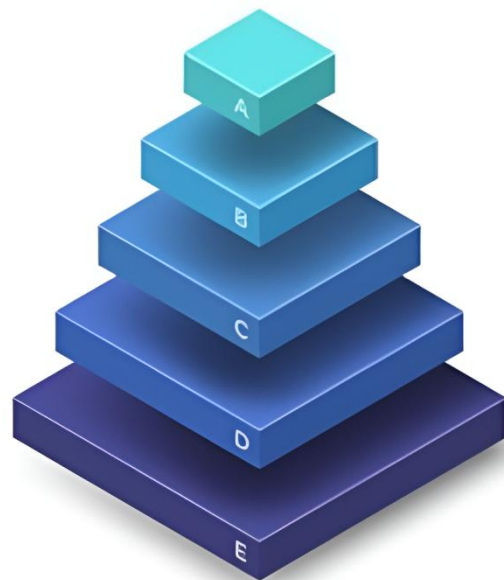
b. Prinsip dalam Perumusan Peraturan Perundang-undangan

▷ *Lex superior derogat lex inferiori*

Prinsip *lex superior derogat lex inferiori* menjelaskan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Hal ini menegaskan bahwa jika terdapat peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan prinsip ini, sistem hukum menjadi lebih terorganisir dan peraturan yang lebih tinggi tetap menjadi pedoman utama.

▷ *Lex specialis derogat lex generali*

Prinsip *lex specialis derogat lex generali* menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Dengan kata lain, jika ada peraturan khusus yang mengatur suatu hal, maka peraturan umum tidak dapat mengubah atau mengatur hal yang sama. Misalnya, jika ada undang-undang yang khusus mengatur perlindungan hak cipta, maka undang-undang yang lebih umum tentang hak



Perumusan perundang-undangan dengan prinsip struktur berjenjang - shutterstock.com.1419907376

kekayaan intelektual tidak dapat mengubah atau bertentangan dengan undang-undang khusus tersebut.

▷ *Lex posterior derogat lex priori*

Prinsip *lex posterior derogat lex priori* menyatakan bahwa peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Dalam hal ini, jika ada peraturan yang lebih baru yang mengatur suatu masalah yang sama dengan peraturan sebelumnya, maka peraturan yang lebih baru akan lebih berlaku. Prinsip ini memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman dan dapat mengakomodasi kebutuhan serta tantangan baru yang dihadapi oleh masyarakat.

c. Prinsip dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Menurut Pasal 6 UU RI No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan di Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang mencerminkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip dalam materi muatan peraturan perundang-undangan:

▷ Perlindungan

Prinsip perlindungan berarti bahwa peraturan perundang-undangan harus dirancang untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, terutama yang rentan atau lemah. Perlindungan mencakup upaya negara untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, menjamin kesejahteraan, dan memastikan tidak ada pihak yang tertindas atau terdiskriminasi.

▷ Humanisme

Prinsip humanisme menekankan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi manusia. Prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan atau peraturan yang ada mengedepankan rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

▷ Kesadaran Nasional

Prinsip ini menekankan bahwa peraturan perundang-undangan harus mendukung integritas dan persatuan bangsa Indonesia. Setiap peraturan yang dibuat harus mencerminkan semangat nasionalisme, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta menghargai keberagaman budaya yang ada.

▷ Harmonis

Prinsip harmonis berhubungan dengan prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini mengajarkan pentingnya saling menghargai, berbagi tanggung jawab, dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Dalam sistem pemerintahan dan masyarakat, prinsip harmonis menekankan pada solidaritas dan kerja sama sebagai fondasi sosial yang kuat.

▷ Kenusantaraan

Peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Peraturan yang dibuat harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan lokal dan nasional serta menjaga keberagaman yang ada.

▷ Bhinneka Tunggal Ika

Asas Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan semangat untuk menjaga kerukunan dan persatuan dalam keberagaman. Peraturan yang dibuat harus mampu menampung keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia, tanpa mengabaikan kesatuan bangsa.

Fakta Unik Seputar Pancasila

Filosofi Bhinneka Tunggal Ika dalam Hukum

Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara Indonesia yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu", tidak hanya berlaku dalam aspek sosial dan budaya tetapi juga tercermin dalam penerapan hukum. Misalnya, ketika peraturan yang berbeda diterapkan untuk berbagai provinsi sesuai dengan kebutuhan lokal, meskipun berbeda dalam implementasi, mereka tetap berada dalam satu payung hukum yang sama, yaitu UUD 1945 dan Undang-Undang yang berlaku di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum yang tetap menjaga kesatuan nasional.



Bhinneka Tunggal Ika -
shutterstock.com.1292567653

▷ Kesetaraan

Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus menciptakan kesetaraan dan memberikan perlakuan yang adil kepada semua warga negara. Peraturan perundang-undangan harus menghindari diskriminasi dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh hak-haknya.

▷ Kesetaraan dalam Hukum dan Pemerintahan

Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun individu atau kelompok yang boleh mendapatkan perlakuan khusus dalam hukum, kecuali ditentukan oleh hukum itu sendiri. Setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan memiliki hak yang sama dalam pemerintahan. Prinsip ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil, tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu.

▷ Stabilitas Hukum

Prinsip stabilitas hukum menjamin bahwa peraturan perundang-undangan harus dapat diterapkan dengan jelas, tegas, dan konsisten. Peraturan yang dibuat harus meminimalisir ketidakpastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga semua pihak tahu hak dan kewajibannya, serta konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan.

▷ Keseimbangan dan Keserasian

Prinsip keseimbangan dan keserasian mengharuskan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan berbagai kepentingan agar tercapai harmoni antara sektor-sektor yang ada dalam masyarakat. Peraturan yang dihasilkan harus mampu mengakomodasi berbagai aspek kehidupan dengan seimbang dan menghindari ketimpangan.

Sementara itu, juga terdapat asas dalam hukum pidana dan asas dalam hukum perdata. Dalam hukum pidana, asas *lex certa* mengatur bahwa setiap perbuatan yang dikenakan sanksi pidana harus diatur dengan jelas dalam undang-undang. Hal ini penting agar tidak ada orang yang dikenakan hukuman atas dasar peraturan yang tidak jelas atau ambigu. Adapun dalam hukum perdata, asas *pacta sunt servanda* mengandung arti bahwa setiap perjanjian yang sah antara pihak-pihak yang terlibat wajib dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut, selama tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Komitmen Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan

Komitmen berasal dari bahasa Inggris "*commitment*," yang berarti sebuah kesediaan untuk menjalankan atau berpegang teguh pada suatu tujuan atau kewajiban. Secara umum, komitmen dapat diartikan sebagai janji atau kesediaan untuk melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Dalam konteks pelaksanaan

peraturan perundang-undangan, komitmen berarti kesungguhan dari semua pihak, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun masyarakat, untuk mematuhi dan melaksanakan hukum yang telah disahkan.

Selanjutnya, urgensi taat hukum sangat penting dalam mewujudkan tatanan sosial yang adil dan tertib. Taat hukum bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga setiap individu dalam masyarakat. Sebagaimana pandangan Al-Mawardi yang menekankan bahwa penegakan hukum adalah salah satu pilar utama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Taat hukum adalah dasar dari keadilan sosial dan stabilitas negara.

Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa elemen penting, seperti adanya sistem hukum yang jelas dan konsisten, keberadaan lembaga penegak hukum yang profesional dan independen, serta kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Menurut Jayus (2019), penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan yang baik, tetapi juga pada implementasi yang tepat melalui proses yang transparan dan adil. Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih, dukungan dari teknologi untuk mempermudah proses hukum, dan keberanian aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang ada juga memainkan peran penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.

Contoh Soal:

Suatu hari, Anda adalah seorang pegawai pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi proyek pembangunan infrastruktur di sebuah daerah. Dalam prosesnya, Anda mengetahui bahwa kontraktor yang terlibat dalam proyek tersebut telah melanggar peraturan tentang standar keselamatan kerja dan mengabaikan beberapa prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, kontraktor tersebut memiliki hubungan dekat dengan pejabat tinggi daerah, dan ada tekanan dari pihak tertentu untuk tidak melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran ini.

Jika kamu sebagai pegawai pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan proyek tersebut, apa yang akan kamu lakukan?

Pembahasan :

Sebagai pegawai pemerintah yang bertanggung jawab, saya akan tetap menjalankan kewajiban hukum yang melekat pada tugas saya dan mengutamakan taat hukum. Meskipun ada tekanan dari pihak yang berpengaruh, saya akan memastikan bahwa peraturan yang berlaku tetap ditegakkan tanpa pandang bulu, dan melaporkan pelanggaran yang ditemukan sesuai dengan prosedur yang ada. Mengabaikan pelanggaran ini dapat membahayakan keselamatan kerja dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, saya akan melakukan langkah-langkah berikut:

1. Melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut terjadi dan mendokumentasikan semua bukti yang ada.
2. Melaporkan temuan pelanggaran kepada atasan saya dan pihak yang berwenang, seperti lembaga pengawas atau aparat penegak hukum.
3. Tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun, karena taat hukum adalah kewajiban setiap aparatur negara untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
4. Menindaklanjuti temuan pelanggaran dengan memastikan bahwa tindakan korektif diambil untuk melindungi keselamatan kerja dan mematuhi standar yang ditetapkan.

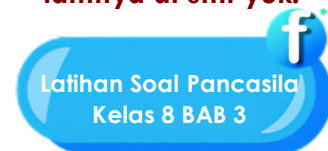
Rangkuman

1. Komitmen penerapan peraturan perundang-undangan adalah kesungguhan dan tekad untuk menjalankan dan mengimplementasikan hukum yang telah dibuat.
2. Komitmen ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang ditetapkan dapat diterapkan dengan konsisten dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3. Hierarki peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam sistem hukum Indonesia.
4. Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur prinsip-prinsip penerapan peraturan perundang-undangan, yang memastikan bahwa setiap peraturan yang diterbitkan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.
5. Positivisme hukum menganggap hukum sebagai seperangkat aturan yang sah, tanpa memperhitungkan nilai moral atau etika pribadi, dan hanya mengacu pada otoritas yang sah.
6. Pengawasan terhadap implementasi peraturan dilakukan oleh lembaga legislatif (DPR), eksekutif, serta masyarakat melalui partisipasi publik, untuk memastikan hukum dijalankan dengan benar.
7. Lembaga yang memiliki fungsi pengawasan termasuk Mahkamah Agung, KPK, Bea Cukai, dan Imigrasi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dalam bidang masing-masing.
8. Urgensi taat hukum mengingatkan bahwa ketaatan terhadap hukum adalah dasar dari tatanan sosial yang adil. Menurut cendekiawan Muslim seperti Al-Qarafi, hukum adalah untuk menjaga kepentingan umat.
9. Faktor-faktor penegakan hukum yang efektif mencakup sistem hukum yang jelas, lembaga yang profesional, serta kesadaran hukum masyarakat yang tinggi (Jayus, 2019).
10. Produk hukum dari legislatif seperti undang-undang, dan produk hukum dari pemerintah seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden, saling melengkapi dalam penerapan hukum.
11. Peraturan Daerah Provinsi mengatur hal-hal terkait dengan kebijakan yang bersifat provinsi, termasuk dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di tingkat provinsi.
12. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota lebih spesifik mengatur kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan lokal, termasuk pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur, dan ketertiban sosial.
13. Peraturan Pemerintah (PP) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengimplementasikan undang-undang lebih lanjut, misalnya tentang pengelolaan keuangan daerah (PP No. 47 Tahun 2008).
14. Peraturan Presiden (Perpres) dibuat oleh Presiden untuk mengatur hal-hal yang lebih spesifik terkait dengan tugas-tugas dan kewenangan Presiden, serta kebijakan negara.
15. Asas dalam peraturan perundang-undangan termasuk asas keadilan, kemanusiaan, kebangsaan, dan lainnya, yang memastikan bahwa hukum diterapkan untuk kesejahteraan umum dan dalam kerangka prinsip moral yang tinggi.

Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan positivisme hukum?
 - A. Hukum yang dibuat berdasarkan moral dan etika sosial.
 - B. Hukum yang diterima hanya berdasarkan keputusan politik.
 - C. Hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah tanpa mempertimbangkan moralitas.
 - D. Hukum hanya diterapkan jika sejalan dengan agama.
2. Menurut Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011, implementasi peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - A. Efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum.
 - B. Transparansi, kemudahan, dan kemanfaatan.
 - C. Kebebasan, kemerdekaan, dan keadilan.
 - D. Keputusan politik, kepentingan ekonomi, dan efisiensi.
3. Apa yang dimaksud dengan asas *lex superior derogat lex inferiori*?
 - A. Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.
 - B. Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum.
 - C. Peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama.
 - D. Setiap peraturan harus sejalan dengan moralitas masyarakat.
4. Apa yang menjadi dasar dari komitmen penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
 - A. Kewajiban untuk menghasilkan keuntungan ekonomi.
 - B. Kesungguhan untuk memastikan peraturan diterapkan dengan konsisten dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
 - C. Keinginan untuk menyederhanakan proses hukum.
 - D. Keputusan individu yang memegang kekuasaan.
5. Dalam sistem hukum Indonesia, siapa yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
 - A. Pemerintah pusat saja.
 - B. DPR dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti KPK dan Mahkamah Agung.
 - C. Masyarakat saja melalui media sosial.
 - D. Hanya pejabat pemerintah yang berwenang.
6. Menurut Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan harus mencakup asas:
 - A. Keadilan sosial, kebenaran, dan kebebasan.
 - B. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
 - C. Kesetaraan ekonomi dan sosial.
 - D. Kebebasan dalam berekspresi dan hak pribadi.
7. Apabila ada peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang, maka peraturan daerah tersebut:
 - A. Dapat tetap diterapkan jika disetujui oleh pemerintah daerah.
 - B. Harus disesuaikan atau dicabut karena tidak sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi.
 - C. Dapat berlaku jika masyarakat mendukungnya.
 - D. Tidak perlu diubah selama tidak menimbulkan masalah besar.

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

Al-Mawardi, A. (2000). *Al-Ahkam As-Sultaniyah (The Laws of Islamic Governance)*. Dar Al-Fikr.

Jayus, A. (2019). Penegakan Hukum yang Efektif di Indonesia: Faktor-Faktor Penentu dan Peranannya. *Jurnal Hukum*, 34(2), 178-194.

Kelsen, H. (2009). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.

Sinamo, S. (2014). *Pendidikan Hukum di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Graha Ilmu.

UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia.

UU RI No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia.



BAB 4: UPAYA PELESTARIAN BUDAYA BANGSA

Karakter Pelajar Pancasila

- ▷ **Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia**
Menghargai tradisi, budaya, dan kearifan lokal sebagai anugerah Tuhan.
- ▷ **Bergotong royong**
Menggunakan nilai-nilai budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa.
- ▷ **Berkebinekaan global**
Memahami pentingnya melestarikan budaya Indonesia di berbagai lingkungan.

Kata Kunci: Tradisi, Kearifan Lokal, Budaya Nasional, Pelestarian Budaya, Persatuan, Identitas Bangsa, Jati Diri, Nilai Budaya, Bhinneka Tunggal Ika

Tujuan Pembelajaran: Menelaah Kebudayaan Indonesia dan Perannya

- 1. Mengenal tradisi, kearifan lokal, serta budaya yang ada di Indonesia**
 - ▷ Memahami ragam tradisi yang ada di Indonesia.
 - ▷ Mengidentifikasi jenis budaya nasional yang membentuk karakter bangsa.
- 2. Menjelaskan upaya pelestarian kebudayaan Indonesia di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara**
 - ▷ Menerangkan langkah-langkah pelestarian kebudayaan di lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat.
 - ▷ Menganalisis kebijakan pemerintah dalam melestarikan kebudayaan Indonesia di tingkat nasional.
- 3. Menganalisis peran kebudayaan nasional sebagai pemersatu bangsa dan identitas bangsa Indonesia**
 - ▷ Mengurai peran kebudayaan dalam memperkuat rasa persatuan di Indonesia.
 - ▷ Menganalisis pengaruh kebudayaan terhadap pembentukan jati diri bangsa.

▷ Menjelaskan peran kebudayaan dalam mempersatukan masyarakat Indonesia yang multikultural.

4. Menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan sikap yang sesuai

▷ Memahami nilai-nilai budaya Indonesia dalam interaksi sosial.

▷ Menggunakan prinsip kebudayaan Indonesia dalam pengambilan keputusan sehari-hari.



F I T R I



1. Menjaga Tradisi, Kearifan Lokal, dan Kebudayaan Nasional

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman etnis, dengan lebih dari 300 kelompok etnis yang tersebar di seluruh kepulauan. Etnis merujuk pada kelompok manusia yang memiliki kesamaan dalam hal budaya, bahasa, agama, atau leluhur yang sama. Keberagaman etnis ini menjadikan Indonesia sebagai contoh negara multikultural yang sangat unik. Misalnya, suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, dan Bali, masing-masing memiliki ciri khas budaya, adat istiadat, dan bahasa yang berbeda. Meskipun begitu, semua kelompok etnis ini hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari.

Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu" mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan di tengah keragaman etnis di Indonesia. Pandangan **Fredrik Barth** tentang etnisitas mengungkapkan bahwa etnisitas bukan hanya tentang kesamaan budaya atau asal-usul, tetapi juga tentang bagaimana individu atau kelompok membedakan diri dari kelompok lainnya dan menciptakan batasan sosial. Menurut Barth, etnisitas terbentuk dalam proses interaksi sosial, di mana identitas etnis dipertahankan dengan cara membedakan diri dari kelompok lain. Oleh karena itu, meskipun ada banyak perbedaan di Indonesia, semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" mengajarkan bahwa perbedaan tersebut seharusnya menjadi kekuatan yang mempererat persatuan, bukan sebagai penghalang.

Kebudayaan

Kata "kebudayaan" berasal dari bahasa Sanskerta "budaya," yang berarti "berkembang" atau "mengolah." Kebudayaan merujuk pada segala sesuatu yang diciptakan dan diwariskan oleh manusia, seperti nilai, norma, kepercayaan, seni, bahasa, serta alat atau teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan mencerminkan cara hidup suatu kelompok masyarakat, yang membedakan mereka dari kelompok lainnya.

Menurut **Clyde Kluckhohn**, kebudayaan terdiri dari tujuh unsur: 1) sistem religi, 2) sistem sosial, 3) bahasa, 4) alat dan teknologi, 5) kesenian, 6) sistem pengetahuan, dan 7) sistem ekonomi. Sementara itu, J. J. Joenigman mengidentifikasi tiga wujud kebudayaan, yaitu: 1) wujud ide atau gagasan, 2) wujud perilaku, dan 3) wujud benda atau produk budaya. Ketiga wujud ini saling terkait, di mana gagasan tercermin dalam perilaku, yang menghasilkan benda budaya sebagai bukti kebudayaan tersebut.

a. Wujud Ide atau Gagasan

Wujud ide atau gagasan dalam kebudayaan merujuk pada pola pikir, nilai, norma, dan kepercayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Ini mencakup bagaimana suatu masyarakat memandang dunia, diri mereka sendiri, serta hubungan mereka dengan lingkungan dan sesama. Gagasan ini bersifat abstrak dan tidak dapat dilihat secara fisik, tetapi memengaruhi cara hidup dan perilaku individu dalam masyarakat. Nilai-nilai ini sering kali diwariskan turun-temurun dan menjadi panduan dalam bertindak dan berinteraksi dalam kehidupan sosial.

b. Wujud Perilaku

Wujud perilaku dalam kebudayaan mengacu pada berbagai bentuk perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai implementasi dari gagasan atau nilai yang diyakini. Aktivitas ini mencakup kegiatan sosial, upacara adat, kebiasaan sehari-hari, hingga interaksi antar individu dalam masyarakat. Setiap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sosial mencerminkan nilai-nilai yang dianut dalam suatu kebudayaan, dan sering kali tindakan tersebut diulang dalam rutinitas masyarakat untuk mempertahankan budaya dan tradisi.

c. Wujud Benda atau Produk Budaya

Wujud benda atau produk budaya merupakan wujud kebudayaan dalam bentuk benda-benda fisik yang dihasilkan oleh suatu masyarakat. Artefak ini bisa berupa alat, senjata, pakaian, bangunan, seni

rupa, atau benda lainnya yang memiliki nilai budaya. Artefak tidak hanya berfungsi sebagai alat praktis, tetapi juga mencerminkan perkembangan teknologi, estetika, dan pemikiran masyarakat pada masa itu. Dengan mempelajari artefak, kita dapat memahami lebih dalam tentang cara hidup, kepercayaan, dan identitas suatu kelompok masyarakat pada suatu periode waktu tertentu.



Candi Prambanan ialah warisan budaya berwujud artefak - shutterstock.com.460132726

Kebudayaan etnis merujuk pada kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang memiliki ciri khas dalam bahasa, adat, dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Setiap etnis di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda, misalnya kebudayaan suku Jawa, Batak, atau Minangkabau. Kebudayaan ini menjadi bagian dari identitas etnis dan membentuk karakter serta pola pikir masyarakatnya. Sementara itu, kebudayaan umum lokal adalah kebudayaan yang berkembang di suatu wilayah atau daerah tertentu yang mencerminkan kehidupan masyarakat setempat.

Kebudayaan lokal ini berfungsi untuk memperkuat hubungan antar individu di daerah tersebut, misalnya dalam tradisi dan upacara adat yang hanya dikenal di wilayah tertentu. Terakhir, kebudayaan nasional Indonesia adalah kebudayaan yang mencakup semua unsur budaya dari berbagai suku dan daerah di Indonesia, yang dipadukan untuk membentuk identitas bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kebudayaan ini mencakup nilai-nilai persatuan, kerukunan, dan penghargaan terhadap keragaman.

Poerbatjaraka berpendapat bahwa kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang berakar pada kebudayaan asli bangsa Indonesia, namun juga terbuka untuk menerima pengaruh dari luar, terutama dari India dan Islam. Ia menekankan pentingnya melestarikan kebudayaan asli Indonesia agar tidak hilang dalam proses akulturasi dengan budaya asing. Sementara itu, **Ki Hadjar Dewantara**, melihat kebudayaan sebagai kekuatan yang dapat memajukan bangsa, dengan menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa kebudayaan harus dipahami sebagai bagian integral dari pembentukan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi pekerti.

Koentjaraningrat, seorang antropolog, memandang kebudayaan Indonesia sebagai suatu kesatuan yang sangat kaya dan beragam, dengan berbagai bentuk kebudayaan yang berkembang di tiap daerah. Ia menekankan pentingnya memahami kebudayaan dalam konteks sosial dan politik

Indonesia, dan menyarankan agar kebudayaan Indonesia tidak hanya dilihat sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembangunan bangsa.

Warisan budaya Indonesia sangat beragam dan menjadi aset yang sangat berharga bagi bangsa. Warisan budaya ini mencakup seni, musik, tari, upacara adat, serta kerajinan tangan yang telah ada sejak zaman dahulu. Contohnya adalah batik, yang telah diakui oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai warisan budaya dunia. Batik bukan hanya sekadar kain bercorak, tetapi juga mencerminkan filosofi hidup, nilai-nilai sosial, serta keterampilan seni yang tinggi. Melestarikan warisan budaya seperti batik adalah bagian dari usaha menjaga identitas bangsa Indonesia, agar generasi mendatang tetap dapat menghargai dan mengembangkan budaya mereka.

Tradisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi adalah kebiasaan atau adat yang dilakukan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tradisi biasanya berkaitan dengan upacara adat, ritual, atau kegiatan tertentu yang memiliki makna khusus bagi kelompok atau masyarakat tersebut. Tradisi sering kali mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan budaya yang dianut oleh suatu kelompok.



Cucurak merupakan tradisi sunda dalam menyambut Ramadhan - kemenparekraf.go.id

Dalam kehidupan sehari-hari, tradisi juga bisa berkembang menjadi kebiasaan yang dilakukan secara rutin oleh individu atau kelompok, meskipun tidak selalu bersifat sakral. Misalnya, tradisi mudik pada saat Lebaran yang sudah menjadi kebiasaan banyak orang di Indonesia. Tradisi ini tidak hanya dilakukan untuk berkumpul dengan keluarga, tetapi juga menjadi momen penting dalam mempererat hubungan sosial dan menjaga nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat.

Kearifan Lokal

Kearifan lokal atau *local wisdom* merujuk pada pengetahuan, nilai, dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat, yang diwariskan secara turun-temurun. Kearifan ini biasanya terkait dengan cara hidup yang harmonis dengan alam, serta cara-cara mengelola sumber daya yang ada dengan bijak. Kearifan lokal terbentuk dari pengalaman panjang masyarakat dalam menghadapi tantangan hidup di lingkungan mereka, dan sering kali mencerminkan hubungan yang seimbang antara manusia, alam, dan sesama.

Dari sudut pandang filosofis, kearifan lokal merupakan manifestasi dari nilai-nilai budaya yang mendalam, yang mengajarkan manusia untuk hidup secara berkelanjutan dan penuh keharmonisan. Dalam banyak budaya, kearifan lokal mencakup ajaran untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam, serta antara individu dengan masyarakat. Filosofi ini menekankan pentingnya kebersamaan, saling menghormati, dan penghargaan terhadap lingkungan sebagai bagian dari warisan hidup yang harus dijaga dan dilestarikan.

Beberapa contoh kearifan lokal yang masih dijalankan oleh masyarakat di Indonesia antara lain adalah sistem pertanian subak di Bali, yang mengatur pengelolaan irigasi dengan melibatkan seluruh komunitas petani. Ada juga tradisi gotong royong yang sangat kuat di banyak daerah, di mana masyarakat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas sosial, seperti membangun rumah atau membersihkan lingkungan. Selain itu, masyarakat adat di berbagai daerah, seperti di Papua dan Kalimantan, memiliki cara-cara bijaksana dalam mengelola hutan dan sumber daya alam yang mereka huni, dengan mengutamakan

kelestarian dan keberlanjutan. Kearifan lokal seperti ini menjadi pedoman hidup yang sangat penting dalam menjaga harmoni antara manusia dan alam.

Menjaga dan Merawat Tradisi, Kearifan Lokal dan Budaya Bangsa

Pelestarian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah upaya untuk menjaga dan merawat agar sesuatu tetap ada dan tidak punah. Dalam konteks kebudayaan, pelestarian merujuk pada tindakan menjaga agar nilai-nilai, tradisi, dan warisan budaya tetap hidup dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Pelestarian ini tidak hanya berfokus pada benda-benda fisik, tetapi juga pada nilai-nilai budaya yang ada di dalamnya.

Berdasarkan buku kebijakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan, pelestarian budaya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu *tangible* (nyata) dan *intangible* (tak nyata). Pelestarian *tangible* berkaitan dengan upaya menjaga benda atau objek fisik yang memiliki nilai budaya, seperti bangunan bersejarah, candi, dan artefak. Sebagai contoh, upaya pelestarian Candi Borobudur yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO bertujuan untuk menjaga keutuhan struktur fisik candi tersebut yang merupakan warisan budaya dunia.

Sementara itu, pelestarian *intangible* berfokus pada aspek non-fisik dari kebudayaan, seperti tradisi, bahasa, musik, dan sistem kepercayaan yang tidak berbentuk fisik namun tetap memiliki nilai yang sangat penting. Salah satu contoh pelestarian *intangible* adalah tradisi batik yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Pelestarian batik bukan hanya melibatkan teknik pembuatan kain, tetapi juga mencakup pengajaran nilai seni dan filosofi yang terkandung dalam setiap motif batik.

Pelaksanaan pelestarian budaya juga dapat dilakukan melalui *culture experience* dan *culture knowledge*. *Culture experience* mengacu pada pengalaman langsung masyarakat dalam merasakan dan mempraktikkan kebudayaan, seperti mengikuti upacara adat atau belajar cara membuat kerajinan tangan tradisional. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk memahami lebih dalam tentang kebudayaan mereka dan merasakan sendiri nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tersebut.

Sementara itu, *culture knowledge* lebih berkaitan dengan pemahaman dan pendidikan mengenai kebudayaan, seperti pelatihan, seminar, atau program pendidikan yang mengajarkan sejarah, filosofi, dan tradisi suatu budaya. Program-program ini penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang budaya, serta untuk membentuk rasa cinta dan bangga terhadap warisan budaya Indonesia. Dengan pelestarian melalui kedua cara ini, kebudayaan Indonesia dapat terus berkembang dan diteruskan kepada generasi berikutnya.

a. Menjaga dan Merawat Budaya di Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah unit sosial pertama yang membentuk karakter dan nilai-nilai individu. Menurut **Emile Durkheim**, keluarga adalah lembaga yang berfungsi sebagai tempat pertama bagi individu untuk menerima norma dan nilai sosial. Sementara menurut **George Herbert Mead**, keluarga menjadi tempat pembelajaran identitas diri melalui interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Keluarga berperan penting dalam membentuk dasar-dasar pemahaman tentang budaya, karena sejak dini, anak-anak mulai belajar tentang tradisi, bahasa, dan adat istiadat dari orang tua dan anggota keluarga lainnya.

Fakta Unik Seputar Pancasila

Warisan Budaya Indonesia di UNESCO

Hingga tahun 2024, Indonesia telah memiliki 15 warisan budaya takbenda atau *intangible culture* yang diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari Representatif Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan. Pengakuan ini mencakup berbagai elemen budaya yang mencerminkan keberagaman dan kekayaan tradisi Indonesia.



United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization - shutterstock.com.550965550

Fungsi sosial budaya keluarga sangat penting dalam proses pelestarian kebudayaan. Keluarga berperan sebagai tempat pertama di mana nilai-nilai budaya diperkenalkan dan diteruskan. Melalui interaksi sehari-hari, seperti bercerita tentang tradisi keluarga, merayakan hari besar keagamaan, atau mengajarkan bahasa daerah, keluarga memastikan bahwa kebudayaan tetap hidup. Keluarga juga berfungsi sebagai penghubung antara generasi sebelumnya dengan generasi berikutnya, menjaga agar nilai-nilai budaya tetap ada dalam kehidupan sosial.



*Berwisata ke tempat bertema kebudayaan termasuk merawat budaya-
shutterstock.com.2580569015*

Langkah-langkah pelestarian budaya dalam keluarga dapat dimulai dengan mengajarkan anak-anak tentang sejarah keluarga, tradisi, dan kebiasaan yang sudah ada sejak lama. Misalnya, orang tua dapat mengajak anak-anak untuk mengikuti upacara adat, merayakan hari besar tradisional, atau mengenalkan mereka pada makanan dan kerajinan khas daerah. Sebagai contoh konkret, jika keluarga memiliki tradisi memasak makanan khas daerah saat hari raya, orang tua dapat mengajarkan anak-anak cara membuatnya, sehingga tradisi tersebut dapat terus dilestarikan. Dengan cara ini, pelestarian budaya dalam keluarga akan menciptakan ikatan yang kuat antara individu dan warisan budaya mereka.

b. Menjaga dan Merawat Budaya di Lingkungan Sekolah

Sekolah adalah tempat kedua setelah keluarga yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan pengetahuan anak. Menurut **Ki Hadjar Dewantara**, sekolah adalah tempat untuk mengembangkan potensi anak agar menjadi pribadi yang seutuhnya, yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki budi pekerti yang baik dan paham tentang kebudayaan. Sementara menurut **Frederick Dewey**, sekolah adalah tempat belajar yang harus menghubungkan pengetahuan akademik dengan kehidupan nyata, termasuk pengetahuan tentang kebudayaan dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat.

Dalam konteks pelestarian budaya, sekolah memiliki peran penting sebagai lembaga pendidikan yang dapat mengajarkan dan melestarikan kebudayaan melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Proses pelestarian budaya di sekolah tidak hanya melalui pembelajaran formal tentang sejarah dan seni budaya, tetapi juga melalui pengalaman langsung, seperti upacara bendera yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, atau kegiatan seni dan budaya yang memperkenalkan siswa pada keragaman tradisi Indonesia. Sekolah juga dapat menjadi tempat untuk mendiskusikan nilai-nilai budaya lokal dan nasional yang penting untuk dilestarikan.

Langkah pelestarian budaya dalam sekolah bisa dilakukan dengan mengintegrasikan kebudayaan lokal dalam mata pelajaran yang ada. Misalnya, guru dapat mengajarkan lagu-lagu daerah, tari tradisional, atau bahasa daerah dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, sekolah dapat mengadakan lomba atau festival budaya untuk mengenalkan berbagai tradisi dan kebudayaan kepada siswa. Mengundang tokoh budaya lokal untuk berbagi pengetahuan atau pengalaman juga dapat menjadi langkah penting dalam melestarikan kebudayaan di sekolah.

Contoh kongkrit pelaksanaannya adalah dengan mengadakan pekan budaya di sekolah, di mana siswa dapat memperkenalkan dan mempraktikkan kebudayaan daerah mereka, seperti mengenakan pakaian adat, menari, atau memasak makanan khas. Kegiatan seperti ini tidak hanya memperkenalkan kebudayaan kepada siswa, tetapi juga membangun rasa cinta dan bangga terhadap warisan budaya Indonesia. Dengan cara ini, pelestarian budaya di sekolah dapat dilakukan secara menyeluruh, menciptakan generasi yang lebih peduli terhadap budaya mereka sendiri.



Adanya ekstrakurikuler Tari Saman termasuk merawat budaya di sekolah - shutterstock.com.2588548409

c. Menjaga dan Merawat Budaya di Lingkungan Masyarakat

Kesadaran masyarakat akan kelestarian budaya sangat penting dalam menjaga identitas dan warisan budaya suatu bangsa. Masyarakat yang memiliki kesadaran akan nilai-nilai budaya akan lebih aktif dalam melestarikan kebudayaan mereka melalui tindakan sehari-hari. Sayangnya, seiring dengan modernisasi dan globalisasi, beberapa tradisi dan kebiasaan budaya mulai terlupakan atau tergerus oleh budaya luar. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran kolektif di masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan kebudayaan agar tidak hilang seiring waktu.

Langkah pelestarian budaya dalam masyarakat dapat dimulai dengan menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang hampir punah, seperti upacara adat atau seni tradisional, yang sering kali dianggap kurang relevan dalam kehidupan modern. Masyarakat juga dapat terlibat dalam kegiatan yang mengedukasi generasi muda tentang pentingnya kebudayaan lokal dan nasional. Penggunaan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, misalnya, merupakan langkah kecil namun signifikan untuk menjaga kelestarian bahasa dan tradisi budaya. Selain itu, memperkenalkan budaya lokal dalam acara-acara masyarakat atau komunitas juga dapat meningkatkan kesadaran dan memperkuat rasa cinta terhadap kebudayaan.

Pelaksanaan pelestarian budaya di masyarakat bisa dilakukan dengan mengadakan festival budaya lokal, di mana warga setempat dapat menampilkan tarian, musik, dan kerajinan tangan khas daerah mereka. Festival semacam ini tidak hanya berfungsi untuk menghibur, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat luas tentang keanekaragaman budaya yang ada. Selain itu, kegiatan seperti pelatihan pembuatan kerajinan tangan tradisional atau pengajaran bahasa daerah kepada generasi muda juga dapat menjadi contoh konkret upaya pelestarian budaya. Dengan cara-cara ini, masyarakat dapat menjaga warisan budaya mereka sambil memperkenalkan kebudayaan tersebut kepada orang lain dan memastikan kelestariannya.

d. Menjaga dan Merawat Budaya di Lingkungan Negara

Kebudayaan merupakan unsur sentral bagi suatu bangsa karena mencerminkan identitas, nilai, dan karakter bangsa tersebut. Kebudayaan adalah cermin dari sejarah, adat istiadat, bahasa, seni, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang membentuk cara pandang dan pola hidup masyarakat. Dengan memahami kebudayaan, suatu bangsa dapat lebih memahami dirinya sendiri, memperkuat rasa persatuan, dan memperkaya kehidupan sosialnya.

Dalam konteks pelestarian budaya, pasal 32 Ayat mengatur dua hal, yaitu:

- ▷ "Negara menghormati dan memelihara bahasa, sastra, dan seni." Ayat ini menegaskan pentingnya negara dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia, termasuk bahasa dan seni, sebagai bagian dari identitas nasional.
- ▷ "Negara berfungsi untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia." Ayat ini menunjukkan peran aktif negara dalam mengembangkan kebudayaan bangsa agar dapat berkembang dan dikenal di dunia internasional, serta memastikan kebudayaan tersebut tidak punah.



Angklung, budaya Indonesia yang terdaftar di UNESCO - shutterstock.com.2588548409

Pemajuan kebudayaan bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa, agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan globalisasi. Objek pemajuan kebudayaan adalah seluruh elemen kebudayaan bangsa, baik yang bersifat *tangible* (nyata) maupun *intangible* (tak nyata), yang meliputi tradisi, seni, bahasa, adat, dan sistem pengetahuan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pemajuan kebudayaan antara lain:

- ▷ Menjaga keberagaman budaya bangsa.
- ▷ Melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya.
- ▷ Meningkatkan pengetahuan budaya di masyarakat.
- ▷ Memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke dunia internasional.
- ▷ Meningkatkan daya tarik wisata budaya.
- ▷ Memperkuat identitas budaya bangsa.
- ▷ Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan.
- ▷ Meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap kebudayaan lokal.
- ▷ Menyediakan sarana bagi perkembangan seni dan budaya.
- ▷ Melibatkan generasi muda dalam pelestarian budaya.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pelestarian budaya melalui kebijakan yang dapat mendukung pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Berdasarkan Permendagri No. 52 Tahun 2007, pemerintah diharapkan untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan kebudayaan serta mendukung pelestarian adat dan nilai sosial budaya yang ada di daerah. Dengan bantuan kebijakan

dan anggaran, pemerintah dapat memfasilitasi program-program yang mendukung keberlanjutan kebudayaan, seperti pelatihan, seminar, dan festival budaya. Pemerintah juga dapat mempromosikan kebudayaan lokal melalui media dan kerja sama internasional.

Dalam melaksanakan pelestarian dan pengembangan adat serta nilai sosial budaya masyarakat, pemerintah dapat menerapkan beberapa strategi pelaksanaan, yaitu:

- ▷ Menyusun kebijakan yang secara khusus mendukung penguatan dan pelestarian kebudayaan lokal agar tetap lestari di tengah arus globalisasi.
- ▷ Melakukan pendataan secara menyeluruh dan dokumentasi kebudayaan untuk kepentingan pelestarian dan pemanfaatan data di masa depan.
- ▷ Menyediakan alokasi dana yang memadai bagi kegiatan pelestarian kebudayaan, termasuk mendukung seniman lokal dan komunitas budaya.
- ▷ Mengembangkan pendidikan kebudayaan di sekolah-sekolah agar generasi muda lebih mengenal, mencintai, dan melestarikan warisan budaya bangsa.
- ▷ Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan kebudayaan, seperti pelatihan, pementasan, dan pameran seni.
- ▷ Mengadakan festival budaya secara rutin untuk memperkenalkan kekayaan kebudayaan lokal kepada masyarakat luas maupun wisatawan.
- ▷ Menyusun program-program khusus untuk melestarikan seni tradisional dan kerajinan tangan agar tidak punah tergerus perkembangan zaman.
- ▷ Memfasilitasi kegiatan pertukaran budaya dengan negara lain untuk memperkaya wawasan dan memperluas jaringan budaya antarbangsa.
- ▷ Menjamin perlindungan yang kuat terhadap hak kekayaan intelektual kebudayaan lokal agar tidak disalahgunakan atau diklaim pihak lain.



*Benteng Pendem Ngawi,
salah satu kawasan
heritage -
pupr.ngawikab.go.id*

Di sisi lain, cagar budaya yang merupakan situs, bangunan, atau benda-benda yang memiliki nilai sejarah, budaya, atau arkeologis yang harus dilestarikan. Pengukuhan warisan budaya oleh UNESCO menjadi langkah penting dalam menjaga kelestarian warisan budaya dunia. Beberapa contoh warisan budaya Indonesia yang telah terdaftar di UNESCO adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Wayang Kulit. Pengakuan ini menunjukkan betapa pentingnya kebudayaan Indonesia di mata dunia dan menegaskan perlunya usaha bersama untuk melestarikannya agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Suratmi (2016) mengemukakan lima upaya pelestarian budaya yang harus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kebudayaan, yaitu:

- ▷ **Dokumentasi kebudayaan dalam bentuk tulisan atau rekaman** dilakukan untuk merekam nilai-nilai, tradisi, serta praktik budaya yang ada.
- ▷ **Pendidikan kebudayaan untuk generasi muda** melalui kurikulum yang relevan bertujuan menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini.
- ▷ **Penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pelestarian budaya** dilakukan melalui berbagai media seperti seminar, lokakarya, atau kampanye publik.
- ▷ **Pemberdayaan komunitas lokal untuk menjaga kebudayaan** mereka mencakup pelatihan, pendampingan, serta dukungan sumber daya.
- ▷ **Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga kebudayaan** untuk mendukung pelestarian dilakukan melalui program bersama dan berbagi peran.

Kesadaran untuk memiliki dan mencintai budaya sangat penting agar kebudayaan tidak hanya dipahami sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki rasa bangga terhadap budaya sendiri, masyarakat akan lebih kuat semangatnya untuk melestarikan kebudayaan. Kebudayaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diperkenalkan dan diapresiasi oleh generasi mendatang, agar terus bertahan di tengah kehidupan modern.



*Kapal pinisi, salah satu heritage yang perlu dilestarikan -
kemenparekraf.go.id*

Contoh Soal:

Jelaskan mengapa pelestarian tradisi dan kearifan lokal penting bagi suatu bangsa. Berikan contoh tradisi atau kearifan lokal yang perlu dilestarikan di lingkungan sekitar Anda dan bagaimana cara melestarikannya.

Pembahasan:

Pelestarian tradisi dan kearifan lokal sangat penting karena tradisi dan kearifan lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan sejarah panjang masyarakat. Tanpa pelestarian, warisan budaya tersebut bisa hilang atau tergerus oleh perkembangan zaman dan globalisasi. Contoh tradisi yang perlu dilestarikan adalah upacara adat, seperti seboyan atau slametan di Jawa, yang merupakan bagian dari kehidupan spiritual dan sosial masyarakat. Salah satu cara untuk melestarikannya adalah dengan mengadakan acara budaya di sekolah atau komunitas, mengajarkan generasi muda tentang pentingnya tradisi ini, dan mendorong partisipasi aktif dalam pelaksanaannya. Dengan cara ini, tradisi dan kearifan lokal tetap hidup dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.



2. Kebudayaan Nasional sebagai Penguat Solidaritas Bangsa

Proses sejarah rancangan hukum dasar kebudayaan nasional dalam UUD NRI Tahun 1945 dimulai pada masa perumusan dasar negara oleh para tokoh pendiri bangsa. Pada sidang Pleno 15 Juli 1945, Soepomo, salah satu anggota BPUPKI, mengemukakan pemikirannya mengenai kebudayaan nasional yang menjadi bagian penting dari pembentukan negara Indonesia. Soepomo menekankan bahwa kebudayaan nasional Indonesia harus mencerminkan keanekaragaman suku bangsa, agama, dan tradisi yang ada di Indonesia, namun tetap berfungsi sebagai pengikat bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kerangka negara kesatuan. Beliau menganggap bahwa bahasa nasional adalah alat yang vital untuk mempererat persatuan bangsa, karena bahasa mencerminkan identitas dan nilai-nilai bangsa yang harus diteruskan.

Dalam penjelasannya, Yudi Latif (2020) menjelaskan bahwa Pasal 36 dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang bahasa negara menyiratkan lebih dari sekadar bahasa sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol kebudayaan nasional yang harus dipertahankan. Menurut Yudi Latif, bahasa Indonesia bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga merupakan unsur kebudayaan yang memiliki fungsi dalam memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme. Oleh karena itu, pemajuan kebudayaan nasional, termasuk bahasa, adalah bagian dari proyek kebudayaan yang lebih besar dalam membangun persatuan dan identitas Indonesia.

Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, pembahasan mengenai kebudayaan nasional semakin diperdalam dalam konteks pemajuan budaya. Amandemen ini membuka jalan bagi lebih banyak perhatian terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia dalam kerangka negara demokratis. Dalam Pasal 32 UUD 1945 yang baru, negara tidak hanya berkewajiban untuk melestarikan kebudayaan, tetapi juga untuk mengembangkan dan memperkenalkan kebudayaan nasional kepada dunia internasional. Proses ini mencakup pemanfaatan teknologi, pendidikan, dan kebijakan publik yang mendukung pelestarian kebudayaan lokal sekaligus menjadikannya bagian dari kebudayaan global.



Poerbatjaraka, seorang
Budayawan dan
Sejarawan - [wikimedia.com](https://id.wikipedia.org/wiki/Poerbatjaraka)

Beberapa tokoh budaya nasional memiliki pandangan yang signifikan terkait kebudayaan nasional Indonesia. Poerbatjaraka menekankan pentingnya kebudayaan nasional sebagai identitas bangsa yang harus dibangun berdasarkan kebudayaan asli Indonesia, meskipun terbuka terhadap pengaruh budaya luar. Sanusi Pane, seorang sastrawan, berpendapat bahwa kebudayaan nasional harus mencerminkan semangat perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia, dengan menonjolkan keberagaman budaya yang ada. Ki Hadjar Dewantara, tokoh pendidikan, melihat kebudayaan nasional sebagai alat untuk membentuk karakter bangsa, menanamkan nilai-nilai luhur, dan memajukan bangsa melalui pendidikan budaya yang membangun kebersamaan dan solidaritas di antara rakyat Indonesia.

Ki Hadjar Dewantara mengajarkan bahwa konsep ketunggalikaan dalam kebinekaan adalah inti dari kebudayaan nasional Indonesia. Menurut beliau, keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang ada di Indonesia bukanlah hal yang harus dipisahkan, tetapi sebaliknya, menjadi dasar untuk membentuk sebuah persatuan yang kokoh dalam kerangka kebudayaan nasional. Ki

Hadjar Dewantara mengajarkan bahwa kebudayaan nasional harus mampu menyatukan berbagai perbedaan ini menjadi satu identitas bangsa yang utuh. Dalam pandangannya, kebudayaan nasional Indonesia memiliki empat ciri khas:

- a. **Menghargai keberagaman**, dimana kebudayaan nasional Indonesia harus mampu menghargai dan menerima perbedaan yang ada di masyarakat.
- b. **Bersifat inklusif**, artinya kebudayaan nasional harus terbuka terhadap berbagai pengaruh budaya asing yang positif, tanpa kehilangan akar budaya asli.

- c. **Mengutamakan gotong royong**, yakni sebuah budaya atau tradisi yang ada dalam masyarakat Indonesia harus menjadi prinsip dasar dalam kebudayaan nasional.
- d. **Berorientasi pada kemajuan**, dimana kebudayaan nasional harus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, sambil tetap menjaga nilai-nilai dasar yang ada.



Nelayan pertahankan tradisi lewat gotong royong turunkan kapal - detik.com

Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan berperan sangat penting dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Kebudayaan nasional Indonesia harus mampu menjadi alat penghubung antara berbagai kelompok etnis dan budaya di Indonesia. Dalam pandangannya, kebudayaan bukan hanya sekedar nilai-nilai atau simbol budaya, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan sosial-politik yang memengaruhi pembentukan identitas nasional. Kebudayaan, menurut Koentjaraningrat, berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara keanekaragaman yang ada dengan tujuan bersama untuk membangun bangsa yang harmonis dan maju.

Terdapat tiga syarat bagi kebudayaan agar dapat berfungsi sebagai pemersatu bangsa, yaitu:

- Keterbukaan terhadap Keberagaman.** Kebudayaan harus mampu menerima dan menghargai perbedaan yang ada di masyarakat, baik dalam hal suku, agama, atau adat.
- Nilai-nilai Kebersamaan.** Kebudayaan harus mengutamakan nilai kebersamaan, saling menghormati, dan gotong royong sebagai fondasi dalam masyarakat.
- Mengandung Identitas Bersama.** Kebudayaan harus mencerminkan identitas nasional yang dapat diterima oleh semua elemen masyarakat, memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa.

Di sisi lain, kebudayaan nasional Indonesia dapat berfungsi sebagai gagasan kolektif yang menjadi wahana komunikasi, pengertian, dan solidaritas di antara seluruh elemen masyarakat Indonesia. Gagasan kolektif ini menciptakan pemahaman bersama tentang pentingnya menjaga dan melestarikan budaya Indonesia sebagai bagian dari identitas nasional. Kebudayaan menjadi pengikat yang menghubungkan individu-individu dari berbagai latar belakang, memperkuat rasa persatuan, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya Indonesia. Salah satu contoh budaya nasional yang menggambarkan hal ini adalah Batik, yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, dan menjadi simbol kebanggaan nasional yang menghubungkan masyarakat Indonesia dari berbagai daerah.

Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia adalah salah satu elemen penting dalam kebudayaan nasional Indonesia. Sebagai bahasa persatuan, Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyatukan beragam suku dan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Proses Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dimulai sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928, di mana pemuda Indonesia dari berbagai daerah sepakat untuk menjadikan Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama. Sumpah Pemuda tersebut menjadi tonggak sejarah penting dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk memupuk rasa persatuan dan kebangsaan. Sejak saat itu, Bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan yang menghubungkan berbagai kelompok etnis dan budaya yang ada di Indonesia.

Pada tahun 1999, dilaksanakan sebuah Seminar Politik Bahasa Nasional yang menghasilkan uraian fungsi bahasa Indonesia, diantaranya:

a. Lambang Kebanggaan Nasional

Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional mengandung makna bahwa bahasa ini merupakan simbol identitas bangsa yang dapat membanggakan rakyat Indonesia di kancah internasional. Sebagai bahasa negara, Bahasa Indonesia mencerminkan perjuangan dan keberhasilan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan membangun negara yang berdaulat. Bahasa ini menjadi alat untuk memperkenalkan budaya dan kekayaan intelektual Indonesia ke dunia luar.

b. Lambang Identitas Nasional

Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai lambang identitas nasional yang mengikat seluruh rakyat Indonesia. Melalui Bahasa Indonesia, masyarakat Indonesia dapat menyatukan berbagai perbedaan etnis, suku, dan agama yang ada di Indonesia, sehingga memperkuat rasa kebangsaan. Bahasa ini mencerminkan karakter bangsa yang multikultural, tetapi tetap memiliki satu identitas yang bersatu.

c. Alat Pemersatu

Sebagai alat pemersatu, Bahasa Indonesia memfasilitasi komunikasi antar individu dari berbagai suku dan daerah di Indonesia yang memiliki bahasa daerah masing-masing. Bahasa Indonesia membantu menciptakan kesamaan dalam berkomunikasi di berbagai sektor kehidupan, baik itu dalam pendidikan, politik, budaya, maupun kegiatan sosial. Oleh karena itu, Bahasa Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

d. Alat Penghubung Antar Budaya dan Antar Daerah

Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah yang ada di Indonesia. Dengan keberagaman budaya dan bahasa daerah yang ada, Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang dapat menjembatani perbedaan ini, memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah dapat saling berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan memperkaya budaya satu sama lain.



*Festival budaya menjadi penghubung agar saling memahami -
beritajabar.news*

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bahasa negara, yang tercantum dalam Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa "Bahasa negara adalah bahasa Indonesia." Ini menegaskan bahwa Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa resmi negara yang digunakan dalam kehidupan kenegaraan, pemerintahan, hukum, dan komunikasi antar lembaga negara. Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memperkuat peranannya dalam menjaga keutuhan negara dan menguatkan identitas nasional bangsa Indonesia.

Berikut ini adalah Isi Pasal 25 Ayat ayat 1 sampai 3 pada UUD NRI Tahun 1945:

- a. Ayat (1): Negara Indonesia menjamin kebebasan setiap orang untuk menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Ayat (2): Bahasa Indonesia digunakan dalam semua urusan pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan sosial yang bersifat nasional.
- c. Ayat (3): Negara berkewajiban untuk memajukan penggunaan bahasa Indonesia agar semakin kuat dan dikenal luas di tingkat internasional.

Batik

Batik adalah seni dan teknik pewarnaan kain yang menggunakan lilin atau malam sebagai bahan dasar untuk membuat pola pada kain. Batik memiliki akar budaya yang sangat dalam di Indonesia, terutama di Jawa, Bali, dan Yogyakarta. Batik tidak hanya berfungsi sebagai kain pakaian, tetapi juga mencerminkan identitas budaya dan filosofi kehidupan masyarakat Indonesia. Keberagaman motif dan warna pada batik memiliki makna yang dalam dan berkaitan dengan status sosial, adat, serta cerita-cerita tradisional.

Batik diakui oleh UNESCO sebagai *Intangible Cultural Heritage* (ICH) pada 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi, yang mengakui batik sebagai warisan budaya dunia yang harus dilestarikan. Pengakuan ini menjadi bukti bahwa batik merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang kaya dan berharga. UNESCO memberikan penghargaan ini karena batik mencerminkan nilai budaya dan teknik yang telah berkembang di Indonesia selama berabad-abad. Pengakuan ini juga menjadi bukti bahwa batik tidak hanya memiliki nilai seni, tetapi juga nilai sejarah dan sosial yang sangat tinggi.



Batik sebagai identitas budaya - shutterstock.com.250320253/2502939511

Selain itu, pada Kepres RI No. 33 Tahun 2009, Hari Batik Nasional ditetapkan sebagai bentuk penghormatan terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia merayakan Hari Batik Nasional untuk memperingati pengakuan internasional terhadap batik dan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya tradisional ini. Perayaan ini juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya pelestarian batik sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia.

Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam Batik sebagai Warisan Budaya Nasional, diantaranya:

a. Penyampaian Nilai Filosofis

Batik mengandung nilai-nilai filosofis yang mendalam, mencerminkan pandangan hidup dan norma masyarakat Indonesia. Setiap motif batik memiliki cerita dan simbol yang mengandung makna tentang kehidupan, alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Misalnya, motif batik sekar jagad, salah satu motif batik khas Indonesia yang berasal dari Solo dan Yogyakarta memiliki makna kecantikan dan keindahan keberagaman yang memesona.

b. Kearifan Lokal

Batik juga merupakan representasi kearifan lokal yang berkembang di berbagai daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik yang khas, yang mencerminkan budaya dan tradisi setempat, serta digunakan untuk berbagai acara adat dan keagamaan.

c. Keberagaman dan Kreativitas

Batik mencerminkan keberagaman budaya Indonesia yang sangat kaya. Selain itu, batik juga menunjukkan kreativitas luar biasa dari masyarakat Indonesia dalam menciptakan desain yang indah dan fungsional. Keberagaman motif batik memberikan ruang bagi para seniman untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya yang relevan dengan zaman.

Batik Indonesia memiliki ragam yang sangat beragam, mulai dari batik tulis, batik cap, hingga batik kombinasi. Setiap daerah di Indonesia, seperti Yogyakarta, Solo, Pekalongan, dan Cirebon, memiliki motif batik yang khas. Misalnya, batik Solo dikenal dengan motif parang, sedangkan batik Pekalongan terkenal dengan motif yang lebih modern dan warna yang cerah. Setiap motif batik mengandung makna tertentu, yang berkaitan dengan adat, filosofi hidup, dan sejarah budaya masyarakat setempat. Khazanah batik Indonesia tidak hanya terbatas pada pakaian, tetapi juga meliputi berbagai produk kerajinan dan seni yang menggunakan teknik batik, memperlihatkan betapa luasnya dampak budaya ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Contoh Soal:

Jelaskan bagaimana kebudayaan nasional dapat berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia! Berikan contoh kebudayaan nasional yang mendukung persatuan di Indonesia.

Pembahasan:

Kebudayaan nasional berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia dengan menciptakan kesamaan identitas di tengah keberagaman suku, agama, dan bahasa yang ada. Salah satu contoh kebudayaan nasional yang mendukung persatuan adalah Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang artinya "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Semboyan ini mencerminkan bahwa meskipun Indonesia memiliki beragam suku, bahasa, dan adat, kita tetap satu sebagai bangsa. Selain itu, Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan juga memiliki peran besar dalam menghubungkan seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dalam berkomunikasi dan bekerja sama. Dengan adanya kebudayaan yang menyatukan, seperti Bahasa Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat Indonesia dapat hidup harmonis dan saling menghargai perbedaan.

Fakta Unik Seputar Pancasila

1.000 Lebih Motif Batik Khas Indonesia

Indonesia memiliki lebih dari 1.000 motif batik yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik yang khas dan mencerminkan budaya serta tradisi lokal mereka. Motif batik tersebut bervariasi, mulai dari yang memiliki makna filosofis hingga yang mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Beberapa motif batik yang terkenal di antaranya adalah Parang (dari Yogyakarta dan Solo), Kawung (dari Cirebon), dan Mega Mendung (dari Cirebon). Setiap motif memiliki cerita dan simbol yang mendalam, yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia.



Batik motif Sekar Jagad -
shutterstock.com.2130489941



3. Budaya Nasional sebagai Karakteristik dan Identitas Bangsa

Koentjaraningrat, seorang ahli antropologi Indonesia, berpendapat bahwa kebudayaan nasional Indonesia haruslah memiliki sifat yang khas, mencerminkan karakter bangsa yang beragam namun tetap dapat bersatu dalam identitas yang sama. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan nasional Indonesia seharusnya menggabungkan berbagai unsur budaya yang ada di setiap daerah dan suku bangsa, namun tetap memiliki ciri yang dapat dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman tersebut, menurutnya, bukanlah hambatan, melainkan kekuatan yang memperkaya kebudayaan Indonesia secara keseluruhan. Sebagai contoh, meskipun setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda, seperti batik, tari tradisional, atau alat musik, semua itu bisa digabungkan dalam satu kesatuan yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa.

Menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kebudayaan nasional Indonesia adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, yang mencerminkan ciri khas bangsa dan menjadi sumber kekuatan dalam membangun persatuan. UU tersebut menegaskan bahwa kebudayaan nasional Indonesia harus mampu menciptakan identitas bangsa yang kuat, berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kebudayaan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan nasional bukan hanya sekedar warisan, tetapi juga harus dapat diadaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman, sehingga tetap relevan bagi generasi masa depan.

Koentjaraningrat juga berpendapat bahwa kebudayaan nasional merupakan identitas bangsa Indonesia. Menurutnya, identitas suatu bangsa dapat ditemukan dalam kebudayaan yang dimilikinya, karena kebudayaan mencerminkan cara hidup, nilai, dan pola pikir masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kebudayaan nasional adalah wadah yang menyatukan berbagai kebudayaan lokal yang ada di Indonesia, membentuk satu kesatuan yang memperkuat rasa kebangsaan. Dengan adanya kebudayaan nasional, masyarakat Indonesia dapat merasa memiliki identitas yang sama, meskipun berbeda dalam bahasa, suku, dan agama.

Terdapat tiga syarat yang harus melekat pada kebudayaan nasional agar dapat menjadi identitas bangsa:

- a. **Memiliki nilai yang mempersatukan**, dimana kebudayaan nasional harus memiliki nilai-nilai yang bisa menghubungkan dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau budaya lokal.



Tari Kecak, harmonisasi drama musikal cemin karakter bangsa - kemenparekrat.go.id

- b. Mencerminkan karakter bangsa**, dimana kebudayaan nasional harus mencerminkan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur, seperti gotong royong, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman.
- c. Dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.** Kebudayaan nasional harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan akar dan nilai-nilai dasarnya, sehingga tetap relevan dan dapat diterima oleh generasi muda.

Keragaman budaya di Indonesia bukan hanya sebagai kekayaan yang harus dilestarikan, tetapi juga sebagai sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Keberagaman budaya yang ada di setiap daerah, baik itu dalam bentuk tradisi, seni, bahasa, maupun kepercayaan, memberikan nilai tambah yang tidak ternilai harganya. Potensi ini dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata, memperkaya sektor ekonomi, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

Budaya daerah yang akan menjadi budaya nasional harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Keterwakilan dalam Keberagaman

Budaya lokal yang dapat menjadi budaya nasional harus memiliki kemampuan untuk mewakili berbagai elemen budaya yang ada di Indonesia. Hal ini berarti bahwa budaya tersebut tidak hanya mencerminkan satu kelompok atau daerah saja, tetapi bisa diterima dan dihargai oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Misalnya, Batik yang berasal dari Jawa, kini telah menjadi simbol kebudayaan nasional karena diterima dan dibanggakan oleh berbagai kalangan dari berbagai suku dan daerah di Indonesia.

b. Mempunyai Nilai yang Mengikat Bangsa

Budaya lokal yang menjadi budaya nasional harus mengandung nilai-nilai universal yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia, terlepas dari perbedaan suku, agama, atau wilayah. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan rasa persatuan dapat menjadi dasar kebudayaan nasional, karena mampu mempererat hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Sebagai contoh, tradisi gotong royong yang merupakan bagian dari budaya lokal di berbagai daerah, kini diterima dan dijadikan bagian dari kebudayaan nasional yang mengikat bangsa Indonesia.

c. Dapat Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Untuk menjadi kebudayaan nasional, budaya lokal harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, tanpa kehilangan esensi dan nilai dasarnya. Adaptasi ini penting agar kebudayaan tetap relevan di masa depan dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Sebagai contoh, seni pertunjukan tradisional seperti Wayang Kulit kini dikemas dengan teknologi modern dalam pertunjukan yang lebih menarik, namun tetap mempertahankan pesan moral dan budaya yang terkandung di dalamnya.

Sistem kebudayaan memiliki nilai budaya yang mencakup berbagai norma, kepercayaan, tradisi, dan praktik sosial yang membentuk cara hidup suatu masyarakat. Nilai budaya ini berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sosial dan membentuk karakter masyarakat. Nugroho Notosusanto, dalam kajian budaya Indonesia, menyatakan bahwa sistem nilai budaya adalah inti dari kebudayaan yang mencerminkan pandangan hidup suatu bangsa. Nilai-nilai budaya ini tidak hanya terwujud dalam bentuk benda, tetapi juga dalam bentuk perilaku sosial yang mencerminkan identitas dan karakter bangsa.

Budaya pembuatan kapal Pinisi yang berasal dari Sulawesi Selatan adalah contoh yang menggambarkan sistem nilai budaya yang dalam. Pembuatan kapal Pinisi bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai ketekunan, kemandirian, dan kebersamaan. Kapal Pinisi, yang telah menjadi ikon budaya Indonesia, mengandung filosofi kehidupan yang mengajarkan kerja keras dan hubungan manusia dengan alam. Proses pembuatan kapal ini yang melibatkan banyak orang, dari perancang, pembuat, hingga pelaut, memperlihatkan betapa eratnya nilai gotong royong dan kebersamaan.



Proses pembuatan kapan pinisi di tepi pantai - jelajahsuwanto.com

Sistem nilai budaya ini juga terlihat dalam cara masyarakat menginterpretasikan alam dan lingkungan mereka. Kapal Pinisi, yang dirancang untuk pelayaran jauh, mengajarkan nilai hubungan manusia dengan laut sebagai sumber kehidupan. Hal ini menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat mencerminkan filosofi dan nilai-nilai hidup yang lebih besar yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain itu, budaya seperti pembuatan batik, yang merupakan simbol kehalusan dan ketelitian, mengajarkan nilai estetika dan filosofi yang dalam. Nilai budaya ini mengajarkan kesabaran, ketelitian, dan penghormatan terhadap warisan nenek moyang. Melalui sistem kebudayaan seperti batik, kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai sosial dan moral yang terkandung dalam kebudayaan Indonesia terus hidup dan diteruskan ke generasi berikutnya.

Secara mendalam, batik memiliki makna filosofis yang tercermin pada setiap coraknya. Misalnya, motif Parang yang sering ditemukan pada batik Solo dan Yogyakarta melambangkan kekuatan dan keberanian. Parang menggambarkan aliran energi yang terus mengalir dan tak terputus, mencerminkan semangat yang tak kenal henti dalam menghadapi tantangan hidup. Begitu pula dengan motif Kawung, yang melambangkan kesucian dan kebijaksanaan. Motif ini terinspirasi oleh bentuk buah kawung (buah aren) yang digunakan sebagai simbol keseimbangan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan.

Selain itu, motif Mega Mendung dari Cirebon memiliki filosofi yang mengacu pada kesuburan dan kekuatan alam, melambangkan hubungan erat antara manusia dan langit. Corak-corak batik ini tidak hanya sekadar desain visual, tetapi juga mengandung nilai-nilai kehidupan yang menjadi pedoman bagi pemakainya. Setiap motif memiliki makna yang mengajarkan tentang keseimbangan, hubungan sosial, dan rasa hormat terhadap alam dan Tuhan.

Kekhasan budaya nasional Indonesia pada hakikatnya menjadi jati diri dan identitas bangsa yang membedakan Indonesia dari negara lain. Identitas bangsa Indonesia tercermin dalam kebudayaan yang kaya dan beragam, yang menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya di Indonesia. Winarno (2019) menjelaskan bahwa identitas bangsa adalah hasil dari pembentukan kebudayaan yang berkembang di tengah masyarakat, yang kemudian menjadi ciri khas yang membedakan bangsa ini dari bangsa lain. Budaya nasional Indonesia, yang mencakup seni, bahasa, adat, dan tradisi, berperan sebagai pengikat yang memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan.

Pemaknaan jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam Pancasila, yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Menurut Kaelan (2002) dalam bukunya Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila mengajarkan nilai-nilai yang mencerminkan keadilan

sosial, persatuan, serta penghormatan terhadap keberagaman dan toleransi. Jati diri bangsa Indonesia terwujud dalam sikap hidup yang saling menghargai, bergotong royong, dan hidup dalam harmoni meskipun berbeda-beda.

Beberapa bentuk dan ciri jati diri bangsa Indonesia adalah sifat religius, yang tercermin dalam penghormatan terhadap berbagai agama yang ada di Indonesia; persatuan, yang terlihat dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang mengajarkan bahwa meskipun berbeda-beda, kita tetap satu, dan keadilan sosial yang senantiasa mengutamakan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Nilai-nilai ini membentuk karakter bangsa Indonesia dan menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan adil.



Musyawarah, salah satu nilai budaya bangsa - atmago.com

Contoh Soal:

Jelaskan bagaimana kebudayaan nasional dapat menjadi identitas dan jati diri bangsa Indonesia! Berikan contoh kebudayaan nasional yang mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Pembahasan:

Kebudayaan nasional menjadi identitas dan jati diri bangsa Indonesia karena mencerminkan karakter, nilai, dan cara hidup masyarakat Indonesia yang beragam namun tetap bersatu. Sebagai contoh, Batik adalah salah satu kebudayaan nasional yang telah diakui oleh UNESCO. Batik tidak hanya merupakan seni tekstil, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kesabaran, ketelitian, dan hubungan yang erat antara manusia dan alam. Selain itu, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan nasional juga mencerminkan identitas Indonesia yang mengutamakan persatuan dalam keberagaman. Kebudayaan-kebudayaan seperti ini memperkuat rasa kebanggaan dan menjadi simbol dari jati diri bangsa Indonesia yang kaya akan tradisi dan budaya.

Fakta Unik Seputar Pancasila

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Istilah "Bhinneka Tunggal Ika" berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya "Berbeda-beda tetapi tetap satu." Frasa ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma, yang ditulis oleh Mpu Tantular, seorang pujangga besar dari era Majapahit. Sutasoma merupakan salah satu karya sastra yang mengandung ajaran tentang persatuan dalam keberagaman, yang menjadi landasan filosofi bagi bangsa Indonesia.



Bhinneka Tunggal Ika - shutterstock.com.2601991093

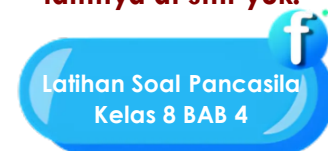
Rangkuman

1. Budaya nasional adalah bagian integral dari identitas bangsa, yang mencerminkan nilai, tradisi, dan cara hidup masyarakat Indonesia.
2. Pelestarian budaya adalah upaya untuk menjaga dan merawat kebudayaan agar tetap hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi mendatang.
3. Proses pelestarian budaya melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai tiga pilar utama dalam menjaga kebudayaan nasional.
4. Bahasa Indonesia, sebagai bahasa persatuan, memiliki peran sentral dalam menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia. Hal ini dimulai sejak Sumpah Pemuda 1928.
5. Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 mengatur Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang digunakan dalam semua urusan pemerintahan, pendidikan, dan komunikasi nasional.
6. Bahasa Indonesia memiliki empat fungsi utama: lambang kebanggaan, identitas nasional, alat pemersatu, dan penghubung antar budaya dan daerah.
7. Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO pada tahun 2009 sebagai warisan budaya takbenda dunia.
8. Batik menggambarkan nilai budaya yang dalam, dengan setiap motif yang mencerminkan filosofi hidup, kearifan lokal, dan keberagaman yang ada di Indonesia.
9. Hari Batik Nasional, yang diperingati setiap 2 Oktober, menjadi momentum untuk melestarikan batik sebagai bagian dari kebudayaan nasional.
10. Kebudayaan nasional mencerminkan karakter dan identitas bangsa Indonesia yang beragam namun tetap satu. Kebudayaan ini menjadi pengikat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan dalam keberagaman.
11. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan nasional harus mencerminkan nilai-nilai luhur dan karakter bangsa yang dapat dibanggakan. Kebudayaan ini juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
12. Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu) menjadi semboyan yang menggambarkan persatuan dalam kebudayaan nasional Indonesia.
13. Keragaman budaya Indonesia adalah kekayaan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk memperkaya kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
14. Keluarga berperan penting dalam menjaga tradisi dan kearifan lokal melalui pendidikan informal, dengan mengajarkan nilai-nilai budaya kepada anak-anak.
15. Sekolah berfungsi sebagai tempat untuk memperkenalkan kebudayaan nasional melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan siswa dalam seni, budaya, dan bahasa Indonesia.
16. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan lokal melalui kegiatan bersama, seperti festival budaya dan pelatihan keterampilan tradisional.
17. Kebudayaan nasional berperan sebagai alat pemersatu bangsa dengan mengutamakan nilai-nilai yang mengikat masyarakat Indonesia meskipun mereka berasal dari berbagai suku dan agama.
18. Syarat kebudayaan nasional menjadi identitas bangsa antara lain: memiliki nilai yang mengikat dan menyatukan bangsa, mencerminkan karakter bangsa yang luhur, dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan nasional Indonesia?
 - A. Kebudayaan yang hanya ada di satu suku bangsa
 - B. Kebudayaan yang diwariskan oleh penjajah
 - C. Kebudayaan yang mencerminkan identitas dan karakter bangsa Indonesia
 - D. Kebudayaan yang hanya ditemukan di daerah tertentu
2. Apa yang menjadi tujuan utama pelestarian budaya?
 - A. Untuk mempertahankan kebudayaan lokal
 - B. Untuk melestarikan kebudayaan agar tetap hidup dan diwariskan ke generasi mendatang
 - C. Agar kebudayaan hanya berkembang di daerah tertentu
 - D. Untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke luar negeri
3. Apa fungsi utama Bahasa Indonesia sebagai kebudayaan nasional?
 - A. Sebagai alat komunikasi antar negara
 - B. Sebagai lambang kebanggaan, identitas, alat pemersatu, dan penghubung antar budaya dan daerah
 - C. Sebagai bahasa yang hanya digunakan dalam pendidikan
 - D. Sebagai bahasa resmi di luar negeri
4. Batik diakui oleh UNESCO pada tahun?
 - A. 2005
 - B. 2009
 - C. 2012
 - D. 2015
5. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan nasional Indonesia harus mencerminkan?
 - A. Budaya asing yang lebih maju
 - B. Nilai-nilai luhur yang dapat dibanggakan seluruh rakyat Indonesia
 - C. Hanya budaya dari satu suku bangsa
 - D. Budaya yang hanya mengutamakan seni
6. Apa yang dimaksud dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika"?
 - A. Semua suku harus bersatu dalam kebudayaan yang sama
 - B. Berbeda-beda tetapi tetap satu
 - C. Semua budaya harus sama
 - D. Hanya satu budaya yang diperbolehkan
7. Manakah yang bukan merupakan salah satu syarat agar budaya lokal dapat menjadi budaya nasional?
 - A. Keterwakilan dalam keberagaman
 - B. Mempunyai nilai yang mengikat bangsa
 - C. Harus terbatas pada satu wilayah
 - D. Dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

- Kaelan, J. (2002). Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Koentjaraningrat. (1986). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Latif, Y. (2020). Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Nasional. Jakarta: Kompas.
- Nugroho, R. (2017). Sistem Nilai Budaya sebagai Inti Kebudayaan. Bandung: Pustaka Cendekia.
- Notosusanto, N. (1989). Budaya dan Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Soepomo. (1945). Peran Kebudayaan dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Winarno, S. (2019). Identitas Bangsa dan Kebudayaan Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



BAB 5: MENJAGA PERSATUAN BANGSA DAN NEGARA

Karakter Pelajar Pancasila

- ▷ **Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia**
Menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya sesuai semangat wawasan Nusantara.
- ▷ **Bergotong royong**
Menggunakan wawasan Nusantara sebagai pemersatu bangsa.
- ▷ **Berkebinekaan global**
Mengidentifikasi tantangan dalam penerapan wawasan Nusantara dan menemukan solusi berdasarkan nilai kebangsaan.

Kata Kunci: Wawasan Nusantara, Pancasila, UUD 1945, NKRI, Persatuan, Identitas Bangsa, Keutuhan, Gotong Royong, Nasionalisme, Toleransi

Tujuan Pembelajaran: Menelaah Wawasan Nusantara dan Perannya

- 1. Menguraikan definisi dan tujuan dari wawasan Nusantara**
 - ▷ Menjelaskan unsur-unsur yang membentuk wawasan Nusantara.
 - ▷ Menjelaskan bagaimana wawasan Nusantara berperan dalam memperkuat identitas bangsa.
- 2. Menjelaskan posisi dan peran penting wawasan Nusantara dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**
 - ▷ Menganalisis hubungan wawasan Nusantara dengan Pancasila dan UUD 1945.
 - ▷ Mengidentifikasi dampak wawasan Nusantara terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3. Menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan wawasan**
 - ▷ Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - ▷ Menyebutkan faktor internal yang dapat menghambat implementasi wawasan Nusantara.
 - ▷ Menyarankan solusi untuk mengatasi tantangan dalam penerapan wawasan Nusantara.

4. Menerapkan sikap-sikap yang mendukung wawasan Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

- ▷ Menumbuhkan sikap saling menghormati dan toleransi antar suku, agama, dan budaya.
- ▷ Menerapkan prinsip gotong royong dalam menyelesaikan masalah sosial dan kebangsaan.



F I T R I



1. Memelihara Persatuan Bangsa dengan Wawasan Nusantara

Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara memiliki urgensi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan bahasa, Indonesia memerlukan suatu pandangan atau *outlook* yang dapat menyatukan seluruh elemen masyarakatnya. Wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi setiap individu dalam memandang negara ini sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan sebagai kumpulan bagian-bagian yang terpisah. Dengan wawasan ini, setiap warga negara diharapkan memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk menjaga persatuan serta mengedepankan kepentingan bersama, mengesampingkan perbedaan yang ada. Ini merupakan fondasi utama dalam membangun negara yang stabil, aman, dan sejahtera.

Sebagai pedoman hidup, wawasan Nusantara memberikan arah bagi setiap individu untuk memahami pentingnya menjaga keutuhan NKRI dalam segala aspek kehidupan. Hal ini mencakup pengakuan terhadap keberagaman yang ada dan cara-cara untuk mengelola perbedaan tersebut agar tetap harmonis. Wawasan Nusantara juga mengajarkan kita untuk mencintai tanah air, menjaga kelestarian alam, dan berperan aktif dalam pembangunan nasional. Dengan wawasan ini, setiap langkah yang diambil oleh individu maupun kelompok harus selalu berlandaskan pada rasa nasionalisme dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Inilah yang menjadikan wawasan Nusantara sebagai pedoman yang membimbing setiap aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya di Indonesia.

Kata "Nusantara" berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "nusa" yang berarti pulau atau kepulauan, dan "antara" yang berarti antara atau di antara. Secara harfiah, Nusantara dapat diartikan sebagai "kepulauan yang ada di antara" atau "kepulauan yang terletak di antara" dua tempat yang lebih besar. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada wilayah yang terdiri dari pulau-pulau yang membentang antara dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oleh karena itu, Nusantara mengacu pada wilayah yang saat ini dikenal sebagai Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di antara dua samudera tersebut.



Nusantara terdiri dari banyak pulau yang terletak antara dua samudra - wikimedia.com

Secara umum, pemaknaan Nusantara berkembang menjadi simbol identitas bangsa Indonesia yang mencakup keseluruhan wilayah negara. Nusantara tidak hanya merujuk pada sekumpulan pulau, tetapi

juga menggambarkan konsep kesatuan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam pengertian yang lebih luas, Nusantara mencakup kebudayaan, sejarah, serta nilai-nilai yang mengikat masyarakat Indonesia. Melalui pengertian ini, Nusantara menjadi sebuah istilah yang mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia, yang menghargai perbedaan, namun tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Implementasi Konsep Nusantara Secara Historis

Konsep Nusantara pertama kali dikenal dan digunakan dalam sejarah Indonesia pada masa kejayaan Majapahit, khususnya melalui ikrar legendaris yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa. Pada saat itu, Gajah Mada berikrar untuk menyatukan seluruh kepulauan yang kini dikenal sebagai Indonesia di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah tersebut menjadi tonggak awal penggunaan konsep Nusantara, yang menunjukkan cita-cita untuk mempersatukan berbagai wilayah yang ada di kepulauan tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Konsep ini mencerminkan visi jauh ke depan tentang pentingnya persatuan wilayah Nusantara dalam bingkai satu bangsa.

Berikut ini adalah isi dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada, yaitu:

"Sira Gajah Madapatih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: "Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Guron, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa."

"Jika sudah menaklukkan Nusantara, saya akan menikmati palapa (hidangan yang disajikan setelah berhasil menaklukkan wilayah). Jika sudah menaklukkan Guron, Seram, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah saya akan menikmati palapa."

Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada memiliki makna yang sangat dalam. Secara harfiah, sumpah ini menggambarkan tekad Gajah Mada untuk menyatukan seluruh wilayah di Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Istilah "palapa" merujuk pada jenis makanan yang hanya bisa dinikmati setelah tugas besar selesai, yang dalam konteks ini menyimbolkan pencapaian besar Gajah Mada, yaitu mempersatukan seluruh wilayah kepulauan Nusantara. Dalam teks ini, terlihat adanya janji kesetiaan terhadap tujuan besar, yaitu menyatukan wilayah Nusantara dalam satu pemerintahan.

Dari segi konteks, sumpah ini sangat relevan dengan kondisi politik dan sosial pada masa Majapahit. Sebagai Patih, Gajah Mada memegang kendali atas kebijakan besar kerajaan dan melihat bahwa persatuan wilayah adalah hal yang sangat penting demi kelangsungan kekuasaan Majapahit. Dengan bersumpah untuk menaklukkan seluruh wilayah Nusantara, Gajah Mada menunjukkan bahwa dia tidak hanya berjuang untuk kepentingan kerajaan Majapahit, tetapi juga untuk menciptakan kesatuan yang lebih luas yang mencakup seluruh kepulauan Indonesia. Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya sebuah bangsa yang utuh, meskipun pada masa itu Indonesia belum terbentuk sebagai negara modern.

Menurut Manu J. Widyaseputra, kata "Nusantara" memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar sebuah wilayah geografis. Nusantara tidak hanya merujuk pada kumpulan pulau-pulau, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang mengikat bangsa Indonesia, seperti persatuan dan keberagaman. Dalam pandangan Widyaseputra, Nusantara adalah simbol kesatuan yang tak terbagi meskipun memiliki banyak perbedaan dalam aspek budaya, bahasa, dan agama. Nusantara, dalam konteks ini, mengandung makna tentang keberagaman yang harus dipertahankan, dengan semua elemen yang ada di dalamnya bersatu dalam satu wadah, yakni Indonesia.

Penggunaan kata Nusantara terus berkembang sejak zaman Patih Gajah Mada hingga kini menjadi sinonim dari Indonesia. Ki Hadjar Dewantara, salah satu tokoh penting dalam pendidikan Indonesia, memperkenalkan dan mengembangkan konsep Nusantara dalam konteks kebangsaan dan pendidikan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Nusantara menjadi identitas bagi bangsa yang ingin merdeka dan bersatu. Kata ini digunakan untuk menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya dalam semangat kebangsaan yang lebih besar. Seiring dengan berkembangnya perjuangan kemerdekaan, Nusantara semakin identik dengan Indonesia, dan setelah kemerdekaan, kata ini menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, suku, dan budaya. Kini, Nusantara tidak hanya digunakan dalam konteks sejarah, tetapi juga sebagai istilah yang menggambarkan keseluruhan bangsa dan negara Indonesia.



Monumen Patih Gajah Mada -
[shutterstock.com.2329037379](https://www.shutterstock.com/2329037379)

Nusantara dalam Bingkai Kenegaraan

Nusantara sebagai konsepsi kenegaraan di Indonesia tercermin dalam Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk kesatuan, yang terdiri atas wilayah yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan." Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang mencakup seluruh wilayah Nusantara, baik daratan maupun lautan, serta memiliki kedudukan yang utuh sebagai satu bangsa. Konsep ini tidak hanya mengakui pentingnya keberagaman yang ada, tetapi juga menggarisbawahi bahwa seluruh wilayah yang membentuk Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.

a. Pandangan Wan Usman

Menurut Wan Usman, wawasan Nusantara adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang menyadari bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan bahasa yang berbeda, namun tetap harus dihargai dan dipersatukan dalam satu kesatuan. Wawasan Nusantara, dalam pandangannya, adalah sebuah konsep yang mendorong pemahaman bahwa keutuhan bangsa Indonesia bergantung pada kemampuannya untuk mengelola keberagaman tersebut secara harmonis dan terkoordinasi. Hal ini menekankan bahwa meskipun ada banyak perbedaan, Indonesia tetap harus memiliki satu visi, tujuan, dan arah untuk membangun bangsa yang solid.

b. Pandangan Kelompok Kerja Wawasan Nusantara (1999)

Kelompok Kerja Wawasan Nusantara (1999) mengartikan wawasan Nusantara sebagai pandangan atau cara berpikir yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, baik dari segi wilayah, budaya, politik, maupun ekonomi. Pandangan ini berfokus pada pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan negara yang dilandasi oleh prinsip Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara diharapkan dapat membimbing masyarakat Indonesia untuk menyikapi perbedaan dengan cara yang positif dan konstruktif, sehingga dapat menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara umum, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai pandangan hidup yang berfokus pada kesatuan dan keberagaman Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari banyak pulau, suku, budaya, dan agama. Wawasan ini mengajak masyarakat untuk melihat Indonesia sebagai satu kesatuan yang harus dijaga, baik dalam konteks politik, sosial, maupun budaya. Dengan wawasan ini, setiap individu diharapkan dapat mengedepankan semangat persatuan, menjaga keharmonisan, serta berperan aktif dalam pembangunan negara. Wawasan Nusantara menjadi landasan penting dalam membangun

kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera.

Adapun wawasan Nusantara memiliki tiga unsur dasar utama:



*Karnaval kebudayaan sebagai wadah keragaman Nusantara
- shutterstock.com.2505070779*

a. Wadah/Contour

Menurut Damri dan Putra (2020), unsur pertama dari wawasan Nusantara adalah wadah atau *contour*, yang merujuk pada wilayah geografi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar antara dua samudra. Wadah ini mencerminkan kesatuan wilayah Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Keberagaman geografis, mulai dari pulau-pulau besar hingga pulau-pulau kecil, serta samudra yang memisahkan wilayah tersebut, menjadikan Indonesia sebagai suatu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, menjaga integritas wilayah ini sangat penting untuk mempertahankan keutuhan negara dan mencegah terjadinya perpecahan.

b. Isi/Content

Unsur kedua dari wawasan Nusantara adalah isi atau *content*, yang mencakup elemen-elemen penting yang ada dalam wilayah Indonesia, seperti budaya, agama, bahasa, dan nilai-nilai sosial. Keberagaman ini memberikan warna yang berbeda, namun menjadi bagian dari kesatuan yang harus dihargai dan dikelola dengan baik. Dalam konteks wawasan Nusantara, setiap elemen yang ada di Indonesia harus dilihat sebagai kekuatan, bukan sebagai sumber perpecahan. Pengelolaan keberagaman ini sangat penting untuk menciptakan persatuan di tengah perbedaan yang ada.

c. Tata Laku/Conduct

Unsur ketiga adalah tata laku atau *conduct*, yang merujuk pada sikap, perilaku, dan cara hidup masyarakat Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tata laku ini mencakup bagaimana setiap individu dan kelompok masyarakat bersikap terhadap sesama, menjaga kerukunan, serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam wawasan Nusantara, tata laku yang baik dan saling menghormati menjadi pondasi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Perilaku yang mendukung kerjasama, toleransi, dan gotong royong sangat penting untuk menjaga keutuhan Indonesia yang beraneka ragam ini.

Dasar dan Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara memiliki tujuan utama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Dengan wawasan ini, masyarakat Indonesia diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi tantangan global maupun internal. Landasan wawasan Nusantara adalah Pancasila dan UUD 1945, yang menjadi dasar negara dan pedoman bagi setiap warga negara dalam berinteraksi, bertindak, dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Selain itu, wawasan Nusantara juga bertujuan untuk memperkuat identitas bangsa Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya, sumber daya alam, serta kekuatan sosial yang mampu bersaing di tingkat internasional. Dalam konteks ini, wawasan Nusantara berperan sebagai pedoman untuk menciptakan kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengembangan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan pada tinjauan kewilayahan dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

a. Tinjauan Ke Dalam

Menurut Herdiawanto (2019), tinjauan ke dalam wawasan Nusantara memandang Indonesia sebagai negara yang memiliki kesatuan wilayah yang utuh. Tinjauan ini menekankan pentingnya menjaga integritas dan kedalaman wilayah Indonesia, baik dari segi daratan, perairan, maupun udara. Dengan adanya tinjauan ke dalam, kita diingatkan untuk menjaga kesatuan wilayah Indonesia dari segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah keutuhan negara, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini juga mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan adil di seluruh wilayah Indonesia, agar kepentingan seluruh lapisan masyarakat dapat terjaga dengan baik.

b. Tinjauan Ke Luar

Tinjauan ke luar dalam wawasan Nusantara berfokus pada bagaimana Indonesia berinteraksi dengan dunia luar tanpa kehilangan identitas sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ini berkaitan dengan diplomasi, kerja sama internasional, serta kemampuan Indonesia untuk memainkan peran penting di pentas global. Dengan tinjauan ke luar, Indonesia diharapkan mampu menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan negara lain, menjaga stabilitas regional, dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negeri.

Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama, antara lain:

a. Mewujudkan Keutuhan Wilayah dan Bangsa

Tujuan pertama dari wawasan Nusantara adalah untuk menjaga dan mewujudkan keutuhan wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, suku, dan budaya. Wawasan ini mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman agar setiap bagian dari wilayah Indonesia dapat berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh, terkoordinasi, dan harmonis. Dengan demikian, setiap individu dan kelompok di Indonesia diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi negara.

b. Meningkatkan Kesejahteraan Nasional

Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nasional melalui pengelolaan sumber daya alam dan sosial secara bijaksana dan adil. Wawasan Nusantara mendorong agar setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat dapat memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tanpa mengabaikan daerah-daerah yang lebih terpencil. Pembangunan ekonomi yang merata, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.

Di sisi lain, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional terbagi ke dalam berbagai stratifikasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Manan (2019), antara lain:

a. Stratifikasi Ideologis

Stratifikasi ideologis dalam wawasan Nusantara menekankan pada pentingnya ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Wawasan Nusantara dalam aspek ideologi memberi pemahaman bahwa persatuan Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan. Hal ini menjadi dasar bagi kehidupan bernegara yang bersifat demokratis serta



Bantuan kemanusiaan ialah pelaksanaan ideologi bangsa -
kasihpalestina.com

mengedepankan hak asasi manusia. Perwujudan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tak terbatas teritorial dan bersifat universal.

b. Stratifikasi Geografis

Stratifikasi geografis mengacu pada pengelolaan wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau yang tersebar antara dua samudra. Dalam wawasan Nusantara, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pembangunan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau-pulau besar maupun kecil. Pemerataan pembangunan ini akan menciptakan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Stratifikasi Kultural

Wawasan Nusantara juga mengakui keberagaman budaya yang ada di Indonesia sebagai kekayaan yang harus dijaga. Stratifikasi kultural memandang bahwa perbedaan suku, bahasa, agama, dan tradisi bukanlah halangan, tetapi justru menjadi sumber kekuatan bangsa. Dengan wawasan ini, Indonesia diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk mempererat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat.

d. Stratifikasi Sosial-Ekonomi

Stratifikasi sosial-ekonomi dalam wawasan Nusantara berfokus pada pentingnya pengelolaan dan pemerataan sumber daya ekonomi di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta penyediaan akses yang setara bagi semua warga negara. Dalam konteks ini, wawasan Nusantara mendorong terciptanya sistem sosial-ekonomi yang inklusif dan adil, yang memastikan semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional.

Peran dan Manfaat Wawasan Nusantara

a. Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, wawasan ini memberikan arah dan pedoman dalam menjalani kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip kesatuan dan keberagaman. Wawasan Nusantara menegaskan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan wilayah, yang mencakup daratan, perairan, dan udara, serta mengajarkan bahwa seluruh elemen bangsa harus bersatu untuk menjaga keutuhan negara.

Dalam kedudukannya, wawasan ini menjadi landasan bagi kebijakan nasional dan cara pandang masyarakat terhadap identitas bangsa Indonesia yang utuh dan tidak terpisahkan. Sebagai dasar bagi sistem pemerintahan dan pengelolaan wilayah negara, wawasan Nusantara berfungsi untuk memperkokoh integritas bangsa dan negara Indonesia.

b. Fungsi Wawasan Nusantara

Fungsi wawasan Nusantara sangat penting dalam menciptakan kesadaran kolektif untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Wawasan ini menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam, pembangunan sosial, serta hubungan antar bangsa. Selain itu, wawasan Nusantara berfungsi untuk memperkuat identitas bangsa Indonesia di mata dunia internasional dan memandu setiap langkah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional yang adil dan makmur. Sebagai pandangan hidup yang menyatukan, wawasan ini mengajarkan tentang pentingnya memelihara keharmonisan antar berbagai elemen bangsa, serta menjaga keberagaman yang ada dengan tetap menegakkan prinsip kebersamaan dan solidaritas.

Menurut Kardiman, dkk (2017), terdapat lima fungsi utama wawasan Nusantara, yaitu:

- ▷ **Fungsi Ideologis:** Wawasan Nusantara berfungsi sebagai dasar ideologi yang mengarahkan setiap tindakan negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Fungsi ideologis ini memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan berlandaskan pada prinsip negara yang bersatu, adil, dan sejahtera.
- ▷ **Fungsi Geografis:** Sebagai pandangan hidup yang menekankan pada kesatuan wilayah Indonesia, wawasan Nusantara berfungsi untuk menjaga dan mengelola wilayah negara yang sangat luas dan terdiri dari berbagai pulau, serta menjaga kedaulatan wilayah laut dan udara.
- ▷ **Fungsi Kultural:** Wawasan Nusantara juga berfungsi untuk memelihara dan melestarikan budaya Indonesia yang sangat beragam, dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari identitas bangsa.
- ▷ **Fungsi Sosial:** Fungsi sosial wawasan Nusantara berperan dalam menjaga solidaritas sosial antar masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan saling mendukung.
- ▷ **Fungsi Ekonomi:** Fungsi ekonomi wawasan Nusantara mencakup pengelolaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang ada di seluruh wilayah Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah, dan mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.



Petani milenial, pemberdayaan sumber daya alam untuk kesejahteraan - sinartani.com

Urgensi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena wawasan ini tidak hanya menjadi landasan bagi pengelolaan negara, tetapi juga memberikan arah dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan ini mengajarkan bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, agama, dan bahasa, negara ini tetap harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, baik dalam hal politik, sosial, maupun ekonomi. Wawasan Nusantara berfungsi untuk memperkokoh identitas nasional dan menghindari perpecahan antar kelompok. Dengan adanya wawasan ini, Indonesia diharapkan dapat mengelola keberagaman yang ada untuk menciptakan keharmonisan, kebersamaan, dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wawasan Nusantara memiliki orientasi dan kepentingan yang utuh dan menyeluruh, baik bagi rakyat maupun wilayah tanah air Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang orientasi dan kepentingan tersebut:

a. Menjaga Keutuhan Wilayah dan Bangsa

Wawasan Nusantara bertujuan untuk menjaga integritas wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan perairan yang luas. Setiap bagian dari wilayah ini harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, dan harus dilindungi dari segala ancaman yang dapat merusak.

b. Mewujudkan Persatuan dalam Keberagaman

Indonesia dikenal dengan keberagamannya yang sangat luas, baik dari segi budaya, suku, agama, maupun bahasa. Wawasan Nusantara berfungsi untuk menjaga persatuan dalam keberagaman ini, dengan cara mengajarkan pentingnya toleransi, saling menghormati, dan kerja sama antar sesama warga negara.

c. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Wawasan Nusantara juga bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Pembangunan nasional harus mengutamakan kepentingan rakyat dan mencakup seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

d. Mengembangkan Identitas Nasional

Dengan wawasan Nusantara, bangsa Indonesia dapat mengembangkan identitas nasional yang kokoh. Identitas ini tidak hanya berbasis pada kesamaan fisik atau geografis, tetapi juga pada nilai-nilai budaya, sejarah, dan tradisi yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Wawasan Nusantara berawal dari konsep kewilayahan sejak masa penjajahan dan diperkuat setelah kemerdekaan, terutama melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi ini menegaskan bahwa laut antar-pulau adalah pemersatu, bukan pemisah, sehingga wilayah laut diakui sebagai bagian dari NKRI. Indonesia pun menjadi negara kepulauan pertama yang diakui dunia.

Seiring waktu, wawasan Nusantara diterapkan dalam pembangunan seperti pada bidang politik meneguhkan persatuan bangsa, bidang ekonomi mendorong pemerataan dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Pengakuan internasional terhadap wilayah laut Indonesia semakin memperkokoh konsep negara kesatuan, dengan laut sebagai penghubung dan bagian integral NKRI.

Sebagai satu kesatuan, wilayah Indonesia memiliki beberapa keunikan sebagai ciri khas, diantaranya:

- a. Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara kepulauan terbesar di dunia.
- b. Laut Indonesia menghubungkan pulau-pulau yang terpisah, menciptakan kesatuan wilayah yang unik.
- c. Indonesia memiliki tiga wilayah utama: daratan, perairan, dan udara yang saling terintegrasi.
- d. Letak geografis strategis Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua.
- e. Keberagaman budaya, bahasa, dan agama di Indonesia menciptakan keragaman yang luar biasa.
- f. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dengan berbagai bahasa daerah.
- g. Indonesia adalah negara dengan jumlah pulau terbesar dengan potensi sumber daya alam melimpah.
- h. Keberagaman flora dan fauna di Indonesia sangat tinggi, membuatnya menjadi salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar.
- i. Indonesia memiliki banyak kawasan konservasi alam yang penting bagi kelestarian lingkungan global.
- j. Sebagai negara yang berada di titik persilangan antara dua samudra besar, Indonesia memiliki potensi ekonomi maritim yang sangat besar.
- k. Indonesia adalah negara yang kaya dengan tradisi dan adat istiadat yang beragam, namun tetap memiliki ikatan budaya yang memperkuat rasa persatuan di seluruh negeri.

Contoh Soal

Jelaskan bagaimana wawasan Nusantara dapat berperan dalam merawat keutuhan bangsa dan negara Indonesia, serta berikan contoh nyata penerapan wawasan ini dalam kehidupan sehari-hari!

Pembahasan:

Wawasan Nusantara memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia karena memberikan pandangan hidup yang mengedepankan kesatuan dan keberagaman. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia memerlukan suatu pandangan yang mengajarkan pentingnya persatuan meskipun ada banyak perbedaan. Wawasan Nusantara mengajak seluruh warga negara untuk melihat Indonesia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, baik dari segi wilayah, sosial, maupun budaya. Sebagai contoh nyata penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika masyarakat Indonesia menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan agama dan budaya. Misalnya, pada perayaan hari raya agama tertentu, umat agama lain turut berpartisipasi dengan saling menghormati dan memberikan dukungan. Hal ini menunjukkan bahwa wawasan Nusantara, yang mengedepankan persatuan dalam keberagaman, dapat mendorong terciptanya kerukunan antar sesama warga negara Indonesia.

Fakta Unik Seputar Pancasila

1.000 Lebih Motif Batik Khas Indonesia

Gaharu memiliki nilai ekonomis yang sangat mencengangkan, baik dari segi resin maupun kayunya. Resin gaharu berkualitas tinggi yang dihasilkan dari pohon yang terinfeksi jamur dapat dihargai hingga puluhan juta rupiah per kilogram, dengan minyak gaharu yang dihasilkan dari proses penyulingannya bisa dijual hingga ratusan juta rupiah per liter. Produk ini sangat dicari di pasar internasional, terutama di negara-negara Timur Tengah, India, dan Jepang, untuk parfum, kosmetik, dan produk aromaterapi. Selain resin, kayu gaharu juga memiliki nilai jual yang tinggi, digunakan untuk pembuatan patung, ukiran, perabotan mewah, dan artefak keagamaan yang dihargai di pasar seni. Keunikan dan kelangkaannya membuat gaharu menjadi komoditas yang sangat bernilai ekonomi di Indonesia dan negara-negara penghasil lainnya, menawarkan potensi keuntungan yang luar biasa bagi para petani dan pengusaha yang mengelola tanaman ini secara berkelanjutan.



Gaharu (Agarwood Tree) - [shutterstock.com.1476803102](https://www.shutterstock.com/1476803102)



2. Perwujudan Wawasan Nusantara

Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan yang utuh adalah implementasi nyata dari wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau, memiliki tantangan besar dalam menjaga integritas wilayahnya, mengingat luasnya wilayah yang tersebar di dua samudra dan dua benua. Namun, dengan wawasan Nusantara, Indonesia menekankan bahwa meskipun terbentang luas dan terdiri dari berbagai pulau, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan wilayah yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Hal ini tercermin dalam kebijakan negara yang mengedepankan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau-pulau besar maupun kecil, serta pengakuan terhadap wilayah laut Indonesia sebagai bagian integral dari negara. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya menjadi pandangan hidup, tetapi juga pedoman yang mengarahkan pengelolaan dan kebijakan pemerintahan untuk memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia terjaga dengan baik dan dapat berfungsi sebagai satu kesatuan yang saling mendukung.

a. Kepulauan Nusantara sebagai Wujud Kesatuan pada Aspek Politik

Perwujudan Nusantara secara spesifik dalam bidang politik dapat diuraikan dalam beberapa poin:

▷ **Penyatuan Wilayah Daratan dan Lautan**

Wawasan Nusantara mengakui bahwa wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan laut merupakan satu kesatuan politik. Negara Indonesia menganggap bahwa laut yang memisahkan pulau-pulau bukanlah penghalang, tetapi penghubung antar wilayah negara yang harus dijaga. Hal ini sebagaimana diatur dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957.



Djuanda Kartawidjaja, Bapak Maritim Indonesia - shutterstock.com.1485751196

▷ **Desentralisasi Pemerintahan**

Dalam rangka menjaga keutuhan politik, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Meskipun daerah memiliki otonomi, mereka tetap berada dalam kerangka satu kesatuan negara yang terintegrasi. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.

▷ **Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Terpencil**

Wawasan Nusantara juga diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan pulau-pulau kecil. Pemerataan pembangunan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia dapat terhubung dengan baik dan berfungsi sebagai satu kesatuan politik yang efektif.

▷ **Penyelarasan Kebijakan Nasional**

Kebijakan nasional harus selaras dengan kebutuhan dan kondisi daerah-daerah yang berbeda. Wawasan Nusantara mendorong penyusunan kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan semua wilayah, dari Aceh hingga Papua, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal tanpa mengesampingkan prinsip kesatuan.

▷ **Perlindungan terhadap Keberagaman Politik**

Wawasan Nusantara juga berperan dalam menjaga keberagaman politik yang ada di Indonesia, baik dalam hal partai politik, organisasi masyarakat, maupun aspirasi daerah. Meski beragam,

Indonesia tetap berpegang pada prinsip demokrasi yang memastikan setiap suara dihargai dan sistem politik negara tetap satu kesatuan.

▷ **Penguatan Identitas Nasional**

Wawasan Nusantara memotivasi masyarakat untuk memiliki identitas nasional yang kuat, meskipun ada keberagaman budaya dan suku bangsa. Identitas ini sangat penting agar setiap individu merasa bagian dari negara yang satu, memperkuat integrasi politik yang membentuk kesatuan Indonesia.

▷ **Pencegahan Ancaman Pemisahan**

Dalam konteks politik, wawasan Nusantara berfungsi untuk mencegah adanya gerakan atau potensi separatisme yang dapat merusak keutuhan NKRI. Negara menjamin bahwa seluruh wilayah memiliki kesetaraan dalam hal politik, dengan menjaga persatuan dalam keberagaman.

b. Kepulauan Nusantara sebagai Wujud Kesatuan pada Aspek Ekonomi

Perwujudan Nusantara secara spesifik dalam bidang ekonomi dapat diuraikan dalam beberapa poin:

▷ **Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Merata**

Wawasan Nusantara menuntut pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang ada di seluruh wilayah, baik daratan maupun perairan, untuk kepentingan bersama. Ini mengarah pada kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih merata, yang tidak hanya berfokus pada daerah tertentu, tetapi mencakup seluruh Indonesia.



Industri kelapa sawit, salah satu penghasil devisa negara - shutterstock.com.1435122797

▷ **Integrasi Infrastruktur Ekonomi**

Salah satu perwujudan wawasan Nusantara dalam aspek ekonomi adalah pengembangan infrastruktur yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan transportasi, seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara, serta jaringan komunikasi, bertujuan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tercipta integrasi ekonomi yang lebih kuat.

▷ **Penciptaan Ekosistem Ekonomi yang Inklusif**

Wawasan Nusantara juga mendorong penciptaan ekosistem ekonomi yang inklusif, di mana semua daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Ini termasuk pengembangan sektor ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan akses terhadap teknologi dan pasar bagi daerah-daerah yang lebih terpencil.

c. Kepulauan Nusantara sebagai Wujud Kesatuan pada Aspek Sosial Budaya

Perwujudan Nusantara secara spesifik dalam hal sosial budaya dapat diuraikan dalam beberapa poin:

▷ Pelestarian Keragaman Budaya

Wawasan Nusantara menekankan pentingnya pelestarian keragaman budaya Indonesia sebagai salah satu kekayaan yang harus dijaga. Berbagai suku, bahasa, dan tradisi yang ada di Indonesia harus dihargai dan dijadikan sebagai sumber kekuatan, yang memperkaya identitas bangsa tanpa mengorbankan prinsip kesatuan.

▷ Pendidikan Multikultural

Dalam konteks sosial budaya, wawasan Nusantara mendorong penguatan pendidikan multikultural yang mengajarkan nilai toleransi, saling menghormati, dan kerja sama antar budaya. Dengan pendekatan ini, setiap generasi muda Indonesia akan memahami pentingnya keberagaman dalam membangun bangsa yang harmonis dan sejahtera.

d. Kepulauan Nusantara sebagai Wujud Kesatuan pada Aspek Pertahanan Keamanan

Perwujudan Nusantara secara spesifik dalam bidang pertahanan dan keamanan dapat diuraikan dalam beberapa poin:

▷ Keamanan Wilayah Laut dan Daratan

Dalam konteks pertahanan dan keamanan, wawasan Nusantara menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan seluruh wilayah Indonesia, baik di darat maupun di laut. Tugas utama negara adalah melindungi wilayah dari ancaman luar dan dalam, serta memastikan bahwa semua daerah, termasuk perairan, aman dan tidak terancam oleh kekuatan asing.

▷ Penguatan Sistem Keamanan Nasional

Wawasan Nusantara berperan dalam penguatan sistem pertahanan dan keamanan nasional, yang mencakup kerjasama antar institusi keamanan, seperti TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Keamanan dalam negeri, termasuk pencegahan ancaman terorisme dan separatisme, harus dikelola dengan baik agar seluruh wilayah Indonesia tetap aman dan terkendali.

Penerapan wawasan Nusantara sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan, wawasan ini menjadi pedoman untuk memastikan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan tetap utuh dan bersatu. Setiap elemen masyarakat diharapkan untuk mewujudkan wawasan Nusantara dengan cara berpikir, bersikap, dan berucap yang mendukung integrasi dan keharmonisan antar wilayah dan keberagaman yang ada. Penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari harus mengutamakan semangat kebersamaan, persatuan, dan rasa saling menghormati antara sesama warga negara. Perwujudan wawasan Nusantara dapat diupayakan melalui berbagai sisi, diantaranya:

a. Perwujudan Melalui Kehidupan Politik

▷ Mendorong Integrasi Nasional

Dalam kehidupan politik, wawasan Nusantara harus mendorong upaya untuk mengintegrasikan seluruh wilayah Indonesia, dari sabang hingga merauke, dalam satu kesatuan negara yang utuh. Hal ini bisa dilakukan dengan memastikan adanya kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan di seluruh daerah.

▷ Menghargai Keberagaman Politik

Keberagaman partai politik dan pandangan politik yang ada di Indonesia harus dihargai dan diterima sebagai bagian dari dinamika kehidupan berpolitik yang sehat. Wawasan Nusantara mengajarkan pentingnya toleransi dalam dunia politik untuk menjaga stabilitas nasional.

▷ **Pemberdayaan Daerah**

Mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam politik juga berarti memperkuat pemberdayaan daerah dengan memberikan otonomi yang lebih besar, tanpa mengurangi kedudukan NKRI sebagai negara kesatuan. Kebijakan ini penting agar setiap daerah memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi lokalnya.

▷ **Pemeliharaan Persatuan Nasional**

Wawasan Nusantara dalam politik berfungsi untuk memperkuat persatuan nasional dengan menghindari pemisahan wilayah atau pemecahan bangsa. Setiap kebijakan politik harus mendukung rasa nasionalisme yang menyatukan bangsa, meskipun dalam keberagaman.

▷ **Pendidikan Politik yang Inklusif**

Pendidikan politik yang inklusif harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia agar masyarakat memahami dan menghargai prinsip-prinsip demokrasi serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini penting agar setiap warga negara dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik.

b. Perwujudan Melalui Kehidupan Ekonomi

▷ **Pemerataan Pembangunan Ekonomi**

Wawasan Nusantara dalam ekonomi mengharuskan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Pembangunan yang merata akan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

▷ **Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan**

Wawasan Nusantara mengajarkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam Indonesia secara berkelanjutan. Setiap daerah harus diberdayakan untuk mengelola sumber daya alamnya, namun dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan manfaat jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia.

▷ **Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah**

Penerapan wawasan Nusantara di bidang ekonomi harus berprinsip pada semangat kemandirian ekonomi daerah. Masing-masing daerah harus diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi ekonomi daerahnya, sehingga mampu memberikan dampak dalam penyerapan tenaga kerja, serta mendorong pergerakan ekonomi nasional.



Batik Trusmi Cirebon, wujud semangat kemandirian ekonomi daerah -aboutcirebon.id

c. Perwujudan Melalui Kehidupan Sosial dan Budaya

▷ **Pelestarian Keragaman Budaya**

Wawasan Nusantara mengajarkan pentingnya pelestarian keragaman budaya Indonesia yang kaya. Setiap budaya yang ada di Indonesia harus dihargai dan dilestarikan agar dapat menjadi kekuatan nasional yang memperkaya identitas bangsa. Di sisi lain, keragaman budaya juga mengokohkan semangat nasionalisme, dengan menumbuhkan rasa memiliki serta kebanggaan akan keragaman budaya Indonesia.

▷ **Peningkatan Toleransi Sosial**

Dalam kehidupan sosial, wawasan Nusantara berfungsi untuk meningkatkan toleransi antar kelompok masyarakat yang berbeda suku, agama, dan budaya. Dengan demikian, tercipta kerukunan sosial yang menjadi dasar bagi kehidupan yang harmonis di Indonesia.

d. Perwujudan Melalui Kehidupan Pertahanan dan Keamanan

▷ **Peningkatan Kewaspadaan Nasional**

Wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan mengharuskan seluruh warga negara untuk memiliki kewaspadaan terhadap potensi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ini termasuk upaya menjaga stabilitas politik dan sosial demi keberlangsungan NKRI.

▷ **Penguatan Sistem Pertahanan Terpadu**

Penerapan wawasan Nusantara dalam pertahanan dan keamanan berarti memperkuat sistem pertahanan yang terintegrasi antara TNI, Polri, dan masyarakat. Setiap elemen pertahanan harus bekerja sama untuk menjaga kedaulatan negara, termasuk wilayah laut dan udara.

▷ **Penyebaran Kesadaran Keamanan di Seluruh Wilayah**

Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan negara kepada seluruh masyarakat di setiap wilayah Indonesia merupakan bagian dari penerapan wawasan Nusantara. Kesadaran ini penting agar setiap warga negara turut serta dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara.

Penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari dapat tercermin dari cara berpikir, bersikap, dan berucap setiap warga negara Indonesia. Cara berpikir yang inklusif dan mengedepankan prinsip persatuan dalam keberagaman, sikap yang menghargai perbedaan, serta ucapan yang membangun kerukunan menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan wawasan Nusantara. Setiap individu diharapkan dapat memahami pentingnya menjaga keutuhan dan kebersamaan bangsa meskipun ada perbedaan di antara mereka. Penerapan wawasan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membangun hubungan antar individu dan antar kelompok dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Berikut ini merupakan beberapa contoh penerapan wawasan Nusantara dalam masyarakat, antara lain:

a. Sikap Toleransi Antar Umat Beragama

Masyarakat Indonesia menunjukkan sikap toleransi antar umat beragama, seperti saling menghormati saat perayaan agama yang berbeda. Misalnya, umat Kristen ikut merayakan Idul Fitri bersama umat Islam, atau umat Hindu berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan umat Kristen, sebagai bentuk penerapan wawasan Nusantara.

b. Gotong Royong dalam Masyarakat

Salah satu bentuk penerapan wawasan Nusantara adalah dalam budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia secara aktif membantu sesama dalam menyelesaikan berbagai masalah, baik itu dalam kegiatan sosial seperti misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan.

c. Penghargaan terhadap Keberagaman Budaya Lokal

Wawasan Nusantara juga tercermin dalam penghargaan terhadap keberagaman budaya lokal. Misalnya, masyarakat turut merayakan festival budaya daerah, seperti Festival Budaya Bali atau Festival Tanah Toraja, yang tidak hanya mengenalkan budaya daerah tetapi juga mempererat hubungan antar kelompok budaya di Indonesia.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Wawasan Nusantara

Pelaksanaan wawasan Nusantara menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan faktor geografis, kesejahteraan, dan kondisi sosial budaya. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan

pulau, dengan jarak yang sangat jauh antar wilayah, menjadikan pemerataan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih sulit. Selain itu, ketimpangan kesejahteraan antar daerah yang berbeda juga menjadi tantangan besar, dengan beberapa wilayah yang lebih maju dan lainnya masih tertinggal. Ditambah lagi dengan kondisi sosial budaya yang sangat beragam, di mana perbedaan suku, agama, dan tradisi sering kali mempengaruhi hubungan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan wawasan Nusantara, penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik, pemerataan kesejahteraan, dan pengelolaan keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia.

a. Permasalahan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan wawasan Nusantara. Namun, dalam prakteknya, pemberdayaan masyarakat seringkali terhambat oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Menurut John Naisbitt, pendekatan *bottom-up planning* adalah solusi untuk mengatasi masalah ini, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan yang diterapkan, tetapi juga subjek yang memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi daerah mereka. Pendekatan *bottom-up* ini memungkinkan masyarakat untuk merasa memiliki dan bertanggung jawab atas pembangunan yang dilakukan.

Namun, di sisi lain, pendekatan *top-down planning* yang lebih bersifat dari atas ke bawah juga memiliki tantangan tersendiri. Pemerintah sering kali membuat kebijakan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di tingkat bawah. Hal ini menyebabkan ketidakselarasan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2007, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan yang mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Oleh karena itu, untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat, pendekatan yang menggabungkan kedua hal ini, yaitu *bottom-up* dan *top-down*, perlu diterapkan secara seimbang.

b. Globalisasi

Globalisasi adalah proses integrasi dunia yang semakin cepat melalui perkembangan teknologi komunikasi, perdagangan bebas, dan mobilitas orang yang lebih mudah. Fenomena ini menciptakan dunia yang semakin terhubung, tanpa batas fisik, yang memungkinkan informasi dan barang bergerak



K-Pop menjadi tantangan bagi identitas nasional -
shutterstock.com.2135267457

lebih cepat dan transparan. Menurut Kenichi Ohmae, globalisasi menciptakan dunia tanpa batas di mana negara-negara semakin terhubung satu sama lain melalui aliran barang, jasa, modal, dan informasi. Bagi Indonesia, globalisasi membawa tantangan dan peluang. Tantangan terbesar adalah bagaimana mempertahankan identitas nasional dan keutuhan NKRI di tengah gempuran pengaruh luar, sementara peluangnya terletak pada akses pasar internasional yang lebih besar dan kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan.

c. Era Baru Kapitalisme

Era baru kapitalisme, menurut Harold S. Sloan dan Arnold J. Zurcher, menunjukkan bahwa kapitalisme telah berkembang menjadi sistem yang lebih global dan terdesentralisasi, dipengaruhi oleh globalisasi. Kapitalisme kini tidak hanya berfokus pada penguasaan pasar lokal, tetapi juga pada penguasaan pasar global, di mana perusahaan-perusahaan besar beroperasi tanpa batas negara. Dalam era

globalisasi ini, kapitalisme mempercepat pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, meskipun negara-negara berkembang seperti Indonesia mendapatkan manfaat dari investasi asing dan perkembangan teknologi, ketimpangan sosial dan ketergantungan terhadap ekonomi global semakin meningkat. Oleh karena itu, kapitalisme di era globalisasi membutuhkan regulasi yang lebih kuat untuk memastikan bahwa dampaknya tidak merugikan kesejahteraan masyarakat secara luas, dan tetap menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan.

d. Kewajiban Bela Negara dari Warga Negara

Kesadaran bela negara dari setiap warga negara merupakan elemen penting dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Sebagai bagian dari pelaksanaan wawasan Nusantara, setiap individu di Indonesia diharapkan memiliki kesadaran untuk berperan aktif dalam mempertahankan negara, baik melalui pertahanan fisik, sosial, maupun ekonomi. Bela negara tidak hanya terbatas pada aksi militer, tetapi juga mencakup penguatan sosial, ekonomi, dan budaya yang mendukung keberlanjutan dan kemajuan negara. Kesadaran ini harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Sebagai warga negara yang baik, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan berkontribusi dalam pembangunan negara untuk memastikan bahwa Indonesia tetap utuh dan berdaulat di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Faktor Pendorong Pelaksanaan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengedepankan pentingnya kesatuan dan keberagaman dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mewujudkan wawasan ini dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan perilaku yang mendukung prinsip-prinsip persatuan, toleransi, dan gotong royong. Berdasarkan Wahono dan Atsar (2019), berikut adalah 15 poin perilaku yang dapat mendukung implementasi wawasan Nusantara:

a. Menghormati Perbedaan Suku dan Agama

Setiap individu harus menghargai dan menerima perbedaan suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan bangsa.

b. Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama

Berperilaku dengan sikap saling menghormati antar umat beragama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam acara-acara keagamaan.

c. Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Aktif dalam program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah secara merata.

d. Menghargai Hasil Kerja Keras Orang Lain

Mengapresiasi usaha dan kerja keras orang lain, tanpa melihat perbedaan latar belakang mereka.

e. Menjaga Persatuan dalam Keberagaman

Menjaga agar keragaman budaya, adat, dan tradisi yang ada tidak menghalangi terciptanya persatuan bangsa. Sebaliknya, ragam kebudayaan yang ada harus menjadi potensi yang dapat menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

f. Memperhatikan Kesejahteraan Sosial

Menunjukkan perhatian dan empati terhadap sesama, khususnya mereka yang kurang mampu atau berada dalam kondisi kesulitan.

- g. Mengutamakan Kepentingan Bersama di Atas Kepentingan Pribadi
Selalu mementingkan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok.
- h. Berperan dalam Mempertahankan Keutuhan Negara
Aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan integritas negara, baik melalui jalur politik, sosial, atau pertahanan.
- i. Menyebarkan Nilai-nilai Pancasila
Berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu saling menghormati, menegakkan keadilan, dan menjaga persatuan.
- j. Mengutamakan Kepedulian terhadap Lingkungan
Menjaga dan melestarikan alam Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawab untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang.
- k. Bekerja Sama dalam Masyarakat
Berkolaborasi dengan sesama warga masyarakat dalam memecahkan masalah sosial yang ada, baik dalam skala kecil maupun besar.
- l. Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Menunjukkan sikap proaktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, baik dengan cara mengajar, mendukung fasilitas pendidikan, maupun memberi akses pendidikan yang merata.
- m. Menghargai Keadilan dan Hukum
Mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, serta mendukung upaya penegakan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi.
- n. Berperilaku Demokratis
Menghormati hak orang lain dalam berpendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan cara yang jujur dan adil.
- o. Menjaga Identitas Nasional
Menghargai dan melestarikan budaya dan tradisi lokal yang menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia, sambil tetap mengedepankan semangat kebangsaan yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia.

Contoh Soal

Jelaskan bagaimana penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta berikan contoh nyata dari kehidupan sosial di masyarakat!

Pembahasan:

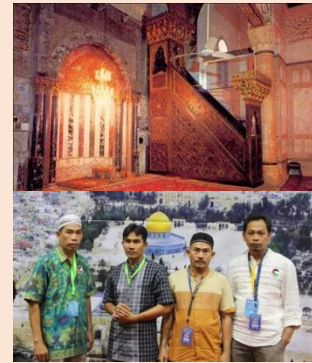
Penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, terutama karena negara ini terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang sangat beragam. Salah satu contoh penerapan wawasan Nusantara adalah dalam sikap saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Misalnya, ketika umat Muslim merayakan Idul Fitri, umat Kristen atau umat Hindu turut memberikan ucapan selamat dan merayakan kebahagiaan bersama, sehingga tercipta rasa persatuan meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Di sisi lain, dalam kehidupan sosial masyarakat, wawasan Nusantara juga tercermin

dalam kegiatan gotong royong, seperti membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun setiap individu berbeda-beda, mereka tetap saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama demi kebaikan bersama. Penerapan sikap-sikap ini menjadi landasan yang memperkuat hubungan antar warga, yang akhirnya berdampak pada kemajuan negara dalam menjaga keutuhan dan keberagaman.

Fakta Unik Seputar Pancasila

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Ukiran Jepara terkenal di dunia karena keindahan dan kualitasnya yang luar biasa, yang telah diakui internasional selama berabad-abad. Salah satu momen paling bersejarah adalah pada tahun 1969, saat mimbar bersejarah di Masjid Al-Aqsa, yang dibuat pada abad ke-12 oleh Sultan Nuruddin Zanki, dibakar dalam sebuah insiden. Sebagai bagian dari restorasi, pada tahun 2007, Kerajaan Yordania memulai proyek pembuatan replika mimbar tersebut, yang melibatkan lima pengukir kayu dari Jepara, Indonesia. Para pengukir, yakni Abdul Mutholib, Zaenal Arifin, Ali Ridho, Sarmidi, dan Mustafid Dinul Azis, bekerja di Yordania selama empat tahun untuk merestorasi mimbar yang rusak akibat kebakaran dan merakit replika menggunakan kayu kenari serta hiasan ukiran kaligrafi yang rumit, mencerminkan keahlian tinggi pengrajin Jepara.



Para pengukir asal Jepara dan karyanya (Mimbar Al-Aqsa) - alaqsa.online.net

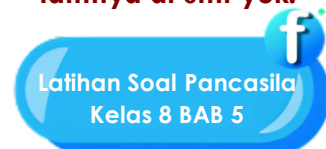
Rangkuman

1. Wawasan Nusantara memiliki definisi, yaitu pandangan hidup yang mengedepankan persatuan dan kesatuan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, suku, agama, dan budaya.
2. Wawasan Nusantara menganggap wilayah Indonesia (daratan, perairan, dan udara) sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
3. Konsep Nusantara dimulai sejak masa kerajaan Majapahit melalui Sumpah Palapa oleh Patih Gajah Mada. Wawasan Nusantara semakin diperkuat dalam konteks negara Indonesia, terutama pasca kemerdekaan.
4. Wawasan Nusantara memiliki kedudukan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Fungsi utama wawasan Nusantara adalah untuk memperkuat integritas politik, sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia.
6. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan dalam politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dengan cara menjaga keberagaman dalam bingkai kesatuan bangsa.
7. Tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara berasal dari kondisi geografis yang luas dan tersebar, ketimpangan kesejahteraan antar wilayah dan kondisi sosial budaya yang sangat beragam.
8. Perilaku mendukung wawasan Nusantara diantaranya menghormati perbedaan, berpartisipasi dalam pembangunan, menjaga kerukunan antarumat beragama, dan memelihara keberagaman budaya, dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi.
9. Perwujudan wawasan Nusantara diantaranya adalah menjaga persatuan melalui kebijakan yang merata dan inklusif (politik), pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (ekonomi), menghargai keberagaman budaya dan meningkatkan toleransi sosial (sosial budaya), dan menjaga kedaulatan negara, dengan sistem pertahanan yang terintegrasi (pertahanan).
10. Perilaku sehari-hari yang mendukung wawasan Nusantara diantaranya adalah sikap saling menghormati, kerja sama, gotong royong, dan penguatan identitas nasional.
11. Dalam rangka menghadapi permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat dapat diupayakan dengan menyusun kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan (*bottom-up*) dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
12. Tantangan globalisasi dan kapitalisme perlu dihadapi dengan pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan.
13. Menanamkan nilai-nilai bela negara di masyarakat untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI merupakan bagian dari kesadaran bela negara.

Latihan Soal

1. Wawasan Nusantara mengajarkan bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari
 - A. Banyak negara bagian
 - B. Banyak pulau dan wilayah perairan yang terpisah
 - C. Satu kesatuan wilayah yang utuh
 - D. Banyak negara yang bergabung menjadi satu
2. Apa yang dimaksud dengan Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada?
 - A. Ikrar untuk membentuk pemerintahan yang adil
 - B. Ikrar untuk menyatukan seluruh wilayah nusantara di bawah kekuasaan Majapahit
 - C. Ikrar untuk merdeka dari penjajahan
 - D. Ikrar untuk memperkenalkan budaya Nusantara
3. Menurut Pasal 25A UUD 1945, Indonesia adalah negara yang berbentuk
 - A. Kesatuan yang tidak terpisahkan
 - B. Federasi antar wilayah
 - C. Negara pulau
 - D. Negara yang terbagi dalam beberapa provinsi
4. Fungsi wawasan Nusantara dalam konteks politik adalah untuk
 - A. Meningkatkan perdagangan internasional
 - B. Memperkuat keberagaman budaya
 - C. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa
 - D. Mengurangi perbedaan sosial ekonomi
5. Dalam bidang ekonomi, wawasan Nusantara mendorong pengelolaan sumber daya alam secara
 - A. Terpusat pada satu wilayah
 - B. Berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah
 - C. Eksklusif untuk daerah tertentu
 - D. Tergantung pada negara lain
6. Globalisasi dapat menjadi tantangan bagi Indonesia karena
 - A. Mempercepat kerjasama antar negara
 - B. Membuka akses pasar internasional
 - C. Menciptakan dunia tanpa batas yang bisa mengancam identitas bangsa
 - D. Meningkatkan ekonomi global
7. Yang dimaksud dengan "*bottom-up planning*" dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah
 - A. Pemerintah merancang kebijakan tanpa melibatkan masyarakat
 - B. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan
 - C. Masyarakat hanya mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
 - D. Pemerintah memberikan bantuan langsung tanpa koordinasi

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

- Atsar, M., & Wahono, A. (2019). Penerapan wawasan nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jakarta: Penerbit Ilmu Pengetahuan.
- Damri, S., & Putra, B. (2020). Wawasan Nusantara: Perspektif dalam kebijakan nasional dan pembangunan. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Mandiri.
- Kardiman, D., & lainnya. (2017). Fungsi dan peran wawasan nusantara dalam politik dan ekonomi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya Press.
- Naisbitt, J. (1982). Megatrends: Ten new directions transforming our lives. New York: Warner Books.
- Ohmae, K. (1995). The end of the nation state: The rise of regional economies. New York: Free Press.
- Permendagri No. 7 Tahun 2007. (2007). Pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Sloan, H. S., & Zurcher, A. J. (2009). Capitalism in the global age: A new approach. New York: HarperCollins.
- Wahono, A., & Atsar, M. (2019). Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial dan budaya. Bandung: Penerbit Alam Raya.
- Widyaseputra, M. J. (2020). Kata dan makna dalam wawasan nusantara: Perspektif budaya dan kebangsaan. Jakarta: Pustaka Cendekia.